



TAHUN 2024

KAK/RAB/HPS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01: Komplek Balaikota, Kelurahan Bugis, Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE TAHUN 2024

- OPD** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- PROGRAM** : PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- KEGIATAN** : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan** :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota.
 3. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota.

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Volume : 3
 - Satuan Ukur : Lembaga
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota.
 - Volume : 40
 - Satuan Ukur : Perangkat Daerah
3. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota.
 - Volume : 20
 - Satuan Ukur : Perangkat Daerah

Capaian Kinerja :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Masukan (input) : Biaya, Orang
 - Keluaran (output) : Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota.

- Outcome : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat Kabupaten/Kota yang efektif dan berkelanjutan, guna mendukung integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan pembangunan di kota Samarinda.

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

- Masukan (input) : Biaya, Orang
- Keluaran (output) : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota.
- Outcome : Meningkatnya komitmen dan kapasitas Pemerintah dalam menetapkan kebijakan serta menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

3. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

- Masukan (input) : Biaya, Orang
- Keluaran (output) : Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota..
- Outcome : Meningkatnya pemahaman, dukungan, dan komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota terhadap kebijakan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b) Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- f) Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda Tahun 2023 – 2027

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

4. Misi Pemerintah Kota Samarinda

DP2Pa mendukung misi no 1 yaitu *Mewujudkan warga kota yang religious, unggul dan berbudaya*

5. Program Prioritas Walikota Samarinda

DP2PA mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni *Program Smart City Plus*.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

1. APBD Kota Samarinda Rp 600.023.460,-

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.



Samarinda, 2023
PPTK Kegiatan,
Awe Ului, S.KM., M.Kes
NIP.19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugra Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				7.480.000
	- Honorarium PA (1 org x 2 bln)	2	org/bln	1.250.000	2.500.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 2 bln)	2	org/bln	1.210.000	2.420.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bln)	2	org/bln	480.000	960.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	420.000	840.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	380.000	760.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan				523.460
	ATK Kegiatan				
	- Map Dinas	20	lbr/kd	13.973	279.460
	Penggandaan				
	- Fotokopi	488	lbr/kd	500	244.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.640.000
	- Makan minum Rapat (Nasi Kotak) 30 org x 4 Keg	120	org/keg	48.000	5.760.000
	- Makan minum Rapat (Snack) 30 org x 4 Keg	120	org/keg	24.000	2.880.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				133.380.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Focal Point PD				
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 2 kl)	200	org/hr	234.000	46.800.000
	Koordinasi PUG dengan Dunia				
	- Biaya Pertemuan/Rapat (60 org x 1 kl)	60	org/hr	234.000	14.040.000
	Koordinasi PUG dengan Lembaga Filantropi, CSR				
	- Biaya Pertemuan/Rapat (50 org x 1 kl)	50	org/hr	234.000	11.700.000
	Koordinasi PUG dengan Pengelola Layanan				
	- Biaya Pertemuan/Rapat (60 org x 1 kl)	60	org/kali	234.000	14.040.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja-PUG				
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 kl)	200	org/kali	234.000	46.800.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					150.023.460
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					150.023.460

Samarinda, Desember 2023

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan



Awe Lili, S.KM, M.Kes
NIP. 19690804 1994 02 2002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)
Jalan Dahia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541) 743307. Telpen Pengaduan +6823-2442-1313
Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id Pos-el: dppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bahan Cetak				-
1.	Map Dinas	lembar	20	13.900,00	278.000,00
2.	Penggandaan	Lembar	486	300,00	145.800,00
				JUMLAH I	423.800,00
II	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	340	48.000,00	16.320.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	340	24.000,00	8.160.000,00
				JUMLAH II	24.480.000,00
III	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
1.	Paket Meeting halfday Rapat Koordinasi POKJA PUG Kota Samarinda	org/hr	100	234.000,00	23.400.000,00
2.	Paket Meeting halfday Rapat Koordinasi Pra Evaluasi PUG 2024 Kota Samarinda	org/hr	100	234.000,00	23.400.000,00
3.	Paket Meeting halfday Seminar Gender Mainstreaming dan Launching Layanan PUTARAN	org/hr	170	234.000,00	39.780.000,00
				JUMLAH III	86.580.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	111.484.400,00
				PPN 10%	11.148.440,00
				Jumlah Biaya	122.632.840,00
				Dibulatkan	122.632.000,00
	Terbilang : Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023

Ditetapkan oleh :





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahha Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan +6823-2442-1313
Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Rincian Rencana Anggaran Belanja

No.	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				11.220.000
	- Honorarium PA (1 org x 3 bln)	3	org/bln	1.250.000	3.750.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 3 bln)	3	org/bln	1.210.000	3.630.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 3 bln)	3	org/bln	480.000	1.440.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	3	org/bln	420.000	1.260.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	3	org/bln	380.000	1.140.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat				8.220.000
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	- Amplop Sertifikat/Piagam	10	pak	62.000	620.000
	ATK Kegiatan Advokasi PUG				
	- Kertas HVS 80gr Kwarto/A4	20	rim/ki	85.000	1.700.000
	- Kertas NCR Folio	20	rim/ki	65.000	1.300.000
	- Amplop Surat	10	ktk/ki	60.000	600.000
	- Tinta Printer	12	btl/ki	100.000	1.200.000
	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024				
	- Seminar Kit Bimtek	100	bh/ki	28.000	2.800.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan				6.372.000
	Biaya Cetak Kegiatan				
	- Fotocopy Berkas	1482	lbr/ki	500	741.000
	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024				
	- Piagam Sertifikat	100	lbr/ki	35.310	3.531.000
	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024				
	- Cetak Spanduk Penilaian APE 2024	7	bh/ki	300.000	2.100.000
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				6.000.000
	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024				
	- Souvenir Tim Verlap APE 2024	12	bh/ki	500.000	6.000.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				18.000.000
	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024				
	- Makan minum Rapat Penilaian APE 2024 (Nasi Kotak 50 org x 5 Keg)	250	org/keg	48.000	12.000.000
	- Makan minum Rapat Penilaian APE 2024 (Snack 50 org x 5 Keg)	250	org/keg	24.000	6.000.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				20.200.000
	Advokasi PUG Bagi Dunia Usaha dan Industri :				5.200.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	Advokasi PUG Bagi Kecamatan & Kelurahan :				5.200.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (2 org x 1 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000

	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024 :				9.800.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 4 jam)	4	org/jam	900.000	3.600.000
	- Honorarium Narasumber Profesional Pusat (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.700.000	3.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				54.600.000
	Kegiatan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2024				54.600.000
	Tim Penilaian APE Tahun 2024 :				
	- Pengarah (1 org x 3 bln)	3	org/bln	750.000	2.250.000
	- Penanggungjawab (1 org x 3 bln)	3	org/bln	700.000	2.100.000
	- Ketua (1 org x 3 bln)	3	org/bln	650.000	1.950.000
	- Wakil Ketua (1 org x 3 bln)	3	org/bln	600.000	1.800.000
	- Sekretaris (1 org x 3 bln)	3	org/bln	500.000	1.500.000
	- Anggota (30 org x 3 bln)	90	org/bln	500.000	45.000.000
8	Honorarium Rohaniwan				1.200.000
	Advokasi PUG Bagi Dunia Usaha dan Industri :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	Advokasi PUG Bagi Kecamatan & Kelurahan :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024 :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
9	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				12.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM				12.000.000
	- Pelatihan TOTPUG/PPRG (1 org x 2 keg)	2	org/keg	6.000.000	12.000.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				43.588.000
	Konsultasi ke Kementerian PPPA				
	Akomodasi Konsultasi :				
	- Tarif Hotel (1 org x 2 hari)	2	org/hr	1.788.000	3.576.000
	- Tarif Hotel (3 org x 2 hari)	6	org/hr	730.000	4.380.000
	Transportasi Perjalanan Dinas :				
	- Biaya Tiket Pesawat (4 org x 1 kl)	4	org/kali	3.987.000	15.948.000
	- Biaya Taksi (3 org x 1 kl)	3	org/kali	256.000	768.000
	Uang Harian :				
	- Uang Harian (4 org x 3 hr)	12	org/hr	530.000	6.360.000
	Peningkatan Kapasitas SDM				
	Tot PUG/PPRG :				
	- Biaya Tiket Pesawat (2 org x 1 kl)	2	org/kali	4.908.000	9.816.000
	- Biaya Taksi (2 org x 2 kl)	4	org/kali	200.000	800.000
	- Uang Harian (2 org x 2 hr)	4	org/kali	370.000	1.480.000
	Transportasi Perjalanan Dinas :				
	- Transportasi Ibu Kota (1 org x 2 kl)	2	org/kali	230.000	460.000
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				93.600.000
	Advokasi PUG Bagi Dunia Usaha dan Industri :				23.400.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 keg)	100	org/keg	234.000	23.400.000
	Advokasi PUG Bagi Kecamatan & Kelurahan :				23.400.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 keg)	100	org/keg	234.000	23.400.000
	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024 :				46.800.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 2 keg)	200	org/keg	234.000	46.800.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					275.000.000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					275.000.000

Samarinda, Desember 2023
 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

 Ayu Muli, S.KM^h, M.Kes
 NIP. 19690804 1994 02 2002



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM,Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
	1. Amplop Sertifikat/Piagam	Pak	10	62.000,00	620.000,00
	2. Kertas NCR Folio	Rim	20	65.000,00	1.300.000,00
	3. Amplop Surat	Kotak	10	60.000,00	600.000,00
	4. Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	20	85.000,00	1.700.000,00
	5. Tinta Printer	Botol	12	100.000,00	1.200.000,00
	6. Seminar Kit Bimtek	Buah	100	28.000,00	2.800.000,00
				JUMLAH I	8.220.000,00
II	Belanja Bahan Cetak				
	1. Spanduk	Buah	6	500.000,00	3.000.000,00
	2. Piagam/Sertifikat	Lembar	50	22.500,00	1.125.000,00
	3. Fotocopy Berkas	Lembar	2758	300,00	827.400,00
				JUMLAH II	4.952.400,00
III	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	1. Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	340	48.000,00	16.320.000,00
	2. Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	340	24.000,00	8.160.000,00
				JUMLAH III	24.480.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	37.652.400,00
				PPN 10%	3.765.240,00
				Jumlah Biaya	41.417.640,00
				Dibulatkan	41.417.000,00
	Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023

Ditetapkan oleh :

PPTK
Awe Ulul, S.KM.,M.Kes
NIP. 19600804 1994 02 2002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahia Kompleks Balakota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan +6623-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Urusan	: 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Unit Organisasi	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Rincian Rencana Anggaran Belanja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.250.000
	- Honorarium PA (1 org x 3 bln)	2	org/bln	937.500	1.875.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 3 bln)	2	org/bln	907.500	1.815.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 3 bln)	2	org/bln	480.000	960.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	2	org/bln	420.000	840.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	2	org/bln	380.000	760.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat				6.315.800
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	- Spido Snowman Kecil	11	bh/kl	12.800	140.800
	- Amplop Cabinet	10	pak/kl	25.000	250.000
	- Kertas A4	15	rim/kl	85.000	1.275.000
	- Kertas NCR	10	rim/kl	65.000	650.000
	- Tinta Printer	12	bt/kl	100.000	1.200.000
	Bimtek PUG/PPRG Anggota POKJA 2024				
	- Seminar Kit Bimtek	100	bh/kl	28.000	2.800.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan				37.396.200
	- Penggandaan	454	lbr/kl	500	227.000
	- Informasi Gender/PUG Leaflet	2500	lbr/kl	4.000	10.000.000
	- Informasi Gender/PUG Buku Saku	600	pcs/kl	22.000	13.200.000
	- Cetak Spanduk Sosialisasi	5	bh/kl	300.000	1.500.000
	- Laporan Akhir	3	bik/kl	390.000	1.170.000
	- Piagam Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Gender	20	lbr/kl	35.310	706.200
	- Piagam Penghargaan Peserta	300	pcs/kl	35.310	10.593.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.300.000
	Seminar Gender Samarinda 2024 :				5.900.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Moderator Seminar Gender (1 org x 1 keg)	1	org/keg	700.000	700.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru Mi/Mts/Ma dan Pesantren :				5.200.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (2 org x 1 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru SD/SMP/SMA/SMK :				5.200.000
	- Honorarium Pembawa Acara (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi (1 org x 2 jam)	2	org/jam	1.200.000	2.400.000
5	Honorarium Rohaniwan				1.200.000
	Seminar Gender Samarinda 2024 :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru Mi/Mts/Ma dan Pesantren :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru SD/SMP/SMA/SMK :				400.000
	- Honorarium Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1	org/keg	400.000	400.000

6	Belanja Jasa Tenaga Ahli				5.000.000
	- Juri Penilai Lomba (5 org x 1 keg)	5	org/keg	1.000.000	5.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.338.000
	Perjalanan Dinas ke Surabaya dalam Rangka Studi Tiru Implementasi PUG sebagai Mentor :				
	- Tarif Hotel (2 org x 2 hari)	4	org/hr	664.000	2.656.000
	- Biaya Tiket Pesawat (2 org x 1 kl)	2	org/kali	5.113.000	10.226.000
	- Biaya Taksi (1 org x 2 kl)	2	org/kali	550.000	1.100.000
	- Uang Harian (2 org x 3 hr)	6	org/hr	410.000	2.580.000
	- Transportasi Ibu Kota (2 org x 2 kl)	4	org/kali	194.000	776.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				70.200.000
	Seminar Gender Samarinda 2024 :				23.400.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 keg)	100	org/keg	234.000	23.400.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru Mi/Mts/Ma dan				23.400.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 keg)	100	org/keg	234.000	23.400.000
	Sosialisasi PUG bagi Guru SD/SMP/SMA/SMK :				23.400.000
	- Biaya Pertemuan/Rapat (100 org x 1 keg)	100	org/keg	234.000	23.400.000
9	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan				15.000.000
	- Hadiah Pemenang Lomba (1 paket x 1 keg)	1	paket/keg	15.000.000	15.000.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					175.000.000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					175.000.000

Samarinda, Desember 2023

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan


Awe Ulia, S.KM., M.Kes
NIP. 19690804 1994 02 2002



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
	1. Seminar Kit Peserta	Buah	100	28.000,00	2.800.000,00
	2. Spidol Snowman Kecil	Buah	11	12.800,00	140.800,00
	3. Amplop Kabinet	Pak	10	25.000,00	250.000,00
	4. Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rlm	15	85.000,00	1.275.000,00
	5. Kertas NCR Folio	Rlm	10	65.000,00	650.000,00
	6. Tinta Printer	Botol	12	100.000,00	1.200.000,00
				JUMLAH I	6.315.800,00
II	Belanja Bahan Cetak				
	1. Plagam Penghargaan Peserta	lembar	320	22.500,00	7.200.000,00
	2. Booklet/Buku Saku	Pcs	600	21.800,00	13.080.000,00
	3. Leaflet	Lembar	2500	4.000,00	10.000.000,00
	4. Spanduk Sosialisasi	Buah	5	300.000,00	1.500.000,00
	5. Laporan Akhir	Buku	3	390.000,00	1.170.000,00
	6. Penggandaan	Lembar	756	300,00	226.800,00
				JUMLAH II	33.176.800,00
III	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
	1. Paket Meeting halfday Seminar Gender Bidang Pendidikan	org/hr	300	234.000,00	70.200.000,00
				JUMLAH III	70.200.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	109.692.600,00
				PPN 10%	10.969.260,00
				Jumlah Biaya	120.661.860,00
				Dibulatkan	120.661.000,00
	Terbilang : Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023

Ditetapkan oleh :





2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

- Masukan (input) : Dana yang dibutuhkan
- Keluaran (output) : Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan yang mendapat Peningkatan Kapasitas
- Outcome : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
- b. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- c. Peraturan Menteri PP & PA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan
- d. Perda Gubernur Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah ;
- e. Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- f. Perwali No. 110 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung nomor 1 yakni Mewujudkan warga Kota yang Religius Unggul dan Berbudaya.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni Program Smart City Plus.

A. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

1. APBD Kota Samarinda Rp 224.199.800,-

B. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

C. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan **rincian RKA terlampir**.

D. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 28 Desember 2023

PENGUNA ANGGARAN



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd

NIP. 19670713 199103 1 013

Catatan:

1. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
2. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
3. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
4. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
5. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



- d. Perda Gubernur Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah ;
 - e. Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Perwali No. 110 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2. Visi Pemerintah Kota Samarinda
Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban
3. Misi Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung nomor 1 yakni Mewujudkan warga Kota yang Religius Unggul dan Berbudaya.
4. Program Prioritas Walikota Samarinda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni Program Smart City Plus.

A. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- 1. APBD Kota Samarinda Rp .300.000.000,-

B. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

C. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan **rincian RKA terlampir**.

D. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 28 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013

Catatan:

1. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
2. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
3. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
4. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
5. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



- d. Perda Gubernur Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah ;
- e. Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- f. Perwali No. 110 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung nomor 1 yakni Mewujudkan warga Kota yang Religius Unggul dan Berbudaya.

- 4. Program Prioritas Walikota Samarinda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni Program Smart City Plus.

A. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- 1. APBD Kota Samarinda Rp .450.000.000,-

B. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

C. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan **rincian RKA terlampir**.

D. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 20 September 2024

PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Ibnu Arabi, MM.Pd

NIP. 19670713 199103 1 013

Catatan:

1. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
2. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
3. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
4. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
5. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Komplek Belsikot No. 1 Kelurahan Eugia Kecamatan Samarinda Kota
 Tel/Fax (0541) 743307, Telpin Dendungan +6323-2442-1313
 Laman Intip: //dp2pa.samarindakota.go.id Email: dp2pa@samarindakota.go.id
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB) TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				13,170,000
	-Honorarium PA (1 org x 3 bh)	3	org/bh	1,450,000	4,350,000
	-Honorarium PPTK (1 org x 3 bh)	3	org/bh	1,410,000	4,230,000
	-Honorarium PPK SKPD (1 org x 3 bh)	3	org/bh	570,000	1,710,000
	-Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bh)	3	org/bh	500,000	1,500,000
	-Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bh)	3	org/bh	460,000	1,380,000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1,530,000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	-Honorarium PPBJ	3	org/bh	510,000	1,530,000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat				10,364,500
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	-Kertas NCR Folio	25	rm	65,000	1,625,000
	-BallPointFaster	5	usin	30,900	154,500
	-BallPointFaster	5	usin	30,900	154,500
	-Binder Clip No. 111	5	usin	51,000	255,000
	-Inter X Pring File Folio	1	bush	9,000	9,000
	-Kertas HVS 80 Gram Kwarto A4	25	rm	85,000	2,125,000
	-Materai	20	bush	10,000	200,000
	-StaplerHD 10	10	bush	16,150	161,500
	-Tinta Printer	25	botol	100,000	2,500,000
	-Amplop Surat	1	kotak	60,000	60,000
	-Kertas HVS 80 Gram Folio /F4	2	rm	95,000	190,000
	-Kertas HVS 80 Gram Kwarto A4	2	rm	85,000	170,000
	-Map Bida	100	lm bar	3,000	300,000
	-Pupen Pibt	1	usin	60,000	60,000
	-Tinta Printer	5	botol	100,000	500,000
	-Kertas HVS 80 Gram Folio /F4	20	rm	95,000	1,900,000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				6,584,500
	-Cetak buku /brosur	3	buku	250,000	750,000
	-Cetak spanduk 4m x 1,5m	2	bush	500,000	1,000,000
	-Cetak spanduk 4m x 1m	2	bush	300,000	600,000
	-Cetak spanduk 3m x 8m	2	bush	1,200,000	2,400,000
	-Cetak spanduk 4m x 1m	2	bush	150,000	300,000
	-Cetak spanduk 4m x 1,5m	1	bush	500,000	500,000
	-Pengandaan	2069	lm bar	500	1,034,500

5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				72,000,000
	<i>Khataman Al Quran</i>				
	-Nasi Kotak (120 org)	120	org/kes	48.000	5.760.000
	-Snack (120 org)	120	org/kes	24.000	2.880.000
	Pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan				
	-Nasi Kotak (100 kkk x 12 bulan)	1200	org/kes	48.000	57.600.000
	(FGD) Peningkatan peran forum puspa bungah gerecek kota sam arinda				
	-Nasi Kotak (80 org)	80	org/kes	48.000	3.840.000
	-Snack (80 org)	80	org/kes	24.000	1.920.000

6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				7,700,000
	-Honorarium Moderator	3	org/keg	700,000	2,100,000
	-Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	4	org/jam	900,000	3,600,000
	-Honorarium Pembawa Acara	5	org/keg	400,000	2,000,000
7	Honorarium Rohanawan				2,000,000
	-Honorarium Pembaca Doa	5	org/hr	400,000	2,000,000
8	Belanja tenaga ahli				3,000,000
	-Honorarium tenaga ahli/pengertian	1	org/hr	3,000,000	3,000,000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27,211,000
	Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam Rangka Studi Tiru Implementasi PEKKA				
	-Tarif Hotel (2 org x 3 hari)	6	org/hr	845,000	5,070,000
	-Biaya Tiket Pesawat (3 org x 1 kl)	3	org/kl	4,987,000	14,961,000
	-Transportasi ibu kota ke Yogyakarta (kendaraan x 2 org x 2 hr)	8	org/kl	350,000	2,800,000
	-Biaya taksibandara (2 org)	2	org/hr	300,000	600,000
	-Uang harian di kota (3 org x 3 hr)	9	org/kl	420,000	3,780,000
10	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				136,890,000
	-Paket Meeting Dalam Kota Seminar/peran perempuan bidang politik, hukum, dan sosial	200	org/hr	234,000	46,800,000
	-Paket Meeting Dalam Kota Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	170	org/hr	234,000	39,780,000
	-Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan	215	org/hr	234,000	50,310,000
11	Belanja modal personal komputer				19,550,000
	Laptop	1	unit	19,550,000	19,550,000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					300,000,000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					300,000,000

Sam arinda, Desember 2023
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Awa Uhi SKM.M.Kes
N.P. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Komplek Balaikota No. 1 Kelurahan Eugia Kecamatan Samarinda Kota
 Tel/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan : 6323-2442-1313
 Laman Web : <http://dp2pa.samarindakota.go.id> E-mail : dp2pa@samarindakota.go.id
SAMARINDA 75121

Unsur Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume 3	Satuan 4	Tarif/Harga 5	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengebik Keuangan				5,020,000
	-Honorarium PA (1 org x 2 bh)	2	org/bh	625,000	1,250,000
	-Honorarium PPTK (1 org x 2 bh)	2	org/bh	605,000	1,210,000
	-Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bh)	2	org/bh	480,000	960,000
	-Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bh)	2	org/bh	420,000	840,000
	-Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bh)	2	org/bh	380,000	760,000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680,000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	-Honorarium PPEJ	2	org/bh	340,000	680,000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat				2,233,000
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	-Amplop Surat	5	kotak	60,000	300,000
	-Amplop Cabinet/coklat/busa	5	pak	20,000	100,000
	-Gunting Besar	1	bush	37,500	37,500
	-Kertas HVS 80 gr A4	6	rm	85,000	510,000
	-Map Busa/Map Jaso	200	lem bar	500	100,000
	-Map dumbek plastik terang	50	bush	7,000	350,000
	-Penggaris Muka 1 m	1	bush	35,950	35,950
	-stap karet swadler	8	pcs	3,500	28,000
	-Stap Map Folio Batik Kertas	20	pcs	2,175	43,500
	-Map bisk	100	lem bar	3,000	300,000
	-Pensil HB	1	bush	5,750	5,750
	-Pen Pikt Snowman Bp. 7 hitam	1	bush	2,300	2,300
	-Tipe Ex. Jumbo	1	bush	20,000	20,000
	-Map batik tipis kertas	50	bush	8,000	400,000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				67,000
	-Pengandaan	134	brkl	500	67,000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				46,800,000
	Pembinaan Desa Prima dalam Peningkatan Manajemen Usaha di Kecamatan				
	-Nasi Kotak (150 org x 3 kb)	450	org/kes	48,000	21,600,000
	-Snack (150 org x 3 kb)	450	org/kes	24,000	10,800,000
	Pengembangan Soft Skill UMKM Perempuan di Kota Samarinda				
	-Nasi Kotak (50 org x 4 kb)	200	org/kes	48,000	9,600,000
	-Snack (50 org x 4 kb)	200	org/kes	24,000	4,800,000
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam				70,200,000

-Paket Meeting Dalam Kota Peringatan Hari Ibu dengan Peran dan Karya Nyata untuk Bangsa	300	org/hr	234,000	70,200,000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				125,000,000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				125,000,000

Samarinda, Desember 2023
Kepala Bidang Kuantitas Hidup Perempuan

Awa Uli SKM.M.Kes
NP.196908041994022002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(DP2PA)

Jalan Dahlia Komplek Balai Kota No. 1 Kelurahan Eugia Kecamatan Samarinda Kota
 Tel/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan +6329-2442-1313
 Laman Web: <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Email: dp2pa@samarakota.go.id
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BAYA (RAB) TAHUN 2024

Usuan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rincian Rencana Anggaran Belanja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pembekal Keuangan				5,820,000
	-Honorarium PA (1 org x 2 bh)	2	org/bh	625,000	1,250,000
	-Honorarium PPTK (1 org x 2 bh)	2	org/bh	605,000	1,210,000
	-Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bh)	2	org/bh	480,000	960,000
	-Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bh)	2	org/bh	420,000	840,000
	-Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bh)	2	org/bh	380,000	760,000
	-Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bh)	2	org/bh	400,000	800,000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				680,000
	-Honorarium PPBJ	2	org/bh	340,000	680,000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/Kegiatan				8,716,800
	-Kertas NCR	25	rm/k1	65,000	1,625,000
	-Seminar K&T	80	bh/k1	75,000	6,000,000
	-Cutter L-500 bagus	6	bh/k1	22,000	132,000
	-Isi NT-Cutter L-500	5	Kotak	8,000	40,000
	-Map Bina Map Jago	200	lembar	500	100,000
	-Map Bina	200	lembar	3,000	600,000
	-Pen Pict Snowman Bp. 7 hitam	1	buah	2,300	2,300
	-Stap Map Foto Bata Kertas	100	Pcs	2,175	217,500
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				5,133,000
	-Cetak Laporan	3	buku	250,000	750,000
	-Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Baya Pasang)	1	buah	1,200,000	1,200,000
	-Cetak Spanduk vinyl ukuran 4 m x 1 m	3	buah	300,000	900,000
	-Cetak Spanduk bahan vinyl ukuran 4 m x 1,5 m	3	buah	500,000	1,500,000
	-Penggandaan	1566	brk1	500	783,000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3,600,000
	-Nasi Kotak	50	org/keg	48,000	2,400,000
	-Snack	50	org/keg	24,000	1,200,000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9,300,000
	-Honorarium Moderator	2	Org/keg	700,000	1,400,000
	-Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	7	org/jam	900,000	6,300,000
	-Honorarium Pembawa Acara	1	org/keg	400,000	1,600,000
7	Honorarium Rohanawan				1,600,000
	-Honorarium Pembaca Doa	4	org/hr	400,000	1,600,000
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				64,350,000
	-Paket Meeting Dalam Kota Bimtek UMKM PEKKA	75	org/hr	334,000	17,550,000

-PaketMeeting Dalam Kota Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan eselon III di Kota Samarinda	50	org/hr	234,000	11,700,000
-PaketMeeting Dalam Kota SeminarPeningkatan Peran Perempuan Rangka Persatuan Hari Kartini	150	org/hr	234,000	35,100,000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				99,199,800
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				99,199,800

Samarinda, Desember 2023
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Awe Uli SKM, M.Kes
N P. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : 2.08.02.2.03 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Rincian Rencana Anggaran Belanja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				13.170.000
	- Honorarium PA (1 org x 3 bln)	3	org/bln	1.450.000	4.350.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 3 bln)	3	org/bln	1.410.000	4.230.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 3 bln)	3	org/bln	570.000	1.710.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	3	org/bln	500.000	1.500.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 3 bln)	3	org/bln	460.000	1.380.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.530.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	- Honorarium PPBJ	3	org/bln	510.000	1.530.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat				10.364.500
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	- Kertas NCR Folio	25	rim	65.000	1.625.000
	- Ball Point Faster	5	lusin	30.900	154.500
	- Ball Point Faster	5	lusin	30.900	154.500
	- Binder Clip No. 111	5	lusin	51.000	255.000
	- Inter -X Pring File Fc Blue	1	buah	9.000	9.000
	- Kertas HVS 80 Gram Kwarto /A4	25	rim	85.000	2.125.000
	- Materai	20	buah	10.000	200.000
	- Stapler HD 10	10	buah	16.150	161.500
	- Tinta Printer	25	botol	100.000	2.500.000
	- Amplop Surat	1	kotak	60.000	60.000
	- Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	2	rim	95.000	190.000
	- Kertas HVS 80 Gram Kwarto /A4	2	rim	85.000	170.000
	- Map Biola	100	lembar	3.000	300.000
	- Pulpen Pilot	1	lusin	60.000	60.000
	- Tinta Printer	5	botol	100.000	500.000
	- Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	20	rim	95.000	1.900.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				6.584.500
	- Cetak buku / laporan	3	buku	250.000	750.000
	- Cetak spanduk 4m x 1,5m	2	buah	500.000	1.000.000
	- Cetak spanduk 4m x 1m	2	buah	300.000	600.000
	- Cetak spanduk 3m x 8m	2	buah	1.200.000	2.400.000
	- Cetak spanduk 4m x 1m	2	buah	150.000	300.000
	- Cetak spanduk 4m x 1,5m	1	buah	500.000	500.000
	- Penggandaan	2069	lembar	500	1.034.500
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				72.000.000
	Khataman Al-Quran				
	- Nasi Kotak (120 org)	120	org/keg	48.000	5.760.000
	- Snack (120 org)	120	org/keg	24.000	2.880.000
	Pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan				
	- Nasi Kotak (100 ktk x 12 bulan)	1200	org/keg	48.000	57.600.000
	(FGD) Peningkatan peran forum puspa bungah gerecek kota samarinda				
	- Nasi Kotak (80 org)	80	org/keg	48.000	3.840.000
	- Snack (80 org)	80	org/keg	24.000	1.920.000

6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				7.700.000
	- Honorarium Moderator	3	Org/keg	700.000	2.100.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	4	org/jam	900.000	3.600.000
	- Honorarium Pembawa Acara	5	org/keg	400.000	2.000.000
7	Honorarium Rohaniwan				2.000.000
	- Honorarium Pembaca Doa	5	org/hr	400.000	2.000.000
8	Belanja tenaga ahli				3.000.000
	- Honorarium tenaga ahli penelitian	1	org/hr	3.000.000	3.000.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27.211.000
	Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dalam Rangka Studi Tiru Implementasi PEKKA				
	- Tarif Hotel (2 org x 3 hari)	6	org/hr	845.000	5.070.000
	- Biaya Tiket Pesawat (3 org x 1 kd)	3	org/kali	4.987.000	14.961.000
	- Transportasi ibu kota ke yogyakarta (2 kendaraan x 2 org x 2 hr)	8	org/kali	350.000	2.800.000
	- Biaya taksi bandara (2 org)	2	org/hr	300.000	600.000
	- Uang harian luar kota (3 org x 3 hr)	9	org/kali	420.000	3.780.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam				136.890.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Seminar peran perempuan bidang politik, hukum, dan sosial	200	org/hr	234.000	46.800.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	170	org/hr	234.000	39.780.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan	215	org/hr	234.000	50.310.000
11	Belanja modal personal komputer				19.550.000
	Laptop	1	unit	19.550.000	19.550.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					300.000.000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					300.000.000

Samarinda, Desember 2023
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Awe Ului, SKM,M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +6623-2442-1313
Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rincian Rencana Anggaran Belanja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5.020.000
	- Honorarium PA (1 org x 2 bln)	2	org/bln	625.000	1.250.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 2 bln)	2	org/bln	605.000	1.210.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bln)	2	org/bln	480.000	960.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	420.000	840.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	380.000	760.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	- Honorarium PPBJ	2	org/bln	340.000	680.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat				2.233.000
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	- Amplop Surat	5	kotak	60.000	300.000
	- Amplop Cabinet coklat biasa	5	pak	20.000	100.000
	- Gunting Besar	1	buah	37.500	37.500
	- Kertas HVS 80 gr A4	6	rim	85.000	510.000
	- Map Biasa/Map Jago	200	lembar	500	100.000
	- Map durable plastik terang	50	buah	7.000	350.000
	- Penggaris Mica 1 m	1	buah	35.950	35.950
	- stp karet steadler	8	pcs	3.500	28.000
	- Stop Map Folio Batik Kertas	20	pcs	2.175	43.500
	- Map biola	100	lembar	3.000	300.000
	- Pensil HB	1	buah	5.750	5.750
	- Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	1	buah	2.300	2.300
	- Tip Ex. Jumbo	1	buah	20.000	20.000
	- Map batik tipis kertas	50	buah	8.000	400.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				67.000
	- Penggandaan	134	lbr/kl	500	67.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				46.800.000
	Pembinaan Desa Prima dalam Peningkatan Manajemen Usaha di Kecamatan				
	- Nasi Kotak (150 org x 3 kali)	450	org/keg	48.000	21.600.000
	- Snack (150 org x 3 kali)	450	org/keg	24.000	10.800.000
	Pengembangan Soft Skill UMKM Perempuan di Kota Samarinda				
	- Nasi Kotak (50 org x 4 kali)	200	org/keg	48.000	9.600.000
	- Snack (50 org x 4 kali)	200	org/keg	24.000	4.800.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam				70.200.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Peringatan Hari Ibu dengan Peran dan Karya Nyata untuk Bangsa	300	org/hr	234.000	70.200.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					125.000.000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					125.000.000

Samarinda, Desember 2023
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Awe Ului, SKM,M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Dalaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5.820.000
	- Honorarium PA (1 org x 2 bln)	2	org/bln	625.000	1.250.000
	- Honorarium PPTK (1 org x 2 bln)	2	org/bln	605.000	1.210.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bln)	2	org/bln	480.000	960.000
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	420.000	840.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln)	2	org/bln	380.000	760.000
	- Honorarium PPK SKPD (1 org x 2 bln)	2	org/bln	400.000	800.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	- Honorarium PPBJ	2	org/bln	340.000	680.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat				8.716.800
	Alat Tulis Kantor Kegiatan				
	- Kertas NCR	25	rim/kl	65.000	1.625.000
	- Seminar Kit	80	bh/kl	75.000	6.000.000
	- Cutter L-500 bagus	6	bh/kl	22.000	132.000
	- Isi NT-Cutter L-500	5	Kotak	8.000	40.000
	- Map Biasa/Map Jago	200	lembar	500	100.000
	- Map Biola	200	lembar	3.000	600.000
	- Pen Pilot Snowman Bp.7 hitam	1	buah	2.300	2.300
	- Stop Map Folio Batik Kertas	100	Pcs	2.175	217.500
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				5.133.000
	- Cetak Laporan	3	buku	250.000	750.000
	- Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1	buah	1.200.000	1.200.000
	- Cetak Spanduk vinly ukuran 4 m x 1 m	3	buah	300.000	900.000
	- Cetak Spanduk bahan vinly ukuran 4 m x 1,5 m	3	buah	500.000	1.500.000
	- Penggandaan	1566	lbr/kl	500	783.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.600.000
	- Nasi Kotak	50	org/keg	48.000	2.400.000
	- Snack	50	org/keg	24.000	1.200.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.300.000
	- Honorarium Moderator	2	Org/keg	700.000	1.400.000
	- Honorarium Narasumber/Fasilitator Kota (1 org x 2 jam)	7	org/jam	900.000	6.300.000
	- Honorarium Pembawa Acara	4	org/keg	400.000	1.600.000
7	Honorarium Rohaniwan				1.600.000
	- Honorarium Pembaca Doa	4	org/hr	400.000	1.600.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam				64.350.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Bimtek UMKM PEKKA	75	org/hr	234.000	17.550.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan eselon III di Kota Samarinda	50	org/hr	234.000	11.700.000
	- Paket Meeting Dalam Kota Seminar Peningkatan Peran Perempuan Rangka Peringatan Hari Kartini	150	org/hr	234.000	35.100.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					99.199.800
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					99.199.800

Samarinda, Desember 2023

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Awe Ului, SKM,M.Kes

NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	Amplop Surat	Kotak	5	60.000,00	300.000,00
2.	Amplop Kabinet Coklat Biasa	Pak	5	20.000,00	100.000,00
3.	Gunting Besar Biasa	Buah	1	37.500,00	37.500,00
4.	Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	6	85.000,00	510.000,00
5.	Map Biasa/ Jago	Lembar	200	500,00	100.000,00
6.	Map Durabel Plastik Terang	Buah	50	7.000,00	350.000,00
7.	Penggaris Mika 1 Meter	Buah	1	35.950,00	35.950,00
8.	Stip karet steadler 526 B40	Pcs	8	3.500,00	28.000,00
9.	Map polio batikkertas	Pcs	20	2.175,00	43.500,00
10.	Map biola	Lembar	100	3.000,00	300.000,00
11.	Pensil 2 HB	Buah	1	5.750,00	5.750,00
12.	Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	Buah	1	2.300,00	2.300,00
13.	Tip ex jumbo	Buah	1	20.000,00	20.000,00
14.	Map batik tipis kertas	Buah	50	8.000,00	400.000,00
				JUMLAH I	2.233.000,00
II	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	200	48.000,00	9.600.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	200	24.000,00	4.800.000,00
3.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	450	47.500,00	21.375.000,00
4.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	450	23.500,00	10.575.000,00
				JUMLAH II	46.350.000,00
III	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
1.	Paket Meeting halfday Peringatan hari ibu	org/hr	300	234.000,00	70.200.000,00
				JUMLAH III	70.200.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	118.783.000,00
				PPN 10%	11.878.300,00
				Jumlah Biaya	130.661.300,00
				Dibulatkan	130.661.000,00
	Terbilang : Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Awe Ului, SKM.M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bahan Cetak				-
	1. Kertas NCR Folio	Rim	25	65.000,00	1.625.000,00
	2. Seminar kit	Buah	80	75.000,00	6.000.000,00
	3. Cutter L-500 bagus	Buah	6	22.000,00	132.000,00
	4. Isi Cutter L-500 bagus	Kotak	5	8.000,00	40.000,00
	5. Map biasa / jago	Lembar	200	500,00	100.000,00
	6. Map biola	Lembar	200	2.500,00	500.000,00
	7. Pulpen pilot snowman Bp. 7 hitam	Buah	1	2.300,00	2.300,00
	8. Stop map polio batik kertas	Pos	100	2.175,00	217.500,00
				JUMLAH II	8.616.800,00
II	Belanja Bahan Cetak				-
	1. Cetak Buku LAPoran	Buku	3	250.000,00	750.000,00
	2. Cetak Spanduk	Buah	1	1.200.000,00	1.200.000,00
	3. Cetak Spanduk	Buah	3	300.000,00	900.000,00
	4. Cetak Spanduk	Buah	3	500.000,00	1.500.000,00
	5. Penggandaan	Lembar	1566	300,00	469.800,00
				JUMLAH II	4.819.800,00
III	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	1. Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	50	48.000,00	2.400.000,00
	2. Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	50	24.000,00	1.200.000,00
				JUMLAH III	3.600.000,00
IV	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
	1. Paket Meeting halfday Bimtek UMKM PEKKA	org/hr	75	210.000,00	15.750.000,00
	2. Paket Meeting halfday Peningkatan kapasitas kepemimpinan Esselon III Samarinda	org/hr	50	234.000,00	11.700.000,00
	3. Paket Meeting halfday Seminar Peningkatan peran perempuan peringatan Hari Kartini	org/hr	150	234.000,00	35.100.000,00
				JUMLAH III	62.550.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	74.766.800,00
				PPN 10%	7.476.680,00
				Jumlah Biaya	82.243.480,00
				Dibulatkan	82.243.000,00
	Terbilang : Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Awe Ului, SKM.M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
Sub. Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I Belanja Alat Tulis Kantor					
1.	Kertas NCR Folio	Rim	25	65.000,00	1.625.000,00
2.	Ball Point Pilot Faster	Buah	10	30.900,00	309.000,00
4.	Binder Clips No. 111	Lusin	5	51.000,00	255.000,00
5.	Inter X Spring File Fc Blue	Buah	1	9.000,00	9.000,00
6.	Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	25	85.000,00	2.125.000,00
7.	Materai	Buah	20	10.000,00	200.000,00
8.	Stapler HD 10	Buah	10	16.150,00	161.500,00
9.	Tinta printer	Botol	25	100.000,00	2.500.000,00
10.	Amplop surat	Kotak	1	60.000,00	60.000,00
11.	Map biola	Lembar	100	3.000,00	300.000,00
12.	Pulpen pilot	Lusin	1	60.000,00	60.000,00
13.	Tinta printer	Botol	5	100.000,00	500.000,00
14.	Kertas HVS 80 gr Folio/F4	Rim	20	95.000,00	1.900.000,00
				JUMLAH I	10.004.500,00
II Belanja Bahan Cetak					
1.	Cetak buku laporan	Buku	3	250.000,00	750.000,00
2.	Cetak spanduk	Buah	3	500.000,00	1.500.000,00
3.	Cetak spanduk	Buah	2	300.000,00	600.000,00
4.	Cetak spanduk	Buah	2	1.200.000,00	2.400.000,00
5.	Penggandaan	Lembar	2069	300,00	620.700,00
6.	Belanja modal scanner epson DS-530 II	Unit	1	12.400.000,00	12.400.000,00
7.	Belanja modal Asus vivabook S14 Flip Oled	Unit	1	19.500.000,00	19.500.000,00
				JUMLAH II	37.770.700,00
II Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) khatam Al- Qur-an	Kotak	120	47.000,00	5.640.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	120	23.000,00	2.760.000,00
3.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) FGD	Kotak	80	48.000,00	3.840.000,00
4.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	80	24.000,00	1.920.000,00
5.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan	Kotak	1200	47.500,00	57.000.000,00
				JUMLAH II	71.160.000,00
III Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota					
1.	Paket Meeting halfday Seminar peran perempuan bidang politik, hukum dan sosial	org/hr	200	234.000,00	46.800.000,00
2.	Paket Meeting halfday Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	org/hr	170	234.000,00	39.780.000,00
3.	Paket Meeting halfday Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan	org/hr	215	230.000,00	49.450.000,00
				JUMLAH III	116.935.200,00
Jumlah Total (I+II+III)					237.870.400,00
PPN 10%					23.787.040,00
Jumlah Biaya					261.657.440,00
Dibulatkan					261.657.000,00
Terbilang :					

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Awe Ului, SKM,M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Rugis Kecamatan Samarinda Kota
 Tel/Fax (0541) 743307, Telpen Pengaduan +6823-2442-1313
 Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
 PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
 Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
 Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 Sumber Dana : PAD
 Lokasi : Kota Samarinda
 Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	Amplop Sertifikat/Piagam	Pak	10	62.000,00	620.000,00
2.	Kertas NCR Folio	Rim	20	65.000,00	1.300.000,00
3.	Amplop Surat	Kotak	10	60.000,00	600.000,00
4.	Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	20	85.000,00	1.700.000,00
5.	Tinta Printer	Botol	12	100.000,00	1.200.000,00
6.	Seminar Kit Bimtek	Buah	100	28.000,00	2.800.000,00
				JUMLAH I	8.220.000,00
II	Belanja Bahan Cetak				-
1.	Spanduk	Buah	6	500.000,00	3.000.000,00
2.	Piagam/Sertifikat	Lembar	50	22.500,00	1.125.000,00
3.	Fotocopy Berkas	Lembar	2758	300,00	827.400,00
				JUMLAH II	4.952.400,00
III	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	340	48.000,00	16.320.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	340	24.000,00	8.160.000,00
				JUMLAH III	24.480.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	37.652.400,00
				PPN 10%	3.765.240,00
				Jumlah Biaya	41.417.640,00
				Dibulatkan	41.417.000,00
	Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023
 Ditetapkan oleh :
 PPTK

Syarifuddin Nur, SE.,MM
 NIP. 19741105 200112 1 009



Pengguna Anggaran/PA (KPA)	: DR. Ibnu Arsby MM.Pd
PPTK	: Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program	: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Dana	: PAD
Lokasi	: Kota Samarinda
Tahun Anggaran	: 2024

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Page 1 of 1



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bahan Cetak				-
	1. Kertas NCR Folio	Rim	25	65.000,00	1.625.000,00
	2. Seminar kit	Buah	80	75.000,00	6.000.000,00
	3. Cutter L-500 bagus	Buah	6	22.000,00	132.000,00
	4. Isi Cutter L-500 bagus	Kotak	5	8.000,00	40.000,00
	5. Map biasa / jago	Lembar	200	500,00	100.000,00
	6. Map biola	Lembar	200	2.500,00	500.000,00
	7. Pulpen pilot snowman Bp. 7 hitam	Buah	1	2.300,00	2.300,00
	8. Stop map polio batik kertas	Pos	100	2.175,00	217.500,00
				JUMLAH II	8.616.800,00
II	Belanja Bahan Cetak				-
	1. Cetak Buku LAPoran	Buku	3	250.000,00	750.000,00
	2. Cetak Spanduk	Buah	1	1.200.000,00	1.200.000,00
	3. Cetak Spanduk	Buah	3	300.000,00	900.000,00
	4. Cetak Spanduk	Buah	3	500.000,00	1.500.000,00
	5. Penggandaan	Lembar	1566	300,00	469.800,00
				JUMLAH II	4.819.800,00
III	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	1. Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	50	48.000,00	2.400.000,00
	2. Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	50	24.000,00	1.200.000,00
				JUMLAH III	3.600.000,00
IV	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
	1. Paket Meeting halfday Bimtek UMKM PEKKA	org/hr	75	210.000,00	15.750.000,00
	2. Paket Meeting halfday Peningkatan kapasitas kepemimpinan Esselon III Samarinda	org/hr	50	234.000,00	11.700.000,00
	3. Paket Meeting halfday Seminar Peningkatan peran perempuan peringatan Hari Kartini	org/hr	150	234.000,00	35.100.000,00
				JUMLAH III	62.550.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	74.766.800,00
				PPN 10%	7.476.680,00
				Jumlah Biaya	82.243.480,00
				Dibulatkan	82.243.000,00
	Terbilang : Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Awe Ului, SKM.M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
Sub. Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	Kertas NCR Folio	Rim	25	65.000,00	1.625.000,00
2.	Ball Point Pilot Faster	Buah	10	30.900,00	309.000,00
4.	Binder Clips No. 111	Lusin	5	51.000,00	255.000,00
5.	Inter X Spring File Fc Blue	Buah	1	9.000,00	9.000,00
6.	Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	25	85.000,00	2.125.000,00
7.	Materai	Buah	20	10.000,00	200.000,00
8.	Stapler HD 10	Buah	10	16.150,00	161.500,00
9.	Tinta printer	Botol	25	100.000,00	2.500.000,00
10.	Amplop surat	Kotak	1	60.000,00	60.000,00
11.	Map biola	Lembar	100	3.000,00	300.000,00
12.	Pulpen pilot	Lusin	1	60.000,00	60.000,00
13.	Tinta printer	Botol	5	100.000,00	500.000,00
14.	Kertas HVS 80 gr Folio/F4	Rim	20	95.000,00	1.900.000,00
				JUMLAH I	10.004.500,00
II	Belanja Bahan Cetak				
1.	Cetak buku laporan	Buku	3	250.000,00	750.000,00
2.	Cetak spanduk	Buah	3	500.000,00	1.500.000,00
3.	Cetak spanduk	Buah	2	300.000,00	600.000,00
4.	Cetak spanduk	Buah	2	1.200.000,00	2.400.000,00
5.	Penggandaan	Lembar	2069	300,00	620.700,00
6.	Belanja modal scanner epson DS-530 II	Unit	1	12.400.000,00	12.400.000,00
7.	Belanja modal Asus vivabook S14 Flip Oled	Unit	1	19.500.000,00	19.500.000,00
				JUMLAH II	37.770.700,00
II	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) khatam Al- Qur-an	Kotak	120	47.000,00	5.640.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	120	23.000,00	2.760.000,00
3.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) FGD	Kotak	80	48.000,00	3.840.000,00
4.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	80	24.000,00	1.920.000,00
5.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) pertemuan rutin peningkatan kapasitas perempuan	Kotak	1200	47.500,00	57.000.000,00
				JUMLAH II	71.160.000,00
III	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
1.	Paket Meeting halfday Seminar peran perempuan bidang politik, hukum dan sosial	org/hr	200	234.000,00	46.800.000,00
2.	Paket Meeting halfday Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	org/hr	170	234.000,00	39.780.000,00
3.	Paket Meeting halfday Peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan	org/hr	215	230.000,00	49.450.000,00
				JUMLAH III	116.935.200,00
				Jumlah Total (I+II+III)	237.870.400,00
				PPN 10%	23.787.040,00
				Jumlah Biaya	261.657.440,00
				Dibulatkan	261.657.000,00
	Terbilang :				

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Awe Ului, SKM,M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1 Kelurahan Rugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel/Fax (0541) 743307, Telpen Pengaduan +6823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> Pos-el: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA 75121

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby MM.Pd
PPTK : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Sumber Dana : PAD
Lokasi : Kota Samarinda
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	Amplop Sertifikat/Piagam	Pak	10	62.000,00	620.000,00
2.	Kertas NCR Folio	Rim	20	65.000,00	1.300.000,00
3.	Amplop Surat	Kotak	10	60.000,00	600.000,00
4.	Kertas HVS 80 gr Kwarto/A4	Rim	20	85.000,00	1.700.000,00
5.	Tinta Printer	Botol	12	100.000,00	1.200.000,00
6.	Seminar Kit Bimtek	Buah	100	28.000,00	2.800.000,00
				JUMLAH I	8.220.000,00
II	Belanja Bahan Cetak				-
1.	Spanduk	Buah	6	500.000,00	3.000.000,00
2.	Piagam/Sertifikat	Lembar	50	22.500,00	1.125.000,00
3.	Fotocopy Berkas	Lembar	2758	300,00	827.400,00
				JUMLAH II	4.952.400,00
III	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
1.	Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	Kotak	340	48.000,00	16.320.000,00
2.	Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	Kotak	340	24.000,00	8.160.000,00
				JUMLAH III	24.480.000,00
				Jumlah Total (I+II+III)	37.652.400,00
				PPN 10%	3.765.240,00
				Jumlah Biaya	41.417.640,00
				Dibulatkan	41.417.000,00
	Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah				

Samarinda, Desember 2023
Ditetapkan oleh :
PPTK

Syarifuddin Nur, SE.,MM
NIP. 19741105 200112 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	: APBD TAHUN 2024
PROGRAM	: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
KEGIATAN	: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	: JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA	: Rp 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

A. Latar Belakang :

Kota Samarinda adalah salah satu Kota yang mengikuti Penilaian Kota Layak Anak secara Online mulai Tahun 2017 dari 456 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Pencapaian penghargaan sampai saat ini sebagai Kota Layak Anak pada Katagori KLA Madya. Program Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) sendiri dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2006 dan ditargetkan tercapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada Tahun 2030. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah wilayah dengan system pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan Secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, Sinergitas antara berbagai kebijakan perlu terus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan agar tercapai Indonesia Layak Anak (IDOLA). Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dan Responsif Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mentargetkan mendapatkan penghargaan Kategori Nindya. Dalam Upaya untuk mencapai target *Kategori Nindya*, OPD, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Forum Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Massa dan Media Massa dapat memberikan dukungannya dengan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dalam mendukung KLA. Begitu juga dengan Rumah Ibadah harus ramah anak karena juga merupakan bagian dari indikator evaluasi KLA.

- B. Permasalahan :
1. Kurangnya pemahaman OPD, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Forum Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa tentang Konvensi Hak Anak (KHA).
 2. Kurangnya pemahaman Rumah Ibadah Ramah Anak tentang Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu).
- C. Analisa/Arah Kebijakan
1. Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dan Responsif Gender
 2. Samarinda menjadi Kota Layak Anak Kategori Nindya
- D. Tujuan
1. Meningkatnya pemahaman OPD, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Forum Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa tentang Konvensi Hak Anak (KHA).
 2. Meningkatnya Rumah Ibadah Ramah Anak (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- E. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali dirumahnya terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
12. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Perubahan RJPMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 November 2020
14. Perwali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
16. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

F. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

G. Waktu Pelaksanaan
Rencana Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

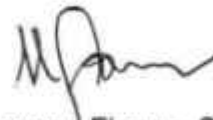
H. Hasil Kegiatan

- a. Memberikan pemahaman tentang Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) kepada 6 pengurus agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu)
- b. Memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di tempat ibadah
- c. Menyarankan diantara rumah ibadah yang ada untuk diusulkan menjadi rumah ibadah ramah anak (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu).

- d. Memberikan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak kepada, OPD, tenaga Pendidik dan kependidikan, Forum Anak Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa.
- e. Meningkatkan peran serta OPD, tenaga Pendidik dan kependidikan, Forum Anak Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa, dalam mendukung Samarinda menuju Kota Layak Anak Kategori Nindya
- f. Pembuatan Leaflet sebagai bahan informasi untuk mendukung KLA Nindya

Samarinda, 4 September 2023

Kepala Bidang PHA/PPTK,



Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
NIP. 19670422 1986091001

NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
NAMA SUB
TAHUN ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)
PELEMBAGAAN PIHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA
ADVOKASI KEBIJAKAN & PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN
DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
2024

NO	NOMOR REKENING	KOMPONEN PEMBIAYAAN	RINCIAN	VOLUME		HARGA BATUAH (Rp)	BIAYA (Rp)
				JML	BATUAN		
1		Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan					8.448.000
		- Pembantu Bendahara Pengeluaran		2	Bulan	380.000	760.000
		- PPTK		2	Bulan	605.000	1.210.000
		- Pengguna Anggaran		2	Bulan	937.500	1.875.000
		- Bendahara Pengeluaran/Penerimaan		2	Bulan	420.000	840.000
		- PPK SKPD		2	Bulan	460.000	960.000
2		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					880.000
		- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		2	Bulan	340.000	680.000
3		Belanja Alat Tulis Kantor					4.257.000
		- Kertas NCR Folio		4	Rim	65.000	260.000
		- Binder Clips No 200		4	Kotak	22.000	88.000
		- Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4		10	Rim	65.000	650.000
		- Map Biasa / Map Jago		288	Lembar	500	144.000
		- Map Biola		100	Rim	3.000	300.000
		- Map Dokumen Plastik		5	Buah	55.000	275.000
		- Tinta Printer		10	Botol	100.000	1.000.000
		- Seminar Kit		55	Buah	28.000	1.540.000
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					15.790.000
		- Fotocopi Hitam Putih A4/F4		3.500	Lembar	500	1.750.000
		- Cetak Spanduk		24	M2	150.000	3.600.000
		- Cetak Spanduk Bahan Vinyl 4m x 1m		6	Buah	300.000	1.800.000
		- Cetak Buku Laporan		5	Buku	200.000	1.000.000
		- Kertas Concorde F4		2	Rim	120.000	240.000
		- Poster Ukuran A2		370	Lembar	20.000	7.400.000
5		Belanja Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					4.800.000
		- Plakat Besar		12	Buah	400.000	4.800.000
6		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					3.000.000
		- Honorarium Juri Penilaian SRA		12	Orang	250.000	3.000.000
7		Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.160.000
		- Snack Kegiatan Penilaian SRA Nasi Kotak		100	Orang/Kag	48.000	4.800.000
		- Konsumsi Kegiatan Penilaian SRA Snack		100	Orang/Kag	24.000	2.400.000
		- Snack Kegiatan Rapat Penilaian SRA Snack		20	Orang/Kag	24.000	480.000
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Temu Persiapan Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi KLA Rapat / Kegiatan Snack		20	Org/Kag	24.000	480.000
8		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.888.000
		- Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) di Jakarta		1	Orang/Hari	911.000	911.000
		- Biaya Taksi di DKI Jakarta		6	Orang/Kali	256.000	1.536.000
		- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Smd-Jkt		3	Orang/Kali	3.987.000	11.961.000
		- Biaya Taksi di kalim (Bandara APT Pranoto)		6	Orang/Kali	300.000	1.800.000
		- Tarif Hotel di DKI Jakarta Pengws/East/GoI Wbt		4	Orang/Hari	730.000	2.920.000
		- Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta		8	Orang/Hari	530.000	4.270.000
9		Honorarium Narasumber/Moderator, Pembawa Pembawa Acara dan Panitia					8.300.000
		Honor Kegiatan Advokasi & Sosialisasi Kebijakan KLA					
		- Moderator		1	Org/Kag	700.000	700.000
		- Pembawa Acara		1	Org/Kag	400.000	400.000
		- Narasumber		5	Org/Kag	1.000.000	5.000.000
		Narasumber Kegiatan Penilaian SRA					
		- Pembawa Acara		1	Org/Kag	400.000	400.000
		- Narasumber		2	Org/Kag	900.000	1.800.000
10		Honorarium Rohaniawan					400.000
		Honor Kegiatan Advokasi dan Kebijakan KLA		1	Orang/Kag	400.000	400.000
11		Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					30.000.000
		- Hadiah Lomba SRA Tingkat SMA/ sederajat		1	Paket	7.500.000	7.500.000
		- Hadiah Lomba SRA Tingkat SMP/ sederajat		1	Paket	7.500.000	7.500.000
		- Hadiah Lomba SRA Tingkat SD/ sederajat		1	Paket	7.500.000	7.500.000
		- Hadiah Lomba SRA Tingkat TK/ sederajat		1	Paket	7.500.000	7.500.000

13	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.878.509
	TOTAL BELANJA	170.656.555

Kemala Hartono PHATTA

[Signature]
 Muhaimin Firdausy Sidiyasa
 NIP. 19670422 199004 1 001



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.13.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa
Jumlah 2023	: 333.073.000,00
Jumlah 2024	: Rp 500.000.000,00
Jumlah 2025	: Rp -

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Menuju Kota Layak Anak (KLA)	700 - 800
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	500.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen
Hasil	Dokumen KLA	7 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Belanja	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					500.000.000
	BELANJA OPERASI					491.500.000
	Belanja Pegawai					24.225.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN					24.225.000
	Belanja Honorarium					24.225.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					24.225.000
	- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didasar Rp 250 s/d 500 jt	6	Orang/Bulan	1.450.000	0	8.700.000
	- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana didasar Rp 250 s/d 500 jt	6	Orang/Bulan	1.057.500	0	6.345.000
	- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penata Usahaan Keuangan Setuankerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) didasar Rp 250 s/d 500 jt	6	Orang/Bulan	570.000	0	3.420.000
	- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran didasar Rp 250 s/d 500 jt	6	Orang/Bulan	500.000	0	3.000.000
	- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu didasar Rp 250 s/d 500 jt	6	Orang/Bulan	460.000	0	2.760.000
	Belanja Barang dan Jasa					467.275.000
	Belanja Barang					154.149.500
	Belanja Barang Pakai Habis					154.149.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.450.000
	- Amplop Jaya Pakai Lem	3	Pak	42.000	0	126.000
	- Ordner Gungyu 401/402/403	5	Buah	45.000	0	225.000
	- Map Biola	200	Buah	3.000	0	600.000
	- Kertas HVS 70 gram A-4	15	Rim	85.000	0	1.275.000
	- Map dokumen plastik	10	Buah	32.000	0	320.000
	- Map Biola/map jagh	300	Lembar	500	0	150.000
	- Kertas NCR Folio	4	Rim	65.000	0	260.000
	- Kertas HVS 70 gram F-4	4	Rim	85.000	0	340.000
	- Material 10.000	15	Lembar	10.000	0	150.000
	- Ball Point Pic Knock	20	Buah	2.700	0	54.000
	- Tinta Printer	10	Botol	100.000	0	1.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					31.739.500
	- Beban Penggandaan (Fotocopy A4/F4) kegiatan	2748	Lembar	500	0	1.374.000
	- Cetak Buku/Laporan Evaluasi KLA	10	Buku	200.000	0	2.000.000
	- Cetak Buku/Laporan Kegiatan	5	Buku	200.000	0	1.000.000
	- Cetak leaflet ukuran A4 dua sisi laminating Tema KLA	1200	Lembar	4.500	0	5.400.000
	- Cetak Booklet Tema KLA	260	Lembar	20.000	0	5.200.000
	- Cetak Sertifikat/Piagam Penghargaan	50	Buah	35.310	0	1.765.500
	- Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk kegiatan biaya pemasangan) Tema HAN dan Gerakan Masyarakat Menuju Kota Layak Anak	60	M2	150.000	0	9.000.000
	- Cetak Spanduk bahan vinly (ukuran 4 m x 1 m)	20	Buah	300.000	0	6.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir / cendera mata					10.000.000
	- Belanja Souvenir/cendera mata Pengor Acara HAN	100	Paket	100.000	0	10.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.000.000
	- Dekorasi Panggung Hari Anak Nasional (HAN)	1	Paket	5.000.000	0	5.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					72.960.000
	- Belanja makan rapat persiapan Pengumpulan, Pengolahan dan Penginapan Data Evaluasi KLA (Snack); 20 org x 1 hr	20	Org/hari	24.000	0	480.000
	- Belanja makan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Penginapan Data Evaluasi KLA; 10 org x 15 hr	150	Org/hari	48.000	0	7.200.000

- Belanja anak kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Pengimputan Data Evaluasi KLA; 10 org x 15 hr	150	Org/hari	24.000	0	3.600.000
- Belanja makan rapat Persiapan Kegiatan Pra Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; 40 org x 1 hr	40	Org/hari	24.000	0	960.000
- Belanja makan kegiatan Pra Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; 20 org x 10 lokasi	200	Org/hari	48.000	0	9.600.000
- Belanja anak kegiatan Pra Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; 20 org x 10 lokasi	200	Org/hari	24.000	0	4.800.000
- Belanja makan kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; 50 org x 1 hr	50	Org/hari	48.000	0	2.400.000
- Belanja anak kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; 50 org x 1 hr	50	Org/hari	24.000	0	1.200.000
- Belanja anak kegiatan rapat koordinasi Gugus Tugas & Evaluasi KLA; 60 org x 1 hr x 3 kali	180	Org/hari	24.000	0	4.320.000
- Belanja makan rapat Persiapan Kegiatan HAN (Snack); 20 org x 1 hr	20	Org/hari	24.000	0	480.000
- Belanja anak kegiatan HAN; 1500 org x 1 hr	1500	Org/hari	24.000	0	36.000.000
- Belanja makan kegiatan HAN; 20 org x 2 hr	40	Org/hari	48.000	0	1.920.000
Belanja Paket Olahraga					30.000.000
- Belanja kaos kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	150	bush	200.000	0	30.000.000
Belanja Jasa					212.812.500
Belanja Jasa Kantor					177.700.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator/Pembawa Acara dan Panitia					14.100.000
# Narasumber kegiatan HAN					4.800.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang di setarakan; 1 or x 4 jam	4	orang / jam	900.000		3.600.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara; 3 org x 1 keg	3	orang / keg	400.000		1.200.000
# Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas & Evaluasi KLA					9.300.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber / Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang di setarakan; 1 or x 2 jam x 3 kali	6	orang / jam	1.000.000		6.000.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara; 1 org x 1 hr x 3 kali	3	orang / keg	400.000		1.200.000
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Moderator; 1 org x 1 hr x 3 kali	3	orang / keg	700.000		2.100.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					126.000.000
Honorarium Tim Pelaksana KLA :					126.000.000
# Honor Pengarah					15.000.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2 or x 5 bulan Spesifikasi : Pengarah (Wakil Walikota)	10	orang/bulan	1.500.000	0	15.000.000
# Honor Penanggung Jawab dan Koordinator					25.000.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 4 or x 5 bulan Spesifikasi : Penanggung Jawab (Sekda dan Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3)	20	orang/bulan	1.250.000	0	25.000.000
# Honor Ketua					10.000.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2 or x 5 bulan Spesifikasi : Ketua (Ka. Bappedalitbang dan Ka. DP2PA)	10	orang/bulan	1.000.000	0	10.000.000
# Honor Wakil Ketua					8.500.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2 or x 5 bulan Spesifikasi : Wakil Ketua (Sekretaris DP2PA dan Kabid PHA)	10	orang/bulan	850.000	0	8.500.000
# Honor Sekretaris					3.750.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 1 or x 5 bulan Spesifikasi : Sekretaris (Kasi Kes dan Pendidikan)	5	orang/bulan	750.000	0	3.750.000
# Honor Anggota					63.750.000
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah; 17 org x 5 bulan Spesifikasi : Anggota	85	orang/bulan	750.000	0	63.750.000
Honorarium Rohaniawan					1.600.000
# Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas & Evaluasi KLA					
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan; 1 org x 1 hr x 3 kali	3	orang/keg	400.000	0	1.200.000
# Narasumber kegiatan HAN					
- Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan	1	orang/keg	400.000	0	400.000
Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan					6.000.000
# Sewa Tenaga Kesenian Kegiatan HAN					
- Sewa Tenaga Kesenian Kegiatan HAN	1	Paket	6.000.000	0	6.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Promobretan					30.000.000
# Belanja Jasa Iklan/Reklame					

- Belanja Jasa Publikasi media cetak (koran)	1	Tahun	24.000.000	0	24.000.000
- Belanja Jasa Publikasi (iklan)	1	Paket	6.000.000	0	6.000.000
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.112.500
Belanja Sewa Mebel					1.312.500
# Sewa kursi kegiatan HAN					
- Sewa kursi besi + cover kegiatan HAN	75	bush	17.500	0	1.312.500
Belanja Sewa Alat Pendingin					4.000.000
# Sewa kipas angin/blower kegiatan HAN					
- Sewa kipas angin kegiatan HAN	10	bush	400.000	0	4.000.000
Belanja Sewa Alat Rumah (Home Use)					800.000
# Sewa panggung kegiatan HAN (Outdoor)					
- Sewa panggung kegiatan HAN (Outdoor)	1	hari	800.000	0	800.000
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					4.000.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					4.000.000
# Sewa gedung kegiatan HAN					
- Sewa gedung kegiatan HAN	1	hari	4.000.000	0	4.000.000
Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya					25.000.000
Belanja Sewa Audio Visual					25.000.000
# Sewa sound sistem kegiatan HAN					
- Sewa sound system kegiatan HAN	1	paket	25.000.000	0	25.000.000
Belanja Perjalanan Dinas					100.313.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					100.113.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa					100.313.000
# Perjalanan Dinas Luar Daerah					94.118.000
- Beban perjalanan dinas luar daerah					
Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi)	14	Orang/kg	3.987.000	0	55.818.000
PP dari Samarinda ke Jakarta; 14 orang					
- Beban perjalanan dinas luar daerah					
Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi DKI Jakarta	16	Orang/Hari	730.000	0	11.680.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS; 8 kamar x 2 hari					
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	42	Orang / Hari	530.000	0	22.260.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS; 14 org x 3 hari					
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah					
Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	10	Orang/Kali	200.000	0	2.000.000
(Bandara APT Pranoto) One Way					
- Beban perjalanan dinas luar daerah					
Spesifikasi : Biaya taksi di DKI Jakarta; 10 org x 2 kali	10	Orang/kali	256.000	0	2.560.000
# Perjalanan Dinas Luar Daerah Narsum Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan KLA					5.995.000
- Beban perjalanan dinas luar daerah					
Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi)	1	Orang/kg	3.987.000	0	3.987.000
PP dari Samarinda ke Jakarta; 1 orang					
- Beban perjalanan dinas luar daerah					
Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kaltim	2	Orang/Hari	804.000	0	1.608.000
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS; 1 kamar x 2 hari					
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah					
Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	2	Orang/Kali	200.000	0	400.000
(Bandara APT Pranoto) One Way					
BELANJA MODAL					8.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.500.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.500.000
Belanja Modal Alat Kantor					8.500.000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					8.500.000
- Roll Up Banner Tema KLA ukuran 60 cm x 160 cm	5	Roll	900.000	0	4.500.000
- Pembuatan Plang Ramah Anak	1	Unit	4.000.000	0	4.000.000
Grand Total :					500.000.000

Kota Samarinda, 4 September 2023



**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA
LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NOMOR REKENING	KOMPONEN PEMBIAYAAN	RINCIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)
				JML	SATUAN		
		2	3	4	5	6	7
1	5.1.01.03.07.0001	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pembantu Bendahara Pengeluaran - PPTK - Pengguna Anggaran - Bendahara Pengeluaran/Penerimaan - PPK SKPD		2 2 2 2 2	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	380.000 1.210.000 1.250.000 420.000 480.000	7.480.000 760.000 2.420.000 2.500.000 840.000 960.000
2	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		2	Bulan	340.000	680.000
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas NCR Folio - Keras HVS 70 Gr Folio F4 - Stiker Post It Color Pembatas - Kertas hvs 70 Gr Kwarto A4 - Buku Tulis Folio - Bender Clipp No. 200 - Odner Gung Yu Batik - Map Jago - Buku agenda Surat - Pulpen Pilot - Pensil Faber Castell - Tinta Printer		6 10 2 10 4 2 1 120 2 1 6 10	Rim Rim Pcs Rim Buah Kotak Pcs Lembar Buah Lusin Buah Botol	85.000 85.000 20.000 55.000 30.000 22.000 33.000 500 40.000 60.000 5.000 100.000	3.267.000 390.000 850.000 40.000 550.000 120.000 44.000 33.000 60.000 80.000 60.000 30.000 1.000.000
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak - Fotocopi Hitam Putih A4/F4 - Leaflet Ukuran A4 Dua Sisi Biasa - Cetak Buku/Laporan - Cetak Spanduk Bahan Viny - Cetak Plagam		2.372 1.025 6 8 63	Lembar Lembar Buku Buat Lembar	500 4.000 250.000 300.000 4.000	9.438.000 1.186.000 4.100.000 1.500.000 2.400.000 252.000
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack Kegiatan Forum Anak Tingkat Kota (50 orang X 3) - Snack Penguatan Bagi Forum Anak (50 Orang X 3) - Nasi Kotak Penguatan Bagi Forum Anak (50 Orang X 3) - Snack Sosialisasi KIE (50 Orang X 2) - Snack Rapat Rutin Forum Anak Tingkat Kota (40 orang X 4) - Snack Sosialisasi Forum Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan (30 Orang X 6) - Nasi Kotak Sosialisasi Forum Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan (30 Orang X 6) - Snack Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (50 Orang X 3) - Nasi Kotak Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (50 Orang X 3)		150 150 150 100 180 240 240 150 150	Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg	24.000 24.000 48.000 24.000 24.000 24.000 48.000 24.000 48.000	3.600.000 3.600.000 7.200.000 2.400.000 3.840.000 5.760.000 11.520.000 3.600.000 7.200.000
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Honor Kegiatan Bimtek KHA - Narasumber (4 org x 1) - Moderator - Pembawa Acara (1 Org x 1) Honor Kegiatan Sosialisasi Forum Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan - Narasumber (2 org x 8 kl) - Pembawa Acara (1 Org x 8 kl) Honor Kegiatan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak - Narasumber (1 org x 3 kl) - Pembawa Acara (1 org x 3 kl) Honor Kegiatan Sosialisasi KIE - Narasumber (2 org x 2 kl) - Pembawa Acara (1 org x 2 kl)		4 1 1 16 8 3 3 4 2	Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg	900.000 700.000 400.000 900.000 400.000 900.000 400.000 900.000 400.000	3.600.000 700.000 400.000 14.400.000 3.200.000 3.000.000 2.700.000 1.200.000 3.600.000 800.000
8	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan - Honor Kegiatan Penguatan Forum Anak - Honor Kegiatan Bimtek KHA bagi Forum Anak - Honor Kegiatan Penguatan Forum Anak		3 1 3	Orang/Keg Orang/Keg Orang/Keg	400.000 400.000 400.000	2.800.000 1.200.000 400.000 1.200.000
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.763.000
10	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Bimtek KHA- FA (63 org x 1 hr)		63	Org/Hr/Kg	274.000	17.262.000
		TOTAL BELANJA					160.000.000



Samarinda, 4 September 2024
Kepala Bidang PHA/PPTK,

[Handwritten Signature]
Muhammad Firman, S.Sos M.Si
NIP. 196704221986091001

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Nama Kegiatan : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
 Nama Sub Kegiatan : KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Tahun Anggaran : SUB KEGIATAN PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Tahun Anggaran : 2024

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)
		JML	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				7.480.000
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	2	Bulan	380.000	760.000
	- PPTK	2	Bulan	1.210.000	2.420.000
	- Ponggawa Anggaran	3	Bulan	1.350.000	2.500.000
	- Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	2	Bulan	420.000	840.000
	- PPK SKPD	2	Bulan	480.000	960.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
	- Penjabat Pengadaan Barang/Jasa	2	Bulan	340.000	680.000
3	Belanja Alat Tulis Kantor				7.691.000
	- Kertas HVS 70 gram Kwartol/A4	20	Rim	55.000	1.100.000
	- Map Biola	50	Lembar	3.000	150.000
	- Buku Bloknote A5	130	Buah	6.350	825.500
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	20	Rim	85.000	1.700.000
	- Kertas NCR Folio	18	Rim	85.000	1.235.000
	- Ball Point Pilot G 2.07	10	Buah	15.000	150.000
	- Ball Point Kenko K-1	130	Buah	3.250	422.500
	- Trigonal Clips	1	Kotak	48.000	48.000
	- Amplop Kabinet Prima	2	Pak	25.000	50.000
	- Tinta Printer	20	Botol	100.000	2.000.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				3.293.000
	- Fotocopi Hitam Putih A4/F4	746	Lembar	500	373.000
	- Cetak Spanduk	6	Buah	300.000	1.800.000
	- Cetak Piagam	130	Lembar	4.000	520.000
	- Cetak Buku Laporan	3	Buku	200.000	600.000
5	Belanja Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				1.950.000
	- Tas Souvenir	130	Buah	15.000	1.950.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				15.840.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan Jejaring PHA (55 org x 2 kl)	110	Orang/Keg	24.000	2.640.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan Jejaring PHA (55 org x 2 kl)	110	Orang/Keg	48.000	5.280.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan Kelurahan Ramah Anak(55 org x 2 kl)	110	Orang/Keg	24.000	2.640.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan Kelurahan Ramah Anak(55 org x 2 kl)	110	Orang/Keg	48.000	5.280.000
7	Honorarium Narasumber,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				30.400.000
	Honor Kegiatan Pembinaan Jejaring PHA				6.200.000
	- Narasumber (1 org x 2 jam x 2 kl)	4	Orang/Keg	900.000	3.600.000
	- Moderator	2	Orang/Keg	700.000	1.400.000
	- Anggota (2 org x 2 kl)	4	Orang/Keg	300.000	1.200.000
	Honor Kegiatan Pembinaan Kelurahan Ramah Anak				5.600.000
	- Narasumber (1 org x 2 jam x 2 kl)	4	Orang/Keg	900.000	3.600.000
	- Moderator	2	Orang/Keg	700.000	1.400.000
	- Anggota (1 org x 2 kl)	2	Orang/Keg	300.000	600.000
	Honor Kegiatan Bimtek KHA				12.400.000
	- Narasumber (1 org x 5 jam x 2 kl)	10	Orang/Keg	900.000	9.000.000
	- Moderator	2	Orang/Keg	700.000	1.400.000
	- Anggota (2 org x 2 kl)	4	Orang/Keg	300.000	1.200.000
	- Pembawa Acara (1 org x 2 kl)	2	Orang/Keg	400.000	800.000
	Honor Kegiatan Bimtek SRA				6.200.000
	- Narasumber (1 org x 5 jam x 1 kl)	5	Orang/Keg	900.000	4.500.000
	- Moderator	1	Orang/Keg	700.000	700.000
	- Anggota (2 org x 1 kl)	2	Orang/Keg	300.000	600.000
	- Pembawa Acara (1 org x 1 kl)	1	Orang/Keg	400.000	400.000
8	Honorarium Rohaniawan				2.000.000
	Honor Kegiatan Pembinaan Jejaring PHA	2	Orang/Keg	400.000	800.000
	Honor Kegiatan Bimtek SRA	1	Orang/Keg	400.000	400.000
	Honor Rohaniawan Kegiatan Bimtek KHA	2	Orang/Keg	400.000	800.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				29.976.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				50.690.000
	Kegiatan Bimtek KHA (60 org x 1 hr x 2 kl)	120	Org/hr/Kl	274.000	32.880.000
	Kegiatan Bimtek SRA	65	Org/Keg	274.000	17.810.000
	TOTAL BELANJA				150.000.000

Kepala Bidang PHA/PPTK,


 Muhammad Firman, S.Sos.M.Si
 NIP. 196304221986091001



REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Nama Kegiatan : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Nama Sub Kegiatan : SUB KEGIATAN PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Alat Tulis Kantor	Rp 7.891.000,00		
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 3.293.000,00		
3	Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.950.000,00		
4	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 15.840.000,00		
5	Paket Meeting Dalam Kota	Rp 50.690.000,00		
	JUMLAH	Rp 79.464.000,00		
	DIBULATKAN	Rp 79.450.000,00		

TERBILANG : Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313

Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el : dp2pakotasamarinda@yahoo.com

SAMARINDA 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

- OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda
- Program : Pemenuhan Hak Anak
- Kegiatan : Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
 - Volume : 30
 - Satuan Ukur : Organisasi
 -

Capaian Kinerja :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Masukan (Input) : Organisasi
 - Keluaran (Output) : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha
 - Outcome : Terwujudnya Advokasi

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Keutusan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- g. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan & Penetapan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 10 Propinsi lainnya;
- h. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 463/K. 772/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menuju Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor. 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak;
- j. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor. Tahun Tentang APBD;
- k. Perwali Nomor: 104 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan warga Kota yang religius, unggul dan berbudaya misi nomor 4 yakni mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan misi nomor 5 yakni mewujudkan Kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Mendukung program prioritas Wali Kota salah satunya nomor 9 yakni Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp . 120.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan Pelembagaan PHA Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelembagaan PHA Pada Sub Kegiatan Advoaksi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 4 September 2023

Kepala Bidang / PPTK



Muhammad Firman, S.Sos.M.Si

NIP : 19670422 198809 1 001

Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024.
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN
PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: Pemenuhan Hak Anak
Kegiatan	: Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Volume : 8
- Satuan Ukur : Dokumen
-

Capaian Kinerja :

**1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Masukan (input) : Dokumen
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
- Outcome : Terwujudnya Dokumen KLA

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Keutusan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- g. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan & Penetapan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 10 Propinsi lainnya;
- h. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 463/K. 772/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menuju Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor. 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak;
- j. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor. Tahun Tentang APBD;
- k. Perwali Nomor: 104 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan warga Kota yang relegius, unggul dan berbudaya misi nomor 4 yakni mewujudkan infrastuktur yang mantap dan modern dan misi nomor 5 yakni mewujudkan Kota sengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Mendukung program prioritas Wali Kota salah satunya nomor 9 yakni Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp . 500.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 4 September 2023

KERALA BIDANG PHA



Muhammad Firman, S.Sos., M.Si.

NIP. 196704221986091001

Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024.
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

UNIT KERJA	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
JENIS SATKER	:	APBD Tahun 2024
PROGRAM	:	Program Pemenuhan Hak Anak
KEGIATAN	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota Tahun 2024
SUB KEGIATAN	:	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
KELUARAN	:	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
ALOKASI DANA	:	Rp. 150.000.000

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

SDM yang berkualitas tidak lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

Secara individu, jutaan anak menghadapi resiko busung lapar dan ketidakcukupan nutrisi yang mengancam pertumbuhan dan masa depannya. Angka kematian bayi 32 perseribu kelahiran hidup (2005), masih sangat tinggi. Mereka menghadapi ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi hak mereka seperti kepemilikan Akta Kelahiran, akses terhadap Pendidikan yang terjangkau, terbebas dari perlakuan salah, kekerasan ekonomi, seksual dan psikis.

Program Pemerintah dalam memenuhi Hak Anak dan Perlindungan Anak adalah melalui Anugerah Kabupaten / Kota Layak Anak.

Kabupaten Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Prinsip kebijakan KLA adalah mendukung kabupaten/kota agar menghormati hak anak yang diwujudkan dengan cara: (*Innocenti Digest* No.10/10/02:22):

- a. Menyediakan akses pelayanan Kesehatan, Pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang, anak dapat berkreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- e. Memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Menyediakan wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka.

Sebagai wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka melalui Organisasi Forum Anak.

Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibina oleh Pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi Pemerintah daerah dengan anak sebagai upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dan Responsif Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menargetkan mendapatkan penghargaan KLA Kategori Nindya.

Forum Anak dapat memberikan dukungan untuk pencapaian Kategori KLA Nindya yaitu dengan peningkatan peran dan partisipasi forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam semua indikator evaluasi KLA baik dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

B. Permasalahan

1. Kurangnya komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
2. Kurangnya pengetahuan Forum Anak tentang tugas dan fungsinya sebagai Pelopor dan Pelapor.

C. Analisa / Arah Kebijakan

1. Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban
2. Samarinda Kota Layak Anak

D. Tujuan

1. Meningkatkan komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
2. Meningkatnya pengetahuan Forum Anak tentang tugas dan fungsinya sebagai Pelopor dan Pelapor.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

10. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 November 2020
13. Perwali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor: 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
15. Keputusan Walikota Nomor: 400.2.4-05/369/HK-KS/VIII/2023 tentang Pembentukan Pengurusan Forum anak Kota Samarinda Periode Tahun 2023-2025.
16. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024

F. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2024 (terlampir)

G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2024

H. Hasil Kegiatan

Tersedianya laporan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2024

Samarinda, 4 September 2023

Kepala Bidang PHA,



Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
NIP. 19670402 200312 2 006

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Nama Kegiatan : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Nama Sub Kegiatan : SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Tahun Anggaran : 2024

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)
		JML	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				9.755.000
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	4	Bulan	380.000	1.520.000
	- PPTK	3	Bulan	907.500	2.722.500
	- Pengguna Anggaran	3	Bulan	937.500	2.812.500
	- Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	3	Bulan	420.000	1.260.000
	- PPK SKPD	3	Bulan	480.000	1.440.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000
	- Penjabat Pengadaan Barang/Jasa	2	Bulan	340.000	680.000
3	Belanja Alat Tulis Kantor				2.824.000
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/A4	10	Rim	55.000	550.000
	- Map Biola	30	Lembar	3.000	90.000
	- Buku Bloknote A5	40	Buah	6.350	254.000
	- Kertas HVS 70 gram FoliolF4	5	Rim	85.000	425.000
	- Kertas NCR Folio	5	Rim	65.000	325.000
	- Ball Point Kenko K-1	40	Buah	3.250	130.000
	- Amplop Kabinet Prima	2	Pak	25.000	50.000
	- Tinta Printer	10	Betol	100.000	1.000.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				3.430.000
	- Fotocopi Hitam Putih A4/F4	620	Lembar	500	310.000
	- Cetak Spanduk	6	Buah	300.000	1.800.000
	- Cetak Plagam	80	Lembar	4.000	320.000
	- Cetak Buku Laporan	5	Buku	200.000	1.000.000
5	Belanja Barang utk Dijual/Diserahkan kepada				600.000
	- Tas Sovenir	40	Buah	15.000	600.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				60.480.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan PHA pd Kec. Lyak Anak (50 org x 5 hr x 1 kl)	250	Orang/Keg	24.000	6.000.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan PHA pd Kec. Lyak Anak (50 org x 5 hr x 1 kl)	250	Orang/Keg	48.000	12.000.000
	- Snack Kegiatan Penguatan Pengurus LKSA (50 org x 1 kl)	50	Orang/Keg	24.000	1.200.000
	- Konsumsi Kegiatan Penguatan Pengurus LKSA (50 org x 1 kl)	50	Orang/Keg	48.000	2.400.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan RIRA (30 org x 3 hr x 1 kl)	90	Orang/Keg	24.000	2.160.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan RIRA (30 org x 3 hr x 1 kl)	90	Orang/Keg	48.000	4.320.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan ke Pesantren (75 org x 3 hr x 1 kl)	225	Orang/Keg	24.000	5.400.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan ke Pesantren (75 org x 3 hr x 1 kl)	225	Orang/Keg	48.000	10.800.000
	- Snack Kegiatan Pembinaan ke LKSA (75 org x 3 hr x 1 kl)	225	Orang/Keg	24.000	5.400.000
	- Konsumsi Kegiatan Pembinaan ke LKSA (75 org x 3 hr x 1 kl)	225	Orang/Keg	48.000	10.800.000
7	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				82.300.000
	- Honor Kegiatan Penguatan LKSA				4.100.000
	- Narasumber (1 org x 3 jam x 1 kl)	3	Orang/Kg	900.000	2.700.000
	- Moderator	1	Orang	700.000	700.000
	- Pembawa Acara	1	Orang	400.000	400.000
	- Anggota	1	Orang	300.000	300.000
	- Honor Kegiatan Pembinaan PHA pd Kec. Lyak Anak				18.500.000
	- Narasumber (3 org x 1 jam x 5 hr)	15	Orang/Keg	900.000	13.500.000
	- Moderator (1 org x 5 kl)	5	Orang/Keg	700.000	3.500.000
	- Anggota (1 org x 5 kl)	5	Orang/Keg	300.000	1.500.000
	- Honor Kegiatan Pembinaan ke LKSA				11.100.000
	- Narasumber (1 org x 3 jam x 3 kl)	9	Orang/Keg	900.000	8.100.000
	- Moderator (1 org x 3 kl)	3	Orang/Keg	700.000	2.100.000
	- Anggota (1 org x 3 kl)	3	Orang/Keg	300.000	900.000
	- Honor Kegiatan Pembinaan RIRA				8.400.000
	- Narasumber (1 org x 2 jam x 3 kl)	6	Orang/Keg	900.000	5.400.000
	- Moderator (1 org x 3 kl)	3	Orang/Keg	700.000	2.100.000
	- Anggota (1 org x 3 kl)	3	Orang/Keg	300.000	900.000
	- Honor Kegiatan Pembinaan ke Pesantren				10.200.000
	- Narasumber (1 org x 3 jam x 3 kl)	9	Orang/Keg	900.000	8.100.000
	- Moderator (1 org x 3 kl)	3	Orang/Keg	700.000	2.100.000
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Kegiatan				29.700.000
	1 Honor Pengarah	6	orang /bulan	750.000	4.500.000
	2 Honor Penanggung Jawab dan Koordinator	6	orang /bulan	700.000	4.200.000
	3 Honor Ketua	6	orang /bulan	650.000	3.900.000
	4 Honor Wakil Ketua	6	orang /bulan	600.000	3.600.000
	5 Honor Sekretaris	6	orang /bulan	500.000	3.000.000
	6 Honor Anggota	21	orang /bulan	500.000	10.500.000
8	Honorarium Rohaniawan				400.000
	- Honor Kegiatan Penguatan Pengurus LKSA	1	Orang/Keg	400.000	400.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				39.831.000
	TOTAL BELANJA				200.000.000

Kepala Bidang PHA/PPTK,


 Muhammad Fiman, S.Sos.M.Si
 NIP. 196704221986091001





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	: APBD TAHUN 2024
PROGRAM	: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
KEGIATAN	: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	: JUMLAH 125 ORANG PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA	: Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

A. Latar Belakang :

Kota Samarinda adalah salah satu Kota yang mengikuti Penilaian Kota Layak Anak secara Online mulai Tahun 2017 dari 456 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Pencapaian penghargaan sampai saat ini sebagai Kota Layak Anak pada Katagori KLA Madya. Program Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) sendiri dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2006 dan ditargetkan tercapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada Tahun 2030. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah wilayah dengan system pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan Secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, Sinergitas antara berbagai kebijakan perlu terus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan agar tercapai Indonesia Layak Anak (IDOLA). Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dan Responsif Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mentargetkan mendapatkan penghargaan Kategori Nindya. Dalam Upaya untuk mencapai target *Kategori Nindya*, diperlukan peran serta Dunia Usaha di Kota Samarinda agar segera terbentuk APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, karena juga merujakan indikator Evaluasi KLA. Begitu juga dengan Pembinaan dalam upaya pemenuhan hak anak pada kecamatan layak anak juga perlu ditingkatkan dalam peningkatan pencapaian KLA.

B. Permasalahan :

1. Kurangnya pemahaman dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Samarinda.
2. Kurangnya anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Analisa/Arah Kebijakan

1. Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dan Responsif Gender
2. Samarinda menjadi Kota Layak Anak Kategori Nindya

D. Tujuan

1. Meningkatnya peran Dunia Usaha dalam Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui pembentukan APSAI di Kota Samarinda.
2. Meningkatnya Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

E. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali dirumahnya terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Perubahan RJPMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 November 2020
14. Perwali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
16. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor : DPA/A.1/2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

F. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

G. Waktu Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

H. Hasil Kegiatan

- a. Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebanyak 110 Anak.
- b. Laporan Kegiatan penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota.

Samarinda, 4 September 2023.

Kepala Bidang PHA/PPTK,



Muhammad Firman, S.Sos.M.Si

NIP. 19670422 1986091001

REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Nama Kegiatan : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Nama Sub Kegiatan : PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Alat Tulis Kantor	Rp 2.824.000,00		
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 3.430.000,00		
3	Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 600.000,00		
4	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 60.480.000,00		
	JUMLAH	Rp 67.334.000,00		
	DIBULATKAN	Rp 67.300.000,00		
TERBILANG : Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah.				

Samarinda, 9 Januari 2024
 Pengantar Anggaran

 Dr. Ibnu Hasy, MM, Pd
 NIP. 19670713 199103 1 013



**REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Nama Program : Pemenuhan Hak Anak
 Nama Kegiatan : Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha
 Nama Sub Kegiatan : Kewenangan Kabupaten/Kota
 Tahun Anggaran : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Alat Tulis Kantor	Rp 4.450.000		
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 31.739.500		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir / cendera mata	Rp 48.720.000		
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 5.000.000		
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 72.960.000		
7	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 30.000.000		
8	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan	Rp 6.000.000		
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Rp 30.000.000		
10	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp 6.112.500		
11	Belanja Sewa Alat Pendingin	Rp 4.000.000		
12	Belanja Sewa Alat Rumah (Home Use)	Rp 800.000		
13	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 4.000.000		
14	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp 25.000.000		
15	Belanja Modal	Rp 8.500.000		
	JUMLAH	Rp 277.282.000		
	DIBULATKAN	Rp 267.000.000		
TERBILANG : Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah				



**REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Nama Kegiatan : PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA
 Nama Sub : USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA
 Tahun Anggaran : PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN
 : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Alat Tulis Kantor	Rp 4.257.000,00		
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -	Rp 15.790.000,00		
3	Bahan Cetak	Rp 30.000.000,00		
3	Barang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 8.160.000,00		
4	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 15.070.000,00		
5	Paket Meeting Dalam Kota	Rp 4.800.000,00		
6	Belanja Modal			
	JUMLAH	Rp 78.077.000,00		
	DIBULATKAN	Rp. 78.000.000,00		

TERBILANG : Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah,

Samarinda, 9 Januari 2024
 Pengetua Anggaran

 Dr. Ibnu Araby, MM Pd
 19670713 199 03 1 013

**REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Nama Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Nama Kegiatan : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
Nama Sub Kegiatan : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Alat Tulis Kantor	Rp 3.257.000,00		
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 9.438.000,00		
4	Makanan dan Minuman Rapat	Rp 48.720.000,00		
5	Paket Meeting Dalam Kota	Rp 17.262.000,00		
JUMLAH		Rp 78.677.000,00		
DIBULATKAN		Rp. 78.600.000,00		
TERBILANG : Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah				





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el dp2pakotasamarinda@yahoo.com

REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TAHUN 2024

Nama Program : Perlindungan Khusus Anak
Nama Kegiatan : Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,480,000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8,582,000		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3,188,000		
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19,600,000		
6	Honorarium Rohaniwan	400,000		
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,890,000		
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,800,000		
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57,380,000		
10	Belanja Modal Baju Pengaman	16,000,000		
	JUMLAH	150,000,000		
	DIBULATKAN	150,000,000		
TERBILANG : Seratus Lima Puluh Juta Rupiah				

Pengguna Anggaran

Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

Samarinda, 9 Januari 2024
PPTK,


Emi Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el: dppkotasamarinda@yahoo.com

REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TAHUN 2024

Nama Program : Perlindungan Khusus Anak
Nama Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub Kegiatan : Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak dan DRPPA
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4,130,000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	340,000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,321,000		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,834,000		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,600,000		
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	31,300,000		
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,475,000		
	JUMLAH	84,000,000		
TERBILANG : Delapan Puluh Empat Juta Rupiah				

Pengguna Anggaran

Dr. Ibadu Aqib, MM. M.Pd
NIP. 196707131991031013

Samarinda, 9 Januari 2024
PPTK,


Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el: dpppkotasamarinda@yahoo.com

REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) TAHUN 2024

Nama Program : Perlindungan Khusus Anak
Nama Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11,220,000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,020,000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	17,584,000		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	25,857,000		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,600,000		
6	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10,500,000		
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24,000,000		
8	Honorarium Rohaniwan	800,000		
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,099,000		
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,900,000		
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63,420,000		
	JUMLAH	250,000,000		
	DIBULATKAN	250,000,000		
TERBILANG : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah				



Or. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP.196707131991031013

Samarinda, 9 Januari 2024
PPTK,

Emi Agus Wulan Ariani, SE
NIP.197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nama Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
Nama Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Kabupaten/Kota Data di Tingkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.390.000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.898.500		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.250.000		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000		
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	11.200.000		
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.700.000		
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57.029.500		
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.002.000		
10	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000		
11	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000		
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.650.000		
	JUMLAH	250.000.000		
	DIBULATKAN	250.000.000		
TERBILANG : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah				

Pengguna Anggaran

Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

Samarinda, 9 Januari 2024
PPTK,


Emi Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp. (0541) 743307 Kode Pos 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK TAHUN 2024

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Jenis Satker	:	APBD Tahun 2024
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Keluaran	:	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpasu berbasis masyarakat
Alokasi Dana	:	Rp. 150.000.000,-

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban tindak kekerasan.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2016 telah menginisiasi Pembentukan model perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bertujuan untuk melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia pada tingkat desa/kelurahan ditingkat kabupaten/Kota. Untuk Kota Samarinda sampai dengan tahun 2023 sudah terbentuk aktivis PATBM di 23 Kelurahan dari Target 59 Kelurahan.

Lima Arahana Presiden Terhadap Isu Prioritas Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan 5 (Lima) Arahan presiden tersebut dan melihat masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, hal ini terlihat dari Jumlah data Kasus kekerasan berdasarkan Data Kasus kekerasan melalui Aplikasi SIMFONI Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak Pada tahun 2022 Sebanyak 882 kasus dan Pada tahun 2023 Sebanyak 189 Kasus yang merupakan kasus tertinggi di Kalimantan Timur. Untuk mengatasi hal tersebut salah langkah adalah upaya memberdayakan masyarakat agar turut serta terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat kelurahan melalui program Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda akan melakukan pengembangan dengan membentuk Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan termasuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Aktivis Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak – hak Penyandang Disabilitas;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
8. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang.
11. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

14. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 10 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

C. Permasalahan

1. Masih minimnya Jumlah Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk sampai dengan tahun 2023 baru terbentuk 18 dari 59 kelurahan yang ada di Kota samarinda
2. Perlunya Pelatihan bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang akan dibentuk agar aktivis mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif dalam memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Samarinda termasuk upaya pencegahannya.

D. Analisa/Arah Kebijakan

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2023 akan dilaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Samarinda dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah agar aktivis mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif dalam memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Samarinda termasuk upaya pencegahannya.

F. Ruang Lingkup

1. Pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat di Kelurahan
2. Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat di PATBM Kota Samarinda.
3. Pembinaan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Samarinda

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

Sebanyak 80 Orang Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di kelurahan Mendapatkan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat .

Samarinda, 11 Desember 2023

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,



Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

PPTK

Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp. (0541) 743307 Kode Pos 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK TAHUN 2024

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Jenis Satker	:	APBD (DAK Non Fisik) TA 2024
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Keluaran	:	1. Layanan Gelar Kasus (Case Confrence) 2. Layanan Medikolegal 3. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli 4. Layanan Spesifik untuk pemulihan korban 5. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban
Alokasi Dana	:	Rp. 235.480.000-

A. Latar Belakang

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban tindak kekerasan.

Lima Arah Presiden Terhadap Isu Prioritas Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan 5 (Lima) Arahan presiden tersebut dan melihat masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, hal ini terlihat dari Jumlah data Kasus kekerasan berdasarkan Data Kasus kekerasan melalui Aplikasi SIMFONI Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak Pada tahun 2022 Sebanyak 882 kasus dan Pada tahun 2023 Sebanyak 189 Kasus yang merupakan kasus tertinggi di Kalimantan Timur.

Perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga Masyarakat, media, dunia usaha, keluarga dan komunitas.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak – hak Penyandang Disabilitas;
- 7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- 8) Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
- 10) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang.
- 11) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
- 12) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

- 13) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- 14) Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009;
- 15) Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 10 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

C. Permasalahan

1. Kota Samarinda menduduki urutan pertama dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur dari aplikasi SIMFONI KemenPPA
2. Capaian PPPA Kota Samarinda berdasarkan evaluasi
3. Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Penanganan UPTD PPA Kota Samarinda
4. Kondisi Kota Samarinda sebagai mitra IKN yang banyak menimbulkan Dampak Sosial Ekonomi sehingga semakin kompleks permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak di Kota Samarinda.

D. Analisa/Arah Kebijakan

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan pada Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024 diharapkan kegiatan Koordinasi Pelayanan AMPK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK adalah terpenuhinya layanan anak korban kekerasan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban dan pemenuhan hak – hak korban.

F. Ruang Lingkup

1. Layanan Gelar Kasus (Case Conference)
2. Layanan Medikolegal
3. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli
4. Layanan Spesifik untuk pemulihan korban
5. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan.

Samarinda, 14 Maret 2024

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,



Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

PPTK

Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SAMARINDA
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Kegiatan	: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan Anak

- Volume : 4
- Satuan Ukur : Dokumen

Capaian Kinerja :

1. Penyediaan Data Gender dan Anak

- Masukan (input) : Rp. 250.000.000
- Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
- Outcome : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak – Hak Anak Penyandang Disabilitas.
- g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- h. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak
- j. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- m. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum, dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009.
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
- o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- p. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- q. Peraturan Menteri PPPA No. 04 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni Program Smart City Plus.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 250.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 20 September 2023

PENGGUNA ANGGARAN ⚡



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

NIP. 19670713 199103 1 013

Catatan:

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024.
2. Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SAMARINDA
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Program	: Program Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak dan DRPPA

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, Desa/Kelurahan Anak dan DRPPA

- Volume : 14
- Satuan Ukur : Kegiatan

Capaian Kinerja :

1. Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak, Kecamatan layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA

- Masukan (input) : Rp. 84.000.000
- Keluaran (output) : Jumlah Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak
- Outcome : Jumlah Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak – Hak Anak Penyandang Disabilitas.
- g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
- h. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak
- j. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.
- m. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum, dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009.
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

- o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mendukung program prioritas walikota nomor 5 yakni Program Smart City Plus.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 84.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada | Rp - |
| 3. Lain-lain (jika ada) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan rincian RKA terlampir.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 11 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

NIP. 19670713 199103 1 013

Catatan:

1. *RKA hasil input SIPD TA. 2024.*
2. *Definisi input: masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.*
3. *Definisi output: keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti, jumlah, paket, laporan, unit, dsb.*
4. *Definisi outcome: manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti, meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.*
5. *Pembiayaan disesuaikan dengan sumber dana.*
6. *Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.*



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp. (0541) 743307 Kode Pos 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2024

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Jenis Satker	:	APBD Tahun 2024
Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan Bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran	:	Bimtek Lembaga perlindungan Khusus Ramah Anak
Alokasi Dana	:	Rp. 250.000.000,-

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban tindak kekerasan.

Lima Arah Presiden Terhadap Isu Prioritas Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan 5 (Lima) Arah presiden tersebut dan melihat masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, hal ini terlihat dari Jumlah data Kasus kekerasan berdasarkan Data Kasus kekerasan melalui Aplikasi SIMFONI

Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak Pada tahun 2022 Sebanyak 182 kasus dan Pada tahun 2023 Sebanyak 189 Kasus yang merupakan kasus tertinggi di Kalimantan Timur.

SDM yang berkualitas tentu harus dipersiapkan sejak dari satuan pendidikan terkecil, berawal dari PAUD yg merupakan masa emas anak anak kita dan jenjang sekolah dasar. mempersiapkan SDM yg lebih baik sejak dini harus dipersiapkan dengan membekali anak2 kita menjadi pelajar2 yang Pancasila akan tetapi ada tantangan yg dihadapi dalam satuan pendidikan yaitu tindak kekerasan masih banyak terjadi di sekolah permasalahan inilah yg harus terus ditanggulangi untuk menuju visi presiden RI untuk melahirkan SDM berkualitas.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak. dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak seperti yang tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2021 pasal 3 Ayat 3 tentang perlindungan anak bahwa dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak di Unit Pelaksana Teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada Standar layanan yang dilaksanakan di Lembaga Layanan/UPTD yang ramah anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak – hak Penyandang Disabilitas;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
8. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang.
11. Undang – undang Rebuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
13. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

C. Permasalahan

Tingginya Angka kasus kekerasan terhadap anak terutama angka kasus kekerasan di sekolah.

D. Analisa/Arah Kebijakan

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Samarinda dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak adalah :

1. memberikan pemahaman terkait konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2. memberikan pemahaman terkait konsep unit penanganan kasus ramah anak di satuan pendidikan
3. memberikan pemahaman terkait borang standarisasi pada unit penanganan kasus di satuan pendidikan

F. Ruang Lingkup

Sekolah ramah Anak dan Memiliki Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan kota samarinda (Kepala Sekolah atau satgas PPKS)

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

Sebanyak 180 Orang yang terdiri dari Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan Kota samarinda mendapatkan Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)

Samarinda, 11 Desember 2023

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,


Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

PPTK


Emi Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp. (0541) 743307 Kode Pos 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2024

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Jenis Satker	:	APBD & DAK Non Fisik Tahun 2024
Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan Bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran	:	1. Bimtek Lembaga perlindungan Khusus Ramah Anak 2. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training
Alokasi Dana	:	Rp. 164.520.000,-

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban tindak kekerasan.

Lima Arahan Presiden Terhadap Isu Prioritas Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan 5 (Lima) Arahan presiden tersebut dan melihat masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, hal ini terlihat dari Jumlah data

Kasus kekerasan berdasarkan Data Kasus kekerasan melalui Aplikasi SIMFONI Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak Pada tahun 2022 Sebanyak 182 kasus dan Pada tahun 2023 Sebanyak 189 Kasus yang merupakan kasus tertinggi di Kalimantan Timur.

SDM yang berkualitas tentu harus dipersiapkan sejak dari satuan pendidikan terkecil, berawal dari PAUD yg merupakan masa emas anak anak kita dan jenjang sekolah dasar. mempersiapkan SDM yg lebih baik sejak dini harus dipersiapkan dengan membekali anak2 kita menjadi pelajar2 yang Pancasila akan tetapi ada tantangan yg dihadapi dalam satuan pendidikan yaitu tindak kekerasan masih banyak terjadi di sekolah permasalahan inilah yg harus terus ditanggulangi untuk menuju visi presiden RI untuk melahirkan SDM berkualitas.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak. dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak seperti yang tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2021 pasal 3 Ayat 3 tentang perlindungan anak bahwa dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak di Unit Pelaksana Teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada Standar layanan yang dilaksanakan di Lembaga Layanan/UPTD yang ramah anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak – hak Penyandang Disabilitas;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
8. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang.

3. Tujuan Pembentukan dan pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak adalah Meningkatkan pemahaman peserta serta membangun jejaring mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak.

F. Ruang Lingkup

1. Sekolah ramah Anak dan Memiliki Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan kota samarinda (Kepala Sekolah atau satgas PPKS)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Samarinda, Petugas Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak lainnya.
3. Fasilitator Anak di yang terdiri dari Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, Masyarakat Aktif di 10 Kecamatan.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

1. Sebanyak 180 Orang yang terdiri dari Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan Kota Samarinda mendapatkan Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)
2. Sebanyak 45 Orang yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, UPTD PPA, Rumah Sakit, dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat mendapatkan Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Samarinda, Petugas Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga Peneyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak lainnya.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

1. Sebanyak 180 Orang yang terdiri dari Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan Kota Samarinda mendapatkan Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)
2. Sebanyak 45 Orang yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, UPTD PPA, Rumah Sakit, dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat mendapatkan Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus

Samarinda, 14 Maret 2024

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,



Dr. Ibnu Arabi, MM, M.Pd
NIP. 196707131991031013

PPTK



Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP.197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota

Telp. (0541) 743307 Kode Pos 75121

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2024

Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Jenis Satker	:	APBD & DAK Non Fisik Tahun 2024
Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan Bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran	:	1. Bimtek Lembaga perlindungan Khusus Ramah Anak 2. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training 3. Pelatihan Fasilitator Anak
Alokasi Dana	:	Rp. 187.195.000,-

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti anak, baik berupa kekerasan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku secara umum yang pada akhirnya mengakibatkan trauma psikologis bagi korban tindak kekerasan.

Lima Arah Presiden Terhadap Isu Prioritas Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan 5 (Lima) Arahan presiden tersebut dan melihat masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, hal ini terlihat dari Jumlah data Kasus kekerasan berdasarkan Data Kasus kekerasan melalui Aplikasi SIMFONI Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak Pada tahun 2022 Sebanyak 182 kasus dan Pada tahun 2023 Sebanyak 189 Kasus yang merupakan kasus tertinggi di Kalimantan Timur.

SDM yang berkualitas tentu harus dipersiapkan sejak dari satuan pendidikan terkecil, berawal dari PAUD yg merupakan masa emas anak anak kita dan jenjang sekolah dasar. mempersiapkan SDM yg lebih baik sejak dini harus dipersiapkan dengan membekali anak2 kita menjadi pelajar2 yang Pancasila akan tetapi ada tantangan yg dihadapi dalam satuan pendidikan yaitu tindak kekerasan masih banyak terjadi di sekolah permasalahan inilah yg harus terus ditanggulangi untuk menuju visi presiden RI untuk melahirkan SDM berkualitas.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak. dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak seperti yang tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2021 pasal 3 Ayat 3 tentang perlindungan anak bahwa dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak di Unit Pelaksana Teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada Standar layanan yang dilaksanakan di Lembaga Layanan/UPTD yang ramah anak.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak – hak Penyandang Disabilitas;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
8. Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang.

11. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
13. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

C. Permasalahan

Tingginya Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda

D. Analisa/Arah Kebijakan

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) Bagi sekolah ramah anak yang memiliki Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS)
2. Pelatihan Manajemen dan penanganan Kasus bagi Petugas Layanan UPTD. perlindungan Perempuan dan anak serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak lainnya.
3. Pembentukan dan pelatihan Fasilitator Anak di yang terdiri dari Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, Masyarakat Aktif di 10 Kecamatan.

E. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan Bimtek Lembaga perlindungan Khusus Ramah Anak adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak pada lembaga pendidikan.
2. Tujuan dilaksanakannya Pelatihan manajemen dan Penanganan Kasus In House training bagi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Petugas Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta lembaga Layanan Perempuan dan Anak Lainnya adalah untuk mengintegrasikan maupun mengkoordinasikan layanan sehingga penanganan permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

3. Tujuan Pembentukan dan pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak adalah Meningkatkan pemahaman peserta serta membangun jejaring mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak.

F. Ruang Lingkup

1. Sekolah ramah Anak dan Memiliki Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan kota samarinda (Kepala Sekolah atau satgas PPKS)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Samarinda, Petugas Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak lainnya.
3. Fasilitator Anak di yang terdiri dari Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, Masyarakat Aktif di 10 Kecamatan.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (terlampir)

H. Pelaksanaan

Rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Keluaran

1. Sebanyak 180 Orang yang terdiri dari Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKS) di Lingkungan Satuan pendidikan Kota Samarinda mendapatkan Bimbingan Teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)
2. Sebanyak 45 Orang yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, UPTD PPA, Rumah Sakit, dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat mendapatkan Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus.

3. Sebanyak 25 Orang yang terdiri dari Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda, UPTD PPA Kota Samarinda, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, Masyarakat Aktif di 10 Kecamatan mendapatkan Pelatihan Fasilitator Anak.

Samarinda, 3 Juni 2024

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,



Dr. Ibnu Araby, MM, M.Pd
NIP. 198707131991031013

PPTK

Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP. 197408222002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pemasukan +62 823-2442-1313
Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> / dp2pa.samarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75221

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024					
Urusan Pemerintahan	: 2.06 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.06.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.06.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	: 2.06.07.2.02 Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	: 2.06.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Setuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				8,160,000.00
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan				7,480,000.00
	- Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	2	Org/Bln	1,250,000	2,500,000.00
	- Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK)	2	Org/Bln	1,210,000	2,420,000.00
	- Honorarium PPK SKPD	2	Org/Bln	480,000	960,000.00
	- Honorarium Bendshara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	2	Org/Bln	420,000	840,000.00
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	2	Org/Bln	380,000	760,000.00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680,000.00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Org/Bln	340,000	680,000.00
2	Belanja Bahan Pakai Habis				11,770,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				8,582,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	2	Rim	85,000	170,000.00
	- Kertas NCR Folio	5	Rim	65,000	325,000.00
	- Kertas Post It	6	Pos	25,000	150,000.00
	- Trigonal Clips	2	Kotak	48,000	96,000.00
	- Amplop Cabinet	4	Pak	25,000	100,000.00
	- Ball Point Pilot G 2 07	2	Lusin	180,000	360,000.00
	- Binder Clips No. 107	4	Pak	7,000	28,000.00
	- Binder Clips No 200	4	Kotak	22,000	88,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/F4	5	Rim	65,000	325,000.00
	- Map Biola	50	Lember	3,000	150,000.00
	- Spidol Snowman BG 12	2	Lusin	95,000	190,000.00
	- Tinta Printer	6	Botol	100,000	600,000.00
	- Seminar Kit Pelatihan Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	80	buah	75,000	6,000,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				3,188,000.00
	- Belanja Cetak laporan Akhir	2	buku/kali	200,000	400,000.00
	- Fotocopy Kegiatan	2536	buku/kali	500	1,268,000.00
	- Cetak Backdrop	12	M2/kali	100,000	1,200,000.00
	- Cetak Sertifikat	80	lbr/kali	4,000	320,000.00
3	Belanja Jasa Kantor				20,000,000.00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia				19,600,000.00
	- Kegiatan Pelatihan Aktifis Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat				
	- Narasumber dalam daerah Pejabat Eselon III (2 Org x 2 hr x 1 Keg)	8	org/hr/keg	900,000	7,200,000.00
	- Narasumber dalam daerah Pejabat Eselon II (1 Org x 2 hr x 1 Keg)	2	org/hr/keg	1,000,000	2,000,000.00
	- Narasumber Luar Daerah (1 org x3 jam x 1 kegiatan)	6	org/jam/keg	1,000,000	6,000,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Moderator (1 org x 2 jhr x 1 kegiatan)	2	org/hr/keg	700,000	1,400,000.00
	- Pembawa acara (1 org x 1 kegiatan)	1	org/hr/keg	400,000	400,000.00
	- Ketua/wakil ketua (2 Orang x 1 Kegiatan)	2	org/keg	400,000	800,000.00
	- Anggota (5 Orang x 1 Kegiatan)	5	org/keg	300,000	1,500,000.00
	Honorarium Rohaniwan Pelatihan Bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				400,000.00
	Honorarium Rohaniwan (1 Orang X 1 Kegiatan)	1	org/keg	400,000	400,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				94,070,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19,890,000.00
	Perjalanan Dinas Narasumber Luar daerah Pelatihan Bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				7,511,000.00
	- Biaya Taksi di DKI Jakarta (1 org x 2 Kali)	2	orang/kali	256,000	512,000.00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way (1 org x 2 kali)	2	orang/kali	300,000	600,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Jakarta (1 org x 1 kali)	1	orang/kali	3,967,000	3,967,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (1 org x 3 hr)	3	orang/hari	804,000	2,412,000.00
	Perjalanan Dinas Rakor Perlindungan Anak				12,379,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV (1 orang X 1 hari)	1	orang/hari	1,507,000	1,507,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (3 orang X 1 hari)	3	orang/hari	804,000	2,412,000.00
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (One Way) (3 Orang X 2 Kali)	6	orang/kali	550,000	3,300,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (6 orang X 2 hari)	12	orang/hari	430,000	5,160,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				16,800,000.00
	Uang Harian Peserta Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (80 org X 2hr)	160	org/hr	105,000	16,800,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Kota				57,380,000.00
	Paket Meeting Fullday Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (95 org x 2 hr)	190	org/hr	302,000	57,380,000.00
5	Belanja Modal Baju Pengaman				16,000,000.00
	Belanja Modal Baju Pengaman	80	bh/ki	200,000	16,000,000.00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					150,000,000.00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bagis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743397, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman: <http://dp2pa.samarinda.go.id> E-mail: appalintasamarinda@yodoo.com
SAMARINDA 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024					
Urusan	: 2.06 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.06.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.06.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	: 2.06.07.2.02 Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.06.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				129,000,000.00
	- Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik	80	pkt/rl	1,000,000	80,000,000.00
	- Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik	48	pkt/rl	1,000,000	48,000,000.00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				14,064,000.00
	Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik				
	- Nasi Kotak	195	org/keg	48,000	9,360,000.00
	- Snack	196	org/keg	24,000	4,704,000.00
3	Belanja Jasa Kantor				53,200,000.00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia				28,000,000.00
	- Narasumber Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (2 org X 2 jam x 7 Keg)	28	org/jam/keg	1,000,000	28,000,000.00
	Belanja jasa tenaga Ahli				25,200,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Juru Bahasa Isyarat) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (1 org x 1 kali)	1	org/keg	1,800,000	1,800,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Psikolog Forensik) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (1 org x 1 kali)	1	org/keg	1,800,000	1,800,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Psikolog Klinis) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (1 org x 4 kali)	4	org/keg	1,800,000	7,200,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Juru Bahasa Isyarat) BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik (1 org x 1 kali)	1	org/keg	1,800,000	1,800,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Psikolog Forensik) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (1 org x 1 kali)	1	org/keg	1,800,000	1,800,000.00
	- Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Psikolog Klinis) BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik (1 org x 6 kali)	6	org/keg	1,800,000	10,800,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				37,875,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				37,875,000.00
	Transport Peserta Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan (25 org x 7 keg)	175	org/keg	75,000	13,125,000.00
	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik				
	- Transportasi Korban dan Pendamping Dalam Kota (termasuk pendamping keluarga, petugas layanan ASN dan Non ASN) (2 org x 110 kali)	220	org/kali	75,000	16,500,000.00
	- Uang Harian petugas layanan pendamping korban non ASN (1 org x 110 kali)	110	org/kali	75,000	8,250,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
8	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat				1,341,000.00
	Layanan Medikolegal BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik				
	- Visum et Psikiatrum	1	org/kali	135,000	135,000.00
	- Visum et Repertum	1	org/kali	312,000	312,000.00
	Layanan Medikolegal BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik				
	- Visum et Psikiatrum	2	org/kali	135,000	270,000.00
	- Visum et Repertum	2	org/kali	312,000	624,000.00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					235,400,000.00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) TAHUN 2024

PROGRAM : 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak

KEGIATAN : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
I	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				12.390.000
	1 - Honorarium PA	4	bulan	625.000	2.500.000
	2 - Honorarium PPTK	6	bulan	605.000	3.630.000
	3 - Honorarium PPK SKPD	4	bulan	480.000	1.920.000
	4 - Honorarium Bendahara Pengeluaran	4	bulan	420.000	1.680.000
	5 - Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	7	bulan	380.000	2.660.000
II	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				680.000
	1 - Honorarium PPBJ (1 org x 2 bln)	4	bulan	170.000	680.000
III	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				7.898.500
	1 - Kertas HVS 70gr Folio/F4	13	Rim	85.000	1.105.000
	2 - Kertas NCR Folio	11	Rim	65.000	715.000
	3 - Kertas Post It (Besar)	2	Pcs	25.000	50.000
	4 - Amplop Cabinet	6	Pak	25.000	150.000
	5 - Ballpoint Pilot G 2 07	4	Lusin	180.000	720.000
	6 - Binder Clips Besar	2	Kotak	65.000	130.000
	7 - Binder Clips Kecil	3	Kotak	45.000	135.000
	8 - Gunting Biasa Besar	2	Buah	37.500	75.000
	9 - Kertas HVS 70gr Kwarto/A4	10	Rim	65.000	650.000
	10 - Map Biasa/Map Jago	103	Lembar	500	51.500
	11 - Map Biola	404	Lembar	3.000	1.212.000
	12 - Map Seminar Olan City	11	Buah	25.000	275.000
	13 - Materai	23	Buah	10.000	230.000
	14 - Tinta Printer	6	Botol	100.000	600.000
	15 - Tinta Epson 001 Hitam	4	Botol	150.000	600.000
	16 - Tinta Epson 001 Warna	8	Botol	150.000	1.200.000
IV	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				7.250.000
	1 - Cetak Buku Laporan Akhir	3	buku	250.000	750.000
	2 - Cetak Buku Laporan Siga	20	buku	150.000	3.000.000
	3 - Cetak Spanduk Bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	1	Buah	500.000	500.000
	4 - Fotocopy Hitam Putih A4/F4	6.000	Lembar	500	3.000.000
V	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				16.200.000
	Makan dan Minum Rapat Bidang PKA				
	- Snack	15	Orang	24.000	360.000
	- Nasi Kotak	15	Orang	48.000	720.000
	Makan dan Minum Pelatihan Admin dan Operator Simfoni PPA				
	- Snack (30 org x 1 kali)	30	Orang	24.000	720.000
	- Nasi Kotak (30 org x 1 kali)	30	Orang	48.000	1.440.000
	Makan dan Minum Rapat Penyusunan Profil Data SIGA				
	- Snack (90 org x 2 kali)	180	Orang	24.000	4.320.000
	- Nasi Kotak (90 org x 2 kali)	180	Orang	48.000	8.640.000
VI	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				11.200.000
	-Honorarium Narasumber Pelatihan Simfoni (2 org x 1 jam x 1 kl)	2	Orang	900.000	1.800.000
	Kegiatan FGD Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data SIGA				
	-Honorarium Narasumber	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000
	-Honorarium Moderator	2	Kegiatan	700.000	1.400.000
	-Honorarium Pembawa Acara	2	Kegiatan	400.000	800.000
	-Honorarium Ketua/Wakil Ketua	4	Kegiatan	400.000	1.600.000
	-Honorarium Sekretaris/Anggota	12	Kegiatan	300.000	3.600.000

VII	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				38.700.000
	-Honorarium Penanggung Jawab	6	Bulan	700.000	4.200.000
	-Honorarium Ketua	6	Bulan	650.000	3.900.000
	-Honorarium Wakil Ketua	6	Bulan	600.000	3.600.000
	-Honorarium Sekretaris	6	Bulan	500.000	3.000.000
	-Honorarium Anggota (8 Orang x 6 Bulan)	48	Bulan	500.000	24.000.000
VIII	Belanja Jasa Tenaga Ahli				57.029.500
	- Honorarium Admin dan Operator Penginput Data Simfoni (5 org x 10 bln)	50	Bulan	500.000	25.000.000
	- Honorarium Penyusun dan Analisis Buku Profil Data Gender dan Anak (1 bln x 1 kl)	1	Bulan	32.029.500	32.029.500
IX	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				50.002.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan Simfoni PPA				
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kab/Kota di Kalimantan Timur (1 org x 2 kali)	2	Orang	550.000	1.100.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur (1 org x 1 malam)	1	Orang	804.000	804.000
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (2 org x 2 hari)	4	Orang	430.000	1.720.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Surabaya untuk Kegiatan Rakor SIGA				
	- Biaya Taksi di Jawa Timur (2 org x 2 kali)	4	Orang	194.000	776.000
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (2 org x 2 kali)	4	Orang	300.000	1.200.000
	- Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur (6 org x 3 hari)	18	Orang	410.000	7.380.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV (1 org x 2 malam)	2	Orang	1.076.000	2.152.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS (2 org x 2 malam)	4	Orang	664.000	2.656.000
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda-Surabaya (6 org x 1 kali)	6	Orang	5.369.000	32.214.000
X	Belanja Modal Personal Computer				30.000.000
	Komputer / PC / All In One	2	Unit	15.000.000	30.000.000
XI	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				15.000.000
	Scanner Kecil	1	Unit	15.000.000	15.000.000
XII	Belanja Modal Personal Computer				3.650.000
	Flashdisk 64 GB	2	Buah	225.000	450.000
	UPS	2	Unit	1.600.000	3.200.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					250.000.000

Samarinda2024

Kepala Dinas P2PA Kota Samarinda sebagai PPKom



Dr. Ibnu Araby, MM, Pd

NIP.19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PERUBAHAN TAHUN 2024

PROGRAM : 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak

KEGIATAN : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
I	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				10.420.000
1	- Honorarium PA	4	bulan	625.000	2.500.000
2	- Honorarium PPTK	4	bulan	605.000	2.420.000
3	- Honorarium PPK SKPD	4	bulan	480.000	1.920.000
4	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	4	bulan	420.000	1.680.000
5	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	5	bulan	380.000	1.900.000
II	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				850.000
1	- Honorarium PPBJ (1 org x 2 bln)	5	bulan	170.000	850.000
III	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				7.898.500
1	- Kertas HVS 70gr Folio/F4	13	Rim	85.000	1.105.000
2	- Kertas NCR Folio	11	Rim	65.000	715.000
3	- Kertas Post It (Besar)	2	Pcs	25.000	50.000
4	- Amplop Cabinet	6	Pak	25.000	150.000
5	- Ballpoint Pilot G 2 07	4	Lusin	180.000	720.000
6	- Binder Clips Besar	2	Kotak	65.000	130.000
7	- Binder Clips Kecil	3	Kotak	45.000	135.000
8	- Gunting Biasa Besar	2	Buah	37.500	75.000
9	- Kertas HVS 70gr Kwarto/A4	10	Rim	65.000	650.000
10	- Map Biasa/Map Jago	103	Lembar	500	51.500
11	- Map Biola	404	Lembar	3.000	1.212.000
12	- Map Seminar Ofian City	11	Buah	25.000	275.000
13	- Materai	23	Buah	10.000	230.000
14	- Tinta Printer	6	Botol	100.000	600.000
15	- Tinta Epson 001 Hitam	4	Botol	150.000	600.000
16	- Tinta Epson 001 Warna	8	Botol	150.000	1.200.000
IV	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				7.199.000
1	- Cetak Buku Laporan Akhir	3	buku	250.000	750.000
2	- Cetak Buku Laporan Siga	24	buku	150.000	3.600.000
3	- Cetak Spanduk Bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	-	Buah	500.000	-
4	- Fotocopy Hitam Putih A4/F4	5.698	Lembar	500	2.849.000
V	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				14.040.000
	Makan dan Minum Rapat Bidang PKA				
	- Snack	15	Orang	24.000	360.000
	- Nasi Kotak	15	Orang	48.000	720.000
	Makan dan Minum Pelatihan Admin dan Operator Simfoni PPA				
	- Snack (30 org x 1 kali)	-	Orang	24.000	-
	- Nasi Kotak (30 org x 1 kali)	-	Orang	48.000	-
	Makan dan Minum Rapat Penyusunan Profil Data SIGA				
	- Snack (90 org x 2 kali)	180	Orang	24.000	4.320.000
	- Nasi Kotak (90 org x 2 kali)	180	Orang	48.000	8.640.000
VI	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.400.000
	-Honorarium Narasumber Pelatihan Simfoni (2 org x 1 jam x 1 kl)	-	Orang	900.000	-
	Kegiatan FGD Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data SIGA				
	-Honorarium Narasumber	2	Kegiatan	1.000.000	2.000.000
	-Honorarium Moderator	2	Kegiatan	700.000	1.400.000
	-Honorarium Pembawa Acara	2	Kegiatan	400.000	800.000
	-Honorarium Ketua/Wakil Ketua	4	Kegiatan	400.000	1.600.000
	-Honorarium Sekretaris/Anggota	12	Kegiatan	300.000	3.600.000

VII	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	-Honorarium Penanggung Jawab	-	Bulan	700.000	-
	-Honorarium Ketua	-	Bulan	650.000	-
	-Honorarium Wakil Ketua	-	Bulan	600.000	-
	-Honorarium Sekretaris	-	Bulan	500.000	-
	-Honorarium Anggota (8 Orang x 6 Bulan)	-	Bulan	500.000	-
VIII	Belanja Jasa Tenaga Ahli				59.529.500
	- Honorarium Admin dan Operator Penginput Data Simfoni (5 org x 11 bln)	55	Bulan	500.000	27.500.000
	- Honorarium Penyusun dan Analisis Buku Profil Data Gender dan Anak (1 bln x 1 kl)	1	Bulan	32.029.500	32.029.500
IX	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				62.013.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelatihan Simfoni PPA				
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kab/Kota di Kalimantan Timur (1 org x 3 kali)	3	Orang	550.000	1.650.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur (1 org x 1 malam)	1	Orang	804.000	804.000
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (2 org x 2 hari)	4	Orang	430.000	1.720.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Surabaya untuk Kegiatan Rakor SIGA				
	- Biaya Taksi di Jawa Timur (2 org x 2 kali)	4	Orang	194.000	776.000
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (2 org x 2 kali)	4	Orang	300.000	1.200.000
	- Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur (6 org x 3 hari)	18	Orang	410.000	7.380.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV (1 org x 2 malam)	2	Orang	1.076.000	2.152.000
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (2 org x 2 malam)	4	Orang	664.000	2.656.000
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda-Surabaya (4 org x 1 kali)	4	Orang	5.369.000	21.476.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta untuk Kegiatan Rakor SIMFONI PPA				
	- Biaya Taksi di DKI Jakarta (2 org x 2 kali)	4	Orang	256.000	1.024.000
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way (2 org x 2 kali)	4	Orang	250.000	1.000.000
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Jakarta (3 org x 1 kali)	3	Orang	3.987.000	11.961.000
	- Tarif Hotel di Provinsi DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV (1 org x 2 malam)	2	Orang	992.000	1.984.000
	- Tarif Hotel di Provinsi DKI Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (1 org x 2 malam)	2	Orang	730.000	1.460.000
	- Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta (3 org x 3 hari)	9	Orang	530.000	4.770.000
X	Belanja Modal Personal Computer				30.000.000
	Komputer / PC / All In One	2	Unit	15.000.000	30.000.000
XI	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				15.000.000
	Scanner Kecil	1	Unit	15.000.000	15.000.000
XII	Belanja Modal Personal Computer				3.650.000
	Flashdisk 64 GB	2	Buah	225.000	450.000
	UPS	2	Unit	1.600.000	3.200.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					220.000.000

Samarinda, 2024

Kepala Dinas P2PA Kota Samarinda sebagai PPKom



Dr. Ibnu Araby, MM, Pd
NIP. 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
 Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
 Kecamatan Samarinda Kota
 Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
 Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el: dp2pa.samarinda@yahoo.com
 S A M A R I N D A 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
Urusan Pemerintahan	: 2.08 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				8,840,000.00
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan				7,480,000.00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	2	Org/Bln	1,250,000	2,500,000.00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)	2	Org/Bln	1,210,000	2,420,000.00
	Honorarium PPK SKPD	2	Org/Bln	480,000	960,000.00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan	2	Org/Bln	420,000	840,000.00
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	2	Org/Bln	380,000	760,000.00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1,360,000.00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Org/Bln	680,000	1,360,000.00
2	Belanja Bahan Pakai Habis				31,506,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				8,959,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				8,959,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	3	Rim	85,000	255,000.00
	- Kertas NCR Folio	8	Rim	65,000	390,000.00
	- Kertas Post It	10	Pcs	25,000	250,000.00
	- Trigonal Clips	2	Kotak	48,000	96,000.00
	- Amplop Cabinet	6	Pak	25,000	150,000.00
	- Ball Point Pilot G 2 07	2	Lusin	180,000	360,000.00
	- Binder Clips Kecil	3	Kotak	45,000	135,000.00
	- Binder Clips No. 107	4	Kotak	7,000	28,000.00
	- Binder Clips No 200	5	Kotak	22,000	110,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarta/F4	10	Rim	65,000	650,000.00
	- Map Biola	100	Lembar	3,000	300,000.00
	- Spidol Snowman BG 12	3	Lusin	95,000	285,000.00
	- Gunting Biasa Besar	2	buah	37,500	75,000.00
	- Tinta Printer	10	Botol	100,000	1,000,000.00
	- Seminar Kit Peserta Birnatek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) (65 bh X 1 kegiatan)	65	Buah/Keg	75,000	4,875,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				10,247,000.00
	- Cetak laporan Akhir	2	buku	200,000	400,000.00
	- Cetak laporan Akhir DAK Non Fisik	2	buku	200,000	400,000.00
	- Fotocopy Kegiatan	4152	lembar	500	2,076,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	- Fotocopy Kegiatan DAK Non Fisik	11482	lembar	500	5,731,000.00
	- Cetak Backdrop (12 M2 X 1 kegiatan)	12	M2/keg	100,000	1,200,000.00
	- Cetak Sertifikat Bimtek LPKRA	65	Lbr/Keg	4,000	260,000.00
	- Cetak Sertifikat Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	45	Lbr/Keg	4,000	180,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,000,000.00
	- Nasi Kotak (25 orang X1 Kegiatan)	25	org/Keg	48,000	1,200,000.00
	- Snack (25 orang X 1 Kegiatan)	25	org/Keg	24,000	600,000.00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional				10,500,000.00
	seragam Batik	15	pcs	700,000	10,500,000.00
3	Belanja Jasa Kantor				22,500,000.00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia				22,100,000.00
	Honorarium Moderator Bimtek LPKRA	1	org/keg	700,000	700,000.00
	Honorarium Pembawa Acara Bimtek LPKRA	1	org/keg	400,000	400,000.00
	Honorarium Narasumber Dalam Daerah Bimtek LPKRA	3	org/jam/Keg	1,000,000	3,000,000.00
	Honorarium Narasumber Luar Daerah Bimtek LPKRA (2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan)	4	org/jam/Keg	1,000,000	4,000,000.00
	Honorarium Panitia Kegiatan Bimtek LPKRA				
	- Ketua/Wakil Ketua	2	org/keg	400,000	800,000.00
	- Sekretaris/Anggota	4	org/keg	300,000	1,200,000.00
	Narasumber Luar daerah Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training DAK Non Fisik	12	org/jam	1,000,000	12,000,000.00
	- Honorarium Rohaniwan Pelatihan Bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				400,000.00
	Honorarium Rohaniwan	1	org/keg	400,000	400,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				101,674,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				28,489,000.00
	Perjalanan Dinas Rakor Perlindungan Khusus Anak				17,080,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV	2	org/hr	1,507,000	3,014,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (2 orang X 2 Kegiatan)	4	org/hr	804,000	3,216,000.00
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (One Way) (2 orang x 2 kali x 2 Kegiatan)	8	org/kl	550,000	4,400,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (3 orang x 2 hari x 2 kegiatan)	12	org/hr	430,000	5,160,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (3 orang x 2 kegiatan)	3	org/hr	430,000	1,290,000.00
	Perjalanan Dinas LPKRA ke Kutai Kertanegara				2,720,000.00
	- Transportasi ke Kabupaten Kutai Kertanegara	2	org/kali	500,000	1,000,000.00
	- Uang harian luar kota di Kalimantan Timur	4	org/hr	430,000	1,720,000.00
	Perjalanan Narasumber Luar daerah Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House training DAK Non Fisik				8,689,000.00
	- Biaya Taksi di Jawa Timur	2	org/keg	194,000	388,000.00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur	2	org/keg	250,000	500,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Surabaya	1	org/keg	5,369,000	5,369,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	3	org/hr	804,000	2,412,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				18,900,000.00
	Uang Harian Peserta Bimtek LPKRA (90 org x 2 Kegiatan)	180	org/kg	105,000	18,900,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Kota				83,420,000.00
	Paket Meeting Fullday Bimtek LPKRA (105 org X 2 hr X 2 Kegiatan)	210	org/kg	302,000	83,420,000.00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					250,000,000.00

Samarinda, Desember 2023
 Kepala DP2PA
 Dr. Ibnu Arabi, M.M.Pd
 NIP. 196707131991031013





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
 Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
 Kecamatan Samarinda Kota
 Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
 Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el: dp2pa@samarinda.go.id
S A M A R I N D A 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
Urusan Pemerintahan	: 2.08 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	: 2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan Kspasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				12,240,000.00
	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan				11,220,000.00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	3	Org/Bln	1,250,000	3,750,000.00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK)	3	Org/Bln	1,210,000	3,630,000.00
	Honorarium PPK SKPD	3	Org/Bln	480,000	1,440,000.00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan	3	Org/Bln	420,000	1,260,000.00
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	3	Org/Bln	380,000	1,140,000.00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1,020,000.00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3	Org/Bln	340,000	1,020,000.00
2	Belanja Bahan Pakai Habis				57,541,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				17,584,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				17,584,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	3	Rim	85,000	255,000.00
	- Kertas NCR Folio	6	Rim	65,000	390,000.00
	- Kertas Post It	10	Pcs	25,000	250,000.00
	- Trigonal Clips	2	Kotak	48,000	96,000.00
	- Amplop Cabinet	6	Pak	25,000	150,000.00
	- Ball Point Pilot G 2 07	2	Lusin	180,000	360,000.00
	- Binder Clips Kecil	3	Kotak	45,000	135,000.00
	- Binder Clips No. 107	4	Kotak	7,000	28,000.00
	- Binder Clips No 200	5	Kotak	22,000	110,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/F4	10	Rim	65,000	650,000.00
	- Map Biola	100	Lembar	3,000	300,000.00
	- Spidol Snowman BG 12	3	Lusin	95,000	285,000.00
	- Gunting Blesa Besar	2	buah	37,500	75,000.00
	- Tinta Printer	10	Botol	100,000	1,000,000.00
	- Seminar Kit Peserta Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) (90 bh X 2 kegiatan)	180	Buah/Keg	75,000	13,500,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				25,857,000.00
	- Brosur Perlindungan Khusus Anak	800	pcs	22,000	18,800,000.00
	- Belanja Cetak laporan Akhir	2	buku	200,000	400,000.00
	- Fotocopy Kegiatan	4914	lembar	500	2,457,000.00
	- Cetak Backdrop (12 M2 X 2 kegiatan)	24	M2/keg	100,000	2,400,000.00
	- Cetak Sertifikat	200	Lbr/Keg	4,000	800,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3,800,000.00
	- Nasi Kotak (25 orang X 2 Kegiatan)	50	org/Keg	48,000	2,400,000.00
	- Snack (25 orang X 2 Kegiatan)	50	org/Keg	24,000	1,200,000.00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional				10,500,000.00
	seragam Batik	15	pcs	700,000	10,500,000.00
3	Belanja Jasa Kantor				24,800,000.00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panita				24,000,000.00
	Honorarium Moderator Bimtek LPKRA (1 orang x 2 Kegiatan)	2	org/keg	700,000	1,400,000.00
	Honorarium Pembawa Acara Bimtek LPKRA (1 Orang X 2 Kegiatan)	2	org/keg	400,000	800,000.00
	Honorarium Narasumber Dalam Daerah Bimtek LPKRA (2 org x 2 Jam x 2 Kegiatan)	8	org/jam/Keg	1,000,000	8,000,000.00
	Honorarium Narasumber Luar Daerah Bimtek LPKRA (1 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan)	8	org/jam/keg	1,000,000	8,000,000.00
	Honorarium Panitia Kegiatan Bimtek LPKRA				
	- Ketua/Wakil Ketua	4	org/keg	400,000	1,600,000.00
	- Sekretaris/Anggota	14	org/keg	300,000	4,200,000.00
	- Honorarium Rohaniwan Pelatihan Bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				800,000.00
	Honorarium Rohaniwan (1 orang X 2 Kegiatan)	2	org/keg	400,000	800,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				155,419,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				73,089,000.00
	Perjalanan Dinas Rakor Perlindungan Khusus Anak				12,379,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV	1	org/hr	1,507,000	1,507,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (3 orang X 1 hari)	3	org/hr	804,000	2,412,000.00
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (One Way) (3 orang x 2 kali)	6	org/kd	550,000	3,300,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (6 orang x 2 hari)	12	org/hr	430,000	5,160,000.00
	Perjalanan Narasumber Luar daerah Bimtek LPKRA				14,014,000.00
	- Biaya Taksi di DKI Jakarta	4	org/keg	256,000	1,024,000.00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (1 orang x 2 kali x 2 kegiatan)	4	org/keg	450,000	1,800,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Jakarta	2	org/keg	3,987,000	7,974,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	4	org/hr	804,000	3,216,000.00
	Perjalanan Dinas Rakor Lembaga Perlindungan Ramah Anak				46,706,000.00
	- Biaya Taksi di Jawa Barat (3 Orang x 2 kali)	6	org/kali	166,000	996,000.00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (3 orang x 2 kali)	6	org/kali	450,000	2,700,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Bandung	6	org/kali	4,908,000	29,448,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Barat Pejabat Eselon III/Golongan IV	2	org/hr	1,201,000	2,402,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Jawa Barat Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS (3 orang X 2 hari)	6	org/hr	570,000	3,420,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Jawa Barat (6 orang x 3 hari)	18	org/hr	430,000	7,740,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota:				15,825,000.00
	Uang Harian Peserta Bimtek LPKRA (65 org x 1 Kegiatan)	65	org/keg	105,000	6,825,000.00
	Transport Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House training DAK Non Fisik (45 orang X 2 hari)	90	org/hr	100,000	9,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Kota				57,380,000.00
	Paket Meeting Fullday Bimtek LPKRA	80	org/keg	302,000	24,160,000.00
	Paket Meeting Fullday Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training DAK Non Fisik	110	org/keg	302,000	33,220,000.00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					164,520,000.00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
 Telp/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
 Laman : <http://dp2pa.samarinda.go.id> Pos-el: dp2pa.kotasarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
Urusan	: 2.08 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Pemerintahan					
Unit Organisasi	: 2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	: 2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub. Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				8,840,000.00
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan				7,480,000.00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	2	Org/Bln	1,250,000	2,500,000.00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK)	2	Org/Bln	1,210,000	2,420,000.00
	Honorarium PPK SKPD	2	Org/Bln	480,000	960,000.00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan	2	Org/Bln	420,000	840,000.00
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	2	Org/Bln	380,000	760,000.00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1,360,000.00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Org/Bln	680,000	1,360,000.00
2	Belanja Bahan Pakai Habis				33,188,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				9,659,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor				9,659,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	3	Rim	85,000	255,000.00
	- Kertas NCR Folio	6	Rim	65,000	390,000.00
	- Kertas Post It	10	Pcs	25,000	250,000.00
	- Trigonal Clips	2	Kotak	48,000	96,000.00
	- Amplop Cabinet	6	Pak	25,000	150,000.00
	- Ball Point Pilot G 2.07	2	Lusin	180,000	360,000.00
	- Binder Clips Kecil	3	Kotak	45,000	135,000.00
	- Binder Clips No. 107	4	Kotak	7,000	28,000.00
	- Binder Clips No 200	5	Kotak	22,000	110,000.00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/F4	10	Rim	65,000	650,000.00
	- Map Biola	100	Lembar	3,000	300,000.00
	- Spidol Snowman BG 12	3	Lusin	95,000	285,000.00
	- Gunting Biasa Besar	2	buah	37,500	75,000.00
	- Tinta Printer	10	Botol	100,000	1,000,000.00
	- Seminar Kit Peserta Bimtek Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) (65 bh X 1 kegiatan)	65	Buah/Keg	75,000	4,875,000.00
	- Seminar Kit Peserta Pelatihan Fasilitator Anak (25 bh X 1 kegiatan)	25	Buah/Keg	28,000	700,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				11,347,000.00
	- Cetak laporan Akhir	2	buku	200,000	400,000.00
	- Cetak laporan Akhir DAK Non Fisik	2	buku	200,000	400,000.00
	- Fotocopy Kegiatan	4152	lembar	500	2,076,000.00
	- Fotocopy Kegiatan DAK Non Fisik	11462	lembar	500	5,731,000.00
	- Cetak Backdrop (12 M2 X 1 kegiatan)	12	M2/keg	100,000	1,200,000.00
	- Cetak Sertifikat Bimtek LPKRA	65	Lbr/Keg	4,000	260,000.00
	- Cetak Sertifikat Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	45	Lbr/Keg	4,000	180,000.00
	- Buku saku perlindungan Khusus Anak	50	Lbr/Keg	22,000	1,100,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12,180,000.00
	Makan Minum Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak				
	- Prasmanan	70	org/keg	110,000	7,700,000.00
	- Snack	140	org/keg	32,000	4,480,000.00
3	Belanja Jasa Kantor				36,500,000.00
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia				36,100,000.00
	Honorarium Moderator Bimtek LPKRA	1	org/keg	700,000	700,000.00
	Honorarium Pembawa Acara Bimtek LPKRA	1	org/keg	400,000	400,000.00
	Honorarium Narasumber Dalam Daerah Bimtek LPKRA	3	org/jam/Keg	1,000,000	3,000,000.00
	Honorarium Narasumber Luar Daerah Bimtek LPKRA (2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan)	4	org/jam/Keg	1,000,000	4,000,000.00
	Honorarium Panitia Kegiatan Bimtek LPKRA				
	- Ketua/Wakil Ketua	2	org/keg	400,000	800,000.00
	- Sekretaris/Anggota	4	org/keg	300,000	1,200,000.00
	Narasumber Luar daerah Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training DAK Non Fisik	12	org/jam	1,000,000	12,000,000.00
	Narasumber Luar daerah Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak	10	org/jam	1,000,000	10,000,000.00
	Narasumber Dalam daerah Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak	4	org/jam	1,000,000	4,000,000.00
	- Honorarium Rohaniwan Pelatihan Bagi Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				400,000.00
	Honorarium Rohaniwan	1	org/keg	400,000	400,000.00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				108,968,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				37,588,000.00
	Perjalanan Dinas Rakor Perlindungan Khusus Anak				17,080,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon III/Golongan IV	2	org/hr	1,507,000	3,014,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/Non PNS (2 orang X 2 Kegiatan)	4	org/hr	804,000	3,216,000.00
	- Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (One Way) (2 orang x 2 kali x 2 Kegiatan)	8	org/kd	550,000	4,400,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (3 orang x 2 hari x 2 kegiatan)	12	org/hr	430,000	5,160,000.00
	- Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur (3 orang x 2 kegiatan)	3	org/hr	430,000	1,290,000.00
	Perjalanan Dinas LPKRA ke Kutai Kertanegara				2,720,000.00
	- Transportasi ke Kabupaten Kutai Kertanegara	2	org/kali	500,000	1,000,000.00
	- Uang harian luar kota di Kalimantan Timur	4	org/hr	430,000	1,720,000.00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perjalanan Narasumber Luar daerah Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House training DAK Non Fisik				8,669,000.00
	- Biaya Taksi di Jawa Timur	2	org/keg	194,000	388,000.00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur	2	org/keg	250,000	500,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Samarinda ke Surabaya	1	org/keg	5,369,000	5,369,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	3	org/hr	804,000	2,412,000.00
	Perjalanan Narasumber Luar daerah Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak				9,119,000.00
	- Biaya Taksi di Riau	2	org/keg	101,000	202,000.00
	- Biaya Taksi dari Samarinda Ke Kota Balikpapan	2	org/keg	600,000	1,200,000.00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP dari Balikpapan ke Batam	1	org/keg	5,305,000	5,305,000.00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	3	org/hr	804,000	2,412,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				14,000,000.00
	Transport Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House training DAK Non Fisik (45 orang X 2 hari)	90	org/hr	100,000	9,000,000.00
	Transport Peserta Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak	50	org/hr	100,000	5,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Kota				57,380,000.00
	Paket Meeting Fullday Bimtek LPKRA	80	org/keg	302,000	24,160,000.00
	Paket Meeting Fullday Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus In House Training DAK Non Fisik	110	org/keg	302,000	33,220,000.00
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				187,195,000.00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
 Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
 Kecamatan Samarinda Kota
 Telp/Fax (0541) 743387, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
 Laman : <http://dp2pa.samarindakota.go.id> / pus-el-dppkasamarindakota@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

RENCANA ANGGARAN BIAYA					
Urusan Pemerintahan : 2.06 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda					
Program : 2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
Sub. Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan Kerja sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota layak Anak , Kecamatan layak Anak, Desa/Kelurahan layak Anak dan DRPPA					
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Setuan	Tarif/Harga	
1	2	3		5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				4.479.000,00
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan				4.136.000,00
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	2	Org/Bln	520.000	1.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)	2	Org/Bln	505.000	1.010.000,00
	Honorarium PPK SKPD	2	Org/Bln	400.000	800.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan	2	Org/Bln	340.000	680.000,00
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu	2	Org/Bln	300.000	600.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				340.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	Org/Bln	170.000	340.000,00
2	Belanja Barang Pakai Habis				4.155.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				2.321.000,00
	(#) Belanja Alat Tulis Kantor				2.321.000,00
	Kertas HVS 70 gram Folio F4	6	Rim	85.000	510.000,00
	Kertas NCR Folio	7	Rim	65.000	455.000,00
	Ball Point Pilot G 2 07	1	Lusin	180.000	180.000,00
	Binder Clipse Kecil	2	Kotak	45.000	90.000,00
	Kertas HVS 70 gram Kwarta F4	5	Rim	65.000	325.000,00
	Map Bkole	87	Lembar	3.000	261.000,00
	Tinta Printer	5	Bokor	100.000	500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				1.834.000,00
	- Belanja Cetak Buku laporan Akhir				
	laporan akhir	3	buku	250.000	750.000,00
	- Fotocopy Kegiatan				
	Foto Copy A4 F4	1568	lembar	500	784.000,00
	- Cetak Backdrop				
	Cetak Spanduk Bahan Vinyl ukuran 4 M X 1m	1	Buah	300.000	300.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				33.600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				-
	- Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak				
	Beban Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak)	50 org X 14 Keg	org/ kegiatan	48.000	33.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3		5	6 = (3 x 5)
4	Belanja Jasa				31.300.000,00
	Belanja Jasa Kantor				31.300.000,00
	- Honorarium Nara Sumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				31.300.000,00
	Honorarium Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Pertindungan Khusus Anak/ Spesifikasi : Nara Sumber/Pembahas	1 orang X 14 kegiatan	orang/kegiatan	900.000	12.600.000,00
	Beban Honorarium Nara sumber atau Pembahas, Moderator, dan Panitia/ Spesifikasi Ketua/Wakil Ketua	2 orang X 11 kegiatan	orang/kegiatan	400.000	8.800.000,00
	Beban Honorarium Nara sumber atau Pembahas, Moderator, dan Panitia/ Spesifikasi Sukmawati/Anonot	3 orang X 11 Kegiatan	orang/kegiatan	300.000	9.900.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.475.000,00
	- Rapat Koordinasi DP2PA se Kalimantan Timur				10.475.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang X 1 Hari	orang/hari	1.507.000	1.507.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang X 1 Hari	orang/hari	804.000	1.608.000,00
	- Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang X 2 Kali	orang/kali	550.000	2.200.000,00
	- Spesifikasi : Transportasi Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tuluani(OneWay) Samarinda ke kota				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6 Orang x 2 Hari	orang/kali	430.000	5.160.000,00
	- Spesifikasi : Transportasi Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan(OneWay) Samarinda ke kota Balikpapan				
JUMLAH ANGGAHAN NEGSIATAN					84.000.000,00





REKAPITULASI HARGA HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 5.750.000		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp 2.072.500		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.917.000		
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 112.500.000		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.200.000		
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Seretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 31.000.000		
	JUMLAH	Rp 160.439.500		

TERBILANG : Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah



PENGUJUT ANGGARAN

Dr. Ilham Azzahy, MM, Pd

NIP. 19670713 199103 1 013

Samarinda, 08 Januari 2024
PPTK

Syarifuddin Nur, S.E., M.M
NIP. 19741105 200112 1 009



**REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
ANGGARAN PERUBAHAN**

Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 5.020.000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp 2.122.500		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.917.000		
5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 112.500.000		
	JUMLAH	Rp 122.239.500		

TERBILANG : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah



PENGUNA ANGGARAN
Dr. H. H. Araby, MM, Pd
NIP. 19670713 199103 1 013

Samarinda, 10 Oktober 2024
PPTK

Awe Ulul, S.KM., M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



REKAPITULASI HARGA HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 5.750.000		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp 3.734.500		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.626.500		
4	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 15.000.000		
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 22.200.000		
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 39.475.000		
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 11.250.000		
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 60.400.000		
	JUMLAH	Rp 160.436.000		

TERBILANG : Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah



Samarinda, 08 Januari 2024
PPTK


Syarifuddin Nur, S.E., M.M.
NIP. 19741105 200112 1 009



**REKAPITULASI HARGA
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
ANGGARAN PERUBAHAN**

Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TKDN	NILAI TKDN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 5.020.000		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp 3.734.500		
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.856.500		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.920.000		
6	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 15.000.000		
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 14.100.000		
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 39.475.000		
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 11.250.000		
10	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 60.400.000		
	JUMLAH	Rp 160.436.000		

TERBILANG : Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah



Samarinda, 10 Oktober 2024

PPTK

Awe Ului, S.KM., M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

UNIT KERJA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	:	APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	:	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	:	JUMLAH PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK
ALOKASI DANA	:	Rp 160.439.500 (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

A. Latar Belakang :

Perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dalam situasi bencana, perempuan sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, perempuan sering dihadapkan dalam situasi darurat yang menyebabkan mereka rentan ditelantarkan dan mengalami kekerasan terutama pada saat dalam kondisi darurat. Pada situasi tersebut, perempuan menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelecehan seksual, kekerasan, maupun penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,

B. Permasalahan :

Masih rendahnya fasilitas dan penanganan yang responsif gender, dan dalam hal pemberian bantuan dan kebutuhan masih bersifat umum.

C. Analisa / Arah Kebijakan :

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2025 anggaran dapat meningkat dalam pemberian bantuan yang spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

D. Tujuan :

1. Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
2. Tersedianya bantuan yang dibutuhkan dan utama spesifik untuk perempuan korban kekerasan dan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
3. Mengoptimalkan peran Kota Samarinda dalam penanganan spesifik untuk perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang responsive gender.

E. Ruang Lingkup :

1. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.
10. Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

11. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

- Terlampir

H. Pelaksanaan :

Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024

I. Hasil Keluaran :

1. Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2024
2. Laporan bulanan kegiatan
3. Laporan penanganan dan bantuan yang diberikan

SUB KOORDINATOR



Amelia Indah Larasati, S.E. M.Si
NIP. 19820405 200701 2 011

Samarinda, 08 Januari 2024



Syaifuldin Nur, S.E., M.M
NIP. 19741105 200112 1 009



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

UNIT KERJA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	:	APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	:	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	:	JUMLAH PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK
ALOKASI DANA	:	Rp 122.239.500 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

A. Latar Belakang :

Perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dalam situasi bencana, perempuan sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, perempuan sering dihadapkan dalam situasi darurat yang menyebabkan mereka rentan ditelantarkan dan mengalami kekerasan terutama pada saat dalam kondisi darurat. Pada situasi tersebut, perempuan menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelecehan seksual, kekerasan, maupun penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

B. Permasalahan :

Masih rendahnya fasilitas dan penanganan yang responsif gender, dan dalam hal pemberian bantuan dan kebutuhan masih bersifat umum.

C. Analisa / Arah Kebijakan :

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2025 anggaran dapat meningkat dalam pemberian bantuan yang spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

D. Tujuan :

1. Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
2. Tersedianya bantuan yang dibutuhkan dan utama spesifik untuk perempuan korban kekerasan dan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
3. Mengoptimalkan peran Kota Samarinda dalam penanganan spesifik untuk perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang responsive gender.

E. Ruang Lingkup :

1. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.
10. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 Tahun 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.
12. Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 08 Oktober 2024.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

- Terlampir

H. Pelaksanaan :

Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024

I. Hasil Keluaran :

1. Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2024
2. Penyusunan RKA-P dan DPA-P Tahun 2024
3. Laporan bulanan kegiatan
4. Laporan penanganan dan bantuan yang diberikan

SUB KOORDINATOR



Amelia Indah Larasati, S.E. M.Si
NIP. 19820405 200701 2 011

Samarinda, 10 Oktober 2024



PPTK

Awang Jul, S.KM., M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

UNIT KERJA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	:	APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	:	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	:	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS
ALOKASI DANA	:	Rp 160.436.000 (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

A. Latar Belakang :

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada seksi perlindungan perempuan yang menyediakan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan meliputi layanan informasi, konsultasi psikologi, bantuan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dengan rujukan. Setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan seperti Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun social, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Lembaga penyedia layanan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Permasalahan :

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan.

C. Analisa / arah Kebijakan :

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2025 tersedianya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga layanan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan bagi korban kekerasan.

D. Tujuan :

1. Meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga layanan agar lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.
2. Tersedianya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga layanan.

E. Ruang Lingkup :

1. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberi Kewenangan kepada Daerah untuk Mengembangkan Kebijakan Inklusif Berbasis Gender.
4. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
8. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.
9. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024.
10. Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Januari 2024.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

- Terlampir

H. Pelaksanaan :

Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024

I. Hasil Keluaran :

1. Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2024
2. Laporan bulanan kegiatan
3. Laporan penanganan dan bantuan yang diberikan

SUB KOORDINATOR


Amelia Indah Larasati, S.E. M.Si
NIP. 19820405 200701 2 011

Samarinda, 08 Januari 2024


Syahrudin Nur, S.E., M.M
NIP. 19741105 200112 1 009



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

UNIT KERJA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
JENIS SATKER	:	APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	:	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KELUARAN	:	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS
ALOKASI DANA	:	Rp 160.436.000 (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

A. Latar Belakang :

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada seksi perlindungan perempuan yang menyediakan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan meliputi layanan informasi, konsultasi psikologi, bantuan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dengan rujukan. Setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan seperti Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun social, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Lembaga penyedia layanan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam sektor kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Permasalahan :

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan.

C. Analisa / arah Kebijakan :

Sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan diharapkan pada tahun 2025 tersedianya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga layanan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan bagi korban kekerasan.

D. Tujuan :

1. Meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga layanan agar lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.
2. Tersedianya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga layanan.
3. Telaksananya persiapan pembentukan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

E. Ruang Lingkup :

1. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberi Kewenangan kepada Daerah untuk Mengembangkan Kebijakan Inklusif Berbasis Gender.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
9. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.
10. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 Tahun 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

12. Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 08 Oktober 2024.

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

- Terlampir

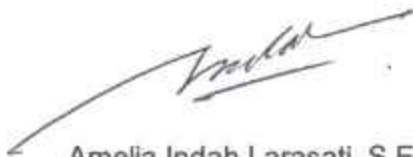
H. Pelaksanaan :

Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024

I. Hasil Keluaran :

1. Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2024
2. Penyusunan RKA-P dan DPA-P Tahun 2024
3. Laporan bulanan kegiatan
4. Laporan penanganan dan bantuan yang diberikan

SUB KOORDINATOR



Amelia Indah Larasati, S.E. M.Si
NIP. 19820405 200701 2 011

Samarinda, 10 Oktober 2024



Awe Uli, S.KM., M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNIT KERJA	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK KOTA SAMARINDA.
JENIS SATKER	:	APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	:	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA.
SUB KEGIATAN	:	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA
KELUARAN	:	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA.
ALOKASI DANA	:	Rp 160.463.000,-

I. Latar Belakang

Perlindungan terhadap perempuan merupakan mandat konstitusional yang menjadi perhatian penting dalam pembangunan nasional, termasuk di tingkat daerah. Di tengah upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, berbagai tantangan masih terus dihadapi. Kota Samarinda sebagai ibu kota sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah strategis dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi, maupun diskriminasi berbasis gender. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan, tantangan masih cukup besar, termasuk tingginya angka kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik

Data yang dihimpun dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Meskipun telah tersedia layanan pengaduan dan penanganan, masih ditemukan keterbatasan dalam hal kebijakan yang mendukung, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga penyedia layanan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib non-pelayanan dasar, termasuk dalam penyediaan layanan perlindungan bagi

perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis untuk menguatkan fungsi-fungsi kelembagaan dan layanan yang tersedia di daerah.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi untuk mendorong penguatan sistem perlindungan perempuan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para pemangku kepentingan di Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola perlindungan perempuan yang responsif gender dan berkelanjutan.

Dengan melibatkan perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, serta unsur masyarakat lainnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi lintas sektor yang mampu merespons kebutuhan korban kekerasan secara cepat, tepat, dan bermartabat. Melalui Kerangka Acuan Kerja ini, disusun rencana pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terukur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Tahun Anggaran 2024 di Kota Samarinda.

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

III. Tujuan

- Mendorong terbentuknya kebijakan daerah di Kota Samarinda yang responsif gender dan berpihak pada perlindungan perempuan.
- Memperkuat kapasitas layanan perlindungan perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- Meningkatkan koordinasi, jejaring, dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan.

IV. Sasaran

- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - - Dinas Kesehatan
 - - Dinas Sosial
 - - Dinas Pendidikan
 - - RSUD dan Puskesmas
 - - Kepolisian dan Kejaksaan
 - - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
 - - Organisasi masyarakat/LSM mitra layanan

V. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Advokasi Kebijakan:

- ✓ Melaksanakan audiensi, FGD, dan pertemuan lintas sektor guna mendorong komitmen bersama.

2. Pendampingan Layanan Perlindungan:

- ✓ Memberikan pelatihan teknis kepada petugas layanan perempuan di berbagai sektor.
- ✓ Melakukan pendampingan kasus bersama UPTD PPA dan perangkat daerah terkait.
- ✓ Menyusun pedoman operasional layanan terpadu dan responsif gender.

3. Penguatan Jejaring dan Koordinasi:

- ✓ Mengaktifkan forum koordinasi layanan perlindungan perempuan.
- ✓ Menyelenggarakan pertemuan koordinasi lintas sektor secara berkala.
- ✓ Mengembangkan sistem rujukan terpadu antar lembaga penyedia layanan.

VI. Lokasi Kegiatan

- Seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan.

VII. Waktu Pelaksanaan

- Kegiatan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kalender kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

VIII. Rencana Anggaran

Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp160.436.000,- yang mencakup biaya advokasi kebijakan, pelatihan teknis, pendampingan layanan, pertemuan koordinasi, serta dokumentasi dan publikasi kegiatan. Anggaran ini bersumber dari APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

IX. Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan ini dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Capaian Program:

- ✓ Terlaksananya kegiatan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan di Kota Samarinda.

2. Masukan (Input):

- ✓ Ketersediaan anggaran sebesar Rp160.436.000,- untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Ketersediaan SDM pelaksana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mitra terkait.

3. Keluaran (Output):

- ✓ Jumlah perangkat daerah yang menerima advokasi dan pelatihan teknis.

- ✓ Jumlah kasus yang didampingi oleh layanan perlindungan.

4. Hasil (Outcome):

- ✓ Meningkatnya kesadaran dan kapasitas perangkat daerah dalam perlindungan terhadap perempuan.

X. Output yang Diharapkan

- Terlaksananya pelatihan teknis bagi SDM layanan perlindungan perempuan.
- Terdampinginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu.

XI. Indikator Keberhasilan

- Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan pelatihan.
- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi secara lintas sektor.
- Frekuensi dan hasil pertemuan koordinasi antar perangkat daerah dan mitra layanan.

XII. Penutup

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun mitra pembangunan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan perlindungan terhadap perempuan di Kota Samarinda semakin kuat, bermartabat, dan berkeadilan.

Samarinda, 01 Januari 2024
PPTK,



SYARIFUDDIN NUR, SE.MM
NIP. 19741105 200112 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNIT KERJA	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA.
JENIS SATKER	: APBD TAHUN 2024
KEGIATAN	: PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA.
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA.
KELUARAN	: JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA.
ALOKASI DANA	: RP 160.463.000,-

1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial korban serta berpengaruh terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, kasus kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan cenderung kompleks baik dari sisi bentuk, pelaku, maupun dampaknya.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki peran penting dalam menunjukkan komitmen terhadap perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda terus mendorong pelaksanaan program perlindungan perempuan secara sistematis dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan amanat berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan.

Di tingkat daerah, sinergi antar perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan komunitas menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan serta memastikan pemenuhan hak-hak korban. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan melalui

kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan, guna menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Samarinda bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam rangka mengoptimalkan pencegahan kekerasan, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem rujukan dan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan.

Dengan latar belakang tersebut, pelaksanaan sub kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan kota yang ramah perempuan, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan gender.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Againsts Trafficking In Person, Especially Women And Childern (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.01/Permen PP/VI/2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT.

3. Tujuan

- ✓ Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi lintas sektor.
- ✓ Menyelaraskan peran dan kontribusi perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- ✓ Mengidentifikasi dan menyusun langkah strategis bersama dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda.

4. Sasaran

- a. Perangkat daerah terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan aparat penegak hukum.
- b. Lembaga layanan korban kekerasan (UPTD PPA, Forum Perkasa, LSM).
- c. Organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.
- d. Komunitas peduli perempuan dan perlindungan anak.

5. Hasil yang Diharapkan

1. Tersusunnya rencana aksi terpadu pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
2. Meningkatnya pemahaman dan komitmen antar pihak dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis.
3. Terbentuknya forum koordinasi lintas sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
4. Terintegrasinya data dan informasi kasus kekerasan untuk mendukung kebijakan yang responsif gender.

6. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Pertemuan koordinasi antar stakeholder terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.
- c. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan di lapangan.
- d. Penyusunan dan penetapan rencana tindak lanjut bersama.

7. Metode Pelaksanaan

- a) Diskusi kelompok terfokus (FGD) dan rapat koordinasi.
- b) Presentasi program/kegiatan dari masing-masing instansi/lembaga.
- c) Pemaparan data dan fakta lapangan.
- d) Penyusunan dokumen rencana aksi terpadu.
- e) Rencana tindak lanjut (monitoring dan evaluasi)

8. Jadwal Pelaksanaan.

Kegiatan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kalender kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

9. Rencana Anggaran

Total anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar: Rp160.436.000,- Anggaran ini mencakup biaya persiapan, pelaksanaan koordinasi, dokumentasi kegiatan, konsumsi, serta penyusunan laporan dan tindak lanjut kegiatan. Rincian anggaran dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan teknis dan kebijakan penganggaran daerah.

10. Indikator Keberhasilan

- a. Terselenggaranya pertemuan koordinasi dengan keterlibatan lintas sektor minimal 80% dari undangan.
- b. Tersusunnya dokumen rencana aksi terpadu pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Adanya kesepakatan kerja sama atau komitmen bersama antar pihak.
- d. Meningkatnya jumlah program/kegiatan yang bersinergi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

11 . Penutup

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Samarinda merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap

perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui koordinasi lintas sektor, diharapkan tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pengambilan keputusan bersama untuk menentukan langkah-langkah nyata dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara lebih terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu, komitmen bersama sangat diperlukan demi terwujudnya Kota Samarinda yang aman, ramah perempuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Samarinda, 01 Januari 2024
PPTK



SYARIFUDDIN NUR, SE.MM
NIP. 19741105 200112 1 009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balai Kota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Program : Perlindungan Perempuan

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

NO	KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp.)
1	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan				6.412.500
	- Honorarium PA	3	org/bln	520.000	1.560.000
	- Honorarium PPTK	3	org/bln	505.000	1.515.000
	- Honorarium PPK SKPD	3	org/bln	400.000	1.200.000
	- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	3	org/bln	232.500	697.500
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	3	org/bln	480.000	1.440.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis kantor				7.364.300
	- Materai	20	lembar	10.000	200.000
	- Spidol Snowman G 12	3	lusin	82.800	248.400
	- Spidol Snowman Kecil	3	Buah	12.800	38.400
	- Kertas HVS 70 gram folio/f4	5	Rim	75.000	375.000
	- Binder clips no.200	10	kotak	22.000	220.000
	- Kertas Pos it	4	Buah	17.000	68.000
	- Stabilo	7	buah	10.500	73.500
	- Kertas NCR Folio	5	Rim	65.000	325.000
	- Amplop	2	pak	20.000	40.000
	- Binder Clips No.107	10	kotak	7.000	70.000
	- Buku Agenda Saku Kecil	100	pcs	22.000	2.200.000
	- Binder Clips No.260	8	kotak	15.875	127.000
	- Ballpoint Pilot G 2 07	10	buah	16.000	160.000
	- Buku Agenda Surat	1	buah	40.000	40.000
	- Cutter L-500 bagus	1	buah	22.000	22.000
	- Gunting Besar Biasa	2	Buah	37.500	75.000
	- Map Batik Tipis Kertas	50	buah	8.000	400.000
	- Map Biola	31	Lbr	3.000	93.000
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/A4	12	rim	55.000	660.000
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto/A4	15	rim	55.000	825.000
	- Stop Map Folio Borobudur	2	buah	2.000	4.000
	- Tinta Printer	11	Btl	100.000	1.100.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak				3.621.200
	- Foto Copy Hitam Putih A4/F4	2632	lbr	350	921.200
	- Cetak spanduk Bahan Viny uk 4 x 1 meter	5	Buah	300.000	1.500.000
	- Leaflet Uk A4 dua sisi	200	Lbr	4.500	900.000
	- Cetak Buku Laporan	2	buku	150.000	300.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				61.200.000
	- Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) Pelatihan Advokasi Pendampingan Kader Perempuan Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.	800	org/ktk	48.000	38.400.000
	- Makan Minum Rapat (Snack) Pelatihan Advokasi Pendampingan Kader Perempuan Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.	800	org/ktk	24.000	19.200.000
	- Makan Minum Rapat Koordinasi (Nasi Kotak)	75	org/ktk	48.000	3.600.000
5	Honorarium Narasumber				16.200.000
	- Honorarium Narasumber Pelatihan Advokasi Pendampingan Kader Perempuan dalam Pencegahan & Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.	18	org/jam	900.000	16.200.000
6	Belanja Jasa Iklan/Reklame , Film, dan Pemotretan				6.300.000
	- Roll Up Banner Uk 60 x 180 cm	7	buah	900.000	6.300.000
7	Perjalanan Dinas Biasa				31.838.000
	- Biaya Taxi di Jawa barat	4	org/kali	166.000	664.000
	- Biaya Taksi Di Kaltim	4	org/kali	450.000	1.800.000
	- Tarif hotel di Jawa Barat Esselon III	2	org/kali	1.201.000	2.402.000
	- Tarif Hotel di Jawa Barat Esselon II	2	org/kali	2.755.000	5.510.000
	- Tarif Hotel di Jawa Barat Esselon IV	4	org/kali	570.000	2.280.000
	- Uang Harian Luar Kota di Jawa Barat	12	org/kali	430.000	5.160.000
	- Biaya Tiket Pesawat (PP) Bpp - Bandung	3	org/kali	4.674.000	14.022.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				27.500.000
	- Uang harian Yang di Berikan Kepada Masyarakat	550	org/kali	50.000	27.500.000
	Jumlah				160.436.000



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)**

Jalan Dharma No. 01 Komplek Balai Kota Kelurahan Buaya Samarinda (73121)
Tel/Fax (0541) 743507, Telepon Pengaduan -62 432-2442-1313

Laman <http://dppa.samarindakota.go.id> dp2pa@samarindakota.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Program : Perlindungan Perempuan

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kawanan Kab/Kota

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp.)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan				6.735.000
	- Sendehera Pengeluaran Pembantu atau Sendehera Honorarium Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd Sendehera Sdang	3	Orang/Bulan	340.000	1.020.000
	- Pejabat Pokokkasa Teknis (Kegiatan) (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	3	Orang/Bulan	505.000	1.515.000
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK S/PO) Nilai Pagu Dana Datas Rp 100 jt sd 200 jt	3	Orang/Bulan	480.000	1.440.000
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (ppkd)/Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	3	Orang/Bulan	520.000	1.560.000
	- Pembantu Sendehera Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Sendehera Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 jt	3	Orang/Bulan	400.000	1.200.000
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				2.040.000
	- Honorarium PPS	3	Orang/bulan	680.000	2.040.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.984.000
	- Kertas HVS 70 Gram Folio/A4	4	Rim	85.000	340.000
	- Ball Point Pen	1	Lusin	80.900	80.900
	- Binder Clips No.107	4	Kotak	5.150	20.600
	- Binder Clips No.100	5	Kotak	22.000	110.000
	- Kertas HVS 80 Gram Folio / A4	4	Rim	90.000	360.000
	- Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	4	Rim	85.000	340.000
	- Map Sisa/lago	141	Lbr	500	70.500
	- Material	40	Buah	10.000	400.000
	- Tinta Printer	4	Botol	100.000	400.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				900.000
	- Cetak spanduk bahan vinyl ukuran 4m x 1m	3	Buah	150.000	450.000
	- Cetak Suku/Laporan	3	Suku	150.000	450.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				39.600.000
	- Money Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				10.080.000
	- Rapat/Kegiatan (Nasi Kotak)	140	org	45.000	6.300.000
	- Rapat/Kegiatan (Snack)	140	org	24.000	3.360.000
	- Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				10.080.000
	- Rapat/Kegiatan (Nasi Kotak)	140	org	45.000	6.300.000
	- Rapat/Kegiatan (Snack)	140	org	24.000	3.360.000
	- Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				3.040.000
	- Rapat/Kegiatan (Nasi Kotak)	70	Orang/Kegiatan	45.000	3.150.000
	- Rapat/Kegiatan (Snack)	70	Orang/Kegiatan	24.000	1.680.000
	- Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak				3.500.000
	- Rapat/Kegiatan (Snack)	150	Orang/Kegiatan	24.000	3.600.000
	- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				10.800.000
	- Rapat/Kegiatan (Snack)	450	Orang/Kegiatan	24.000	10.800.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				20.700.000
	- Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II ke bawah/ yang Diistarkan	3 x 3 x 2	Orang/Hari	1.000.000	18.000.000
	- Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Diistarkan	3	Orang/Hari	900.000	2.700.000
6	Honorarium Kehormat				1.200.000
	- Honorarium Pembaca Doa	3	org/hari	400.000	1.200.000
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Promotran				40.000.000
	- Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat	4	Paket/tahun	10.000.000	40.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Sisa				30.777.000
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Sandara APT Pramoto) One Way	1	Orang/Kali	200.000	400.000
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	3	Orang	3.797.000	11.391.000
	- Tarif Hotel di Provinsi D.K.I Jakarta Eselon II/Golongan IV	2	Orang/Hari	992.000	1.984.000
	- Tarif Hotel di Provinsi D.K.I Jakarta Eselon III/Golongan IV	2	Orang/Hari	992.000	1.984.000
	- Tarif Hotel di Provinsi D.K.I Jakarta Pejabat Negeri Lainnya/Pejabat Eselon II	2	Orang/Hari	1.788.000	3.576.000
	- Tarif Hotel di Provinsi D.K.I Jakarta Pejabat Pengawas/Eselon II/Golongan III/IV/Non PNS	4	Orang/Hari	730.000	2.920.000
	- Transportasi (bu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Jakarta ke Kota Tangerang	2	Hari	285.000	570.000
	- Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 x 2	Orang/Hari	330.000	1.650.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				14.700.000
	- Uang Transport Lokal Peserta Kampanye	198	Buah	75.000	14.700.000
	Belanja Model Alat kantor Lainnya				1.800.000
	- Belanja Roll Up Banner uk 80 x 160 cm	2	Buah	900.000	1.800.000
JUMLAH					160.436.000



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
1	Belanja Pegawai				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				5,750,000.00
	Belanja Honorarium				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5,750,000.00
	# PPTK	1	org/bin x 2 bln	907,500.00	1,815,000.00
	# Pembantu bendahara pengeluaran Pembantu	1	org/bin x 2 bln	240,000.00	480,000.00
2	# Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	org/bin x 2 bln	310,000.00	620,000.00
	# Pengguna Anggaran	1	org/bin x 2 bln	937,500.00	1,875,000.00
	# PPK SKPD	1	org/bin x 2 bln	480,000.00	960,000.00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				2,072,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Binder Clips No.111	3.00	lusin	51,000.00	153,000.00
	- Binder Clips No.260	4.00	kotak	15,875.00	63,500.00
	- Binder Clips No.200	3.00	kotak	22,000.00	66,000.00
	- Materai	51.00	bh	10,000.00	510,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp) 6 = (3x5)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	
	- Stiker post it color pembatas	10.00	pcs	20,000.00	200,000.00
	- Tinta printer	10.00	btl	100,000.00	1,000,000.00
	- Stopmap folio borobudur	40.00	lmbr	2,000.00	80,000.00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1,917,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Kertas NCR	6.00	rim	65,000.00	390,000.00
	- Kertas HVS 70 gram A4	10.00	rim	65,000.00	650,000.00
	- Kertas HVS 70 gram F4	3.00	rim	85,000.00	255,000.00
	- Fotokopi Hitam Putih A4/F4	920.00	lmbr	350.00	322,000.00
	- Cetak Buku / Laporan	2.00	buku	150,000.00	300,000.00
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				112,500,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Bantuan barang untuk korban bencana alam khusus perempuan	150.00	bh	750,000.00	112,500,000.00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7,200,000.00
	# Makanan dan Minuman kegiatan penjangkauan				
	-Nasi Kotak	100.00	org/kd	48,000.00	4,800,000.00
	-Snack	100.00	org/kd	24,000.00	2,400,000.00
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				31,000,000.00
	# Tim Koordinasi dan Monitoring Korban Kekerasan Perempuan dalam situasi Darurat				31,000,000.00
	- Anggota	15.00	org/bln x 5 bln	200,000.00	15,000,000.00
	- Ketua	5.00	org/bln	650,000.00	3,250,000.00
	- Penanggung Jawab	5.00	org/bln	700,000.00	3,500,000.00
	- Pengarah	5.00	org/bln	750,000.00	3,750,000.00
	- Sekretaris	5.00	org/bln	500,000.00	2,500,000.00
	- Wakil Ketua	5.00	org/bln	600,000.00	3,000,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					160,439,500.00



Samarinda, 08 Januari 2024
PPTK

Syarifuddin Nur, S.E., M.M.
NIP. 19741105 200112 1 009



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA			
Program	: 2.08.03	Program Perlindungan Perempuan			
Kegiatan	: 2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Belanja Pegawai				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				5,020,000.00
1	Belanja Honorarium				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5,020,000.00
	# PPTK	1	org/bln x 2 bln	605,000.00	1,210,000.00
	# Pembantu bendahara pengeluaran	1	org/bln x 2 bln	380,000.00	760,000.00
	# Bendahara Pengeluaran	1	org/bln x 2 bln	420,000.00	840,000.00
	# Pengguna Anggaran	1	org/bln x 2 bln	625,000.00	1,250,000.00
	# PPK SKPD	1	org/bln x 2 bln	480,000.00	960,000.00
2	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa				680,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Honorarium Pengadaan barang/jasa	1.00	org/bln x 2 bln	340,000.00	680,000.00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				2,122,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Binder Clips No.111	3.00	lusin	51,000.00	153,000.00
	- Binder Clips No.260	4.00	kotak	15,875.00	63,500.00
	- Binder Clips No.200	3.00	kotak	22,000.00	66,000.00
	- Materai	51.00	bh	10,000.00	510,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	- Stiker post it color pembatas	10.00	pcs	20,000.00	200,000.00
	- Tinta printer	10.00	btl	100,000.00	1,000,000.00
	- Stopmap folio borobudur	40.00	lmbr	2,000.00	80,000.00
	- Trigonal clips	1.00	kotak	48,000.00	48,000.00
	- Lem glukol kecil	1.00	bh	2,000.00	2,000.00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1,917,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Kertas NCR	6.00	rim	65,000.00	390,000.00
	- Kertas HVS 70 gram A4	10.00	rim	65,000.00	650,000.00
	- Kertas HVS 70 gram F4	3.00	rim	85,000.00	255,000.00
	- Fotokopi Hitam Putih A4/F4	920.00	lmbr	350.00	322,000.00
	- Cetak Buku / Laporan	2.00	buku	150,000.00	300,000.00
5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				112,500,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Bantuan barang untuk korban bencana alam khusus perempuan	150.00	bh	750,000.00	112,500,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					122,239,500.00



Samarinda, 10 Oktober 2024

PPTK

Awe Ulul, S.KM., M.Kes

NIP. 19690804 199402 2 002



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program : 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
1	Belanja Pegawai				5,750,000.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
	Belanja Honorarium				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5,750,000.00
	# PPTK	1	org/bln x 2 bln	907,500.00	1,815,000.00
	# Pembantu bendahara pengeluaran Pembantu	1	org/bln x 2 bln	240,000.00	480,000.00
	# Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	org/bln x 2 bln	310,000.00	620,000.00
	# Pengguna Anggaran	1	org/bln x 2 bln	937,500.00	1,875,000.00
	# PPK SKPD	1	org/bln x 2 bln	480,000.00	960,000.00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				3,734,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Pen Pilot snowman Bp.7 Hitam	2.00	bh	2,300.00	4,600.00
	- Amplop	2.00	pak	20,000.00	40,000.00
	- Amplop cabinet coklat biasa	1.00	pak	20,000.00	20,000.00
	- Materai	10.00	bh	10,000.00	100,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	- Map Jago	85.00	lmbr	500.00	42,500.00
	- Lakban Kertas	4.00	bh	17,000.00	68,000.00
	- Kertas Pos it besar	6.00	pcs	25,000.00	150,000.00
	- Kertas Pos it kecil	6.00	pcs	17,000.00	102,000.00
	- spidol snowman G-12	3.00	lusin	95,000.00	285,000.00
	- Map Batik Tebal	12.00	pcs	18,000.00	216,000.00
	# Seminar Kit pelatihan manajemen kasus				2,706,400.00
	Spesifikasi :				
	- (Seminar Kit) Tas (Kain/Plastik/Kertas),Sovenir, Notebook, Pulpen	65.00	bh	28,000.00	1,820,000.00
	- Buku Blok Note 5	64.00	bh	6,350.00	406,400.00
	- Pulpen Pilot	8.00	lusin	60,000.00	480,000.00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2,626,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Kertas NCR	3.00	rim	65,000.00	195,000.00
	- Kertas HVS 70 gram A4	6.00	rim	65,000.00	390,000.00
	- Kertas HVS 70 gram F4	4.00	rim	75,000.00	300,000.00
	- Spanduk bahan Vinly uk 4 m x 3 m	1.00	lmbr	400,000.00	400,000.00
	- Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1,611.00	lmbr	500.00	805,500.00
	- Cetak Buku / Laporan	2.00	buku	150,000.00	300,000.00
	- Cetak Piagam	59.00	lmbr	4,000.00	236,000.00
4	Belanja Pakaian Olahraga				15,000,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Baju Kaos Lapangan Forum Perkasa	75.00	bh	200,000.00	15,000,000.00
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia				22,200,000.00
	# Honorarium Narasumber				
	-Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	18.00	org/jam	900,000.00	16,200,000.00
	# Honorarium Narasumber luar daerah pelatihan manajemen kasus				
	-Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	6.00	org/jam	1,000,000.00	6,000,000.00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				39,475,000.00
	# Narasumber Luar Daerah Pelatihan Manajemen Kasus				7,211,000.00
	- Biaya Taksi DKI Jakarta	2.00	org/hr	256,000.00	512,000.00
	- Biaya taksi di kalimantan timur (APT Pranoto)	1.00	org/kli	300,000.00	300,000.00
	- Biaya tiket pesawat (Ekonomi) PP dari samarinda ke jakarta	1.00	org/kli	3,987,000.00	3,987,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp) 6 = (3x5)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	
	- Tarif Hotel di prov. Kalimantan timur pejabat pengawas/Eselon IV/Gol III/II/I	3.00	org/hr	804,000.00	2,412,000.00
	# Studi pembelajaran penanganan kasus di desa ramah perempuan				32,264,000.00
	- Biaya Taksi di Jawa Barat	3.00	org/kli	166,000.00	498,000.00
	- Biaya taksi di kalimantan timur (APT Pranoto)	2.00	org/kli	200,000.00	400,000.00
	- Blaya tiket pesawat (Ekonomi) PP dari samarinda ke bandung	3.00	org/kli	4,908,000.00	14,724,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat pejabat pengawas/Eselon IV/Gol III/II/I	4.00	org/hr	570,000.00	2,280,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat pejabat negara lainnya/Pejabat Eselon II	2.00	org/hr	2,755,000.00	5,510,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat Eselon III/Gol IV	2.00	org/hr	1,201,000.00	2,402,000.00
	- Uang Harian luar kota di Jawa barat	15.00	org/hr	430,000.00	6,450,000.00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				11,250,000.00
	# Transportasi kepada masyarakat				
	- Uang Transportasi Lokal	150.00	org/hr	75,000.00	11,250,000.00
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				60,400,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Paket Meeting Fullday pelatihan manajemen kasus	200.00	org/hr	302,000.00	60,400,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					160,436,000.00



Samarinda, 08 Januari 2024
PPTK

Syarifuddin Nur, S.E., M.M
NIP. 19741105 200112 1 009



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
Program	: 2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan	: 2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
1	Belanja Pegawai				5,020,000.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
	Belanja Honorarium				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5,020,000.00
	# PPTK	1	org/bln x 2 bln	605,000.00	1,210,000.00
	# Pembantu bendahara pengeluaran	1	org/bln x 2 bln	380,000.00	760,000.00
	# Bendahara Pengeluaran	1	org/bln x 2 bln	420,000.00	840,000.00
	# Pengguna Anggaran	1	org/bln x 2 bln	625,000.00	1,250,000.00
	# PPK SKPD	1	org/bln x 2 bln	480,000.00	960,000.00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680,000.00
	# Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	org/bln x 2 bln	340,000.00	680,000.00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				3,734,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Pen Pilot snowman Bp.7 Hitam	2.00	bb	2,300.00	4,600.00
	- Amplop	2.00	pak	20,000.00	40,000.00
	- Amplop cabinet coklat biasa	1.00	pak	20,000.00	20,000.00
	- Material	10.00	bb	10,000.00	100,000.00
	- Map Jago	85.00	lmbr	500.00	42,500.00
	- Lakban Kertas	4.00	bb	17,000.00	68,000.00
	- Kertas Pos It besar	6.00	pcs	25,000.00	150,000.00
	- Kertas Pos It kecil	6.00	pcs	17,000.00	102,000.00
	- spidol snowman G-12	3.00	lusin	95,000.00	285,000.00
	- Map Batik Tebal	12.00	pcs	18,000.00	216,000.00
	# Seminar Kit pelatihan manajemen kasus				2,706,400.00
	Spesifikasi :				
	- (Seminar Kit) Tas (Kain/Plastik/Kertas),Sovenir, Notebook, Pulpen	65.00	bb	28,000.00	1,820,000.00
	- Buku Blok Note 5	64.00	bb	6,350.00	406,400.00
	- Pulpen Pilot	8.00	lusin	60,000.00	480,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		Kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2,856,500.00
	# Spesifikasi :				
	- Box arsip	1.00	bh	30,000.00	30,000.00
	- Kertas NCR	3.00	rim	65,000.00	195,000.00
	- Kertas HVS 70 gram A4	6.00	rim	65,000.00	390,000.00
	- Kertas HVS 70 gram F4	4.00	rim	75,000.00	300,000.00
	- Spanduk bahan Vinly uk 4 m x 3 m	1.00	lmbr	400,000.00	400,000.00
	- Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1,611.00	lmbr	500.00	805,500.00
	- Cetak Buku / Laporan	2.00	buku	150,000.00	300,000.00
	- Cetak Piagam	59.00	lmbr	4,000.00	236,000.00
	- Spanduk (Persiapan pembentukan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak)	1.00	lmbr	200,000.00	200,000.00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7,920,000.00
	# Launcing pembentukan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak				
	- Nasi kotak	115.00	org/keg	48,000.00	5,520,000.00
	# Rapat koordinasi persiapan pembentukan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak				
	- Nasi kotak	50.00	org/keg	48,000.00	2,400,000.00
6	Belanja Pakaian Olahraga				15,000,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Baju Kaos Lapangan Forum Perkasa	75.00	bh	200,000.00	15,000,000.00
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia				14,100,000.00
	# Honorarium Narasumber				
	-Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	9.00	org/jam	900,000.00	8,100,000.00
	# Honorarium Narasumber luar daerah pelatihan manajemen kasus				
	-Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	6.00	org/jam	1,000,000.00	6,000,000.00
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				39,475,000.00
	# Narasumber Luar Daerah Pelatihan Manajemen Kasus				7,211,000.00
	- Biaya Taksi DKI Jakarta	2.00	org/hr	256,000.00	512,000.00
	- Biaya taksi di kalimantan timur (APT Pranoto)	1.00	org/ldi	300,000.00	300,000.00
	- Biaya tiket pesawat (Ekonomi) PP dari samarinda ke jakarta	1.00	org/ldi	3,987,000.00	3,987,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Kalimantan timur pejabat pengawas/Eselon IV/Gol III/II/I	3.00	org/hr	804,000.00	2,412,000.00
	# Studi pembelajaran penanganan kasus di desa ramah perempuan				32,264,000.00
	- Biaya Taksi di Jawa Barat	3.00	org/ldi	166,000.00	498,000.00
	- Biaya taksi di kalimantan timur (APT Pranoto)	2.00	org/ldi	200,000.00	400,000.00
	- Biaya tiket pesawat (Ekonomi) PP dari samarinda ke bandung	3.00	org/ldi	4,908,000.00	14,724,000.00

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		kuefisien	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat pejabat pengawas/Eselon IV/Gol III/II/I	4.00	org/hr	570,000.00	2,280,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat pejabat negara lainnya/Pejabat Eselon II	2.00	org/hr	2,755,000.00	5,510,000.00
	- Tarif Hotel di prov. Jawa barat Eselon III/Gol IV	2.00	org/hr	1,201,000.00	2,402,000.00
	- Uang Harian luar kota di Jawa barat	15.00	org/hr	430,000.00	6,450,000.00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				11,250,000.00
	# Transportasi kepada masyarakat				
	- Uang Transportasi Lokal	150.00	org/hr	75,000.00	11,250,000.00
10	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				60,400,000.00
	# Spesifikasi :				
	- Paket Meeting Fullday pelatihan manajemen kasus	200.00	org/hr	302,000.00	60,400,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					160,436,000.00



Samarinda, 10 Oktober 2024

PPTK

Awe Ului, S.KM., M.Kes

NIP. 19690804 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota (75121)

Telp/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan 0823-2442-1313

Lama <http://dp2pa.samarinda.go.id>

SAMARINDA 75121

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda
Program	: Perlindungan Perempuan
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota*

- Indikator : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
- Volume : 70
- Satuan Ukur : Orang

Capaian Kinerja :

1. *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota*

- Masukan (Input) : Biaya, Masyarakat, OPD
- Keluaran (Output) : Hasil Laporan Kegiatan
- Outcome : Terlaksananya kegiatan layanan pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan

A. Latar Belakang

Dalam pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pada umumnya korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup.

Selain itu, semakin maraknya kekerasan yang terjadi di masyarakat terutama yang menimpa perempuan dan anak - anak saat ini, sehingga diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui tentang ada nya Undang- undang Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu maka pemerintah kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan maksud agar masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA Kota Samarinda adalah salah satu bentuk unit pelaksana teknis daerah, yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tanggal 7 Februari 2020, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak.

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
- c. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- i. Peraturan Menteri Negara PP & PA Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu.
- k. Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Pemerintah Kota Samarinda.
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- n. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020
- o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- p. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung Program Prioritas Pembangunan Wali Kota Nomor 5 yakni Program Smart City Plus

B. Mekanisme Penganggaran

Sumber Pendanaan Kegiatan terdiri dari 1 Sub kegiatan :

1. *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*

– APBD Kota Samarinda : Rp. 500.000.000

C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Di dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun Laporan tentang kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. Jumlah Dana

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian RKA terlampir.

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan

Samarinda, Desember 2023



Catatan :

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024
2. Definisi input : masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output : keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome : manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan Sumber Dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota (75121)

Telp/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan 0823-2442-1313

Lama <http://dp2pa.samarinda.go.id>

SAMARINDA 75121

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
(RKA PERUBAHAN T.A 2024)

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda
Program	: Perlindungan Perempuan
Kegiatan	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- | | |
|---------------|--|
| - Indikator | : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| - Volume | : 2 |
| - Satuan Ukur | : Dokumen |

Capaian Kinerja :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- | | |
|---------------------|--|
| - Masukan (Input) | : Biaya, Masyarakat, OPD |
| - Keluaran (Output) | : Hasil Laporan Kegiatan |
| - Outcome | : Terlaksananya pelayanan pendampingan kekerasan terhadap
Perempuan |

A. Latar Belakang

Dalam pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pada umumnya korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup.

Selain itu, semakin maraknya kekerasan yang terjadi di masyarakat terutama yang menimpa perempuan dan anak - anak saat ini, sehingga diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui tentang ada nya Undang- undang Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu maka pemerintah kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan maksud agar masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA Kota Samarinda adalah salah satu bentuk unit pelaksana teknis daerah, yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tanggal 7 Februari 2020, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak.

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
- c. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- i. Peraturan Menteri Negara PP & PA Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu.
- k. Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Pemerintah Kota Samarinda.
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- n. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020
- o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- p. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung Program Prioritas Pembangunan Wali Kota Nomor 5 yakni Program Smart City Plus

B. Mekanisme Penganggaran

Sumber Pendanaan Kegiatan terdiri dari 1 Sub kegiatan :

1. *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*

– APBD Kota Samarinda : Rp. 22.600.000

C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

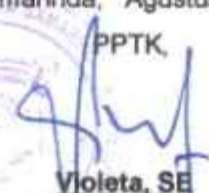
Di dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun Laporan tentang kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. Jumlah Dana

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian RKA terlampir.

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan

Samarinda, Agustus 2024
PPTK,

Violeta, SE
NIP. 197606202007012023



Catatan :

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024
2. Definisi input : masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output : keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome : manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan Sumber Dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dahlia Kompleks Balaikota No. 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota (75121)

Telp/Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan 0823-2442-1313

Lama <http://dp2pa.samarinda.go.id>

SAMARINDA 75121

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda
Program	: Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
 - Indikator : Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan pengaduan
 - Volume : 80
 - Satuan Ukur : Orang

Capaian Kinerja :

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
 - Masukan (Input) : Biaya, Masyarakat (Anak), OPD
 - Keluaran (Output) : Hasil Laporan Kegiatan
 - Outcome : Terlaksananya pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang mengalami kekerasan

A. Latar Belakang

Dalam pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi. Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pada umumnya korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup.

Selain itu, semakin maraknya kekerasan yang terjadi di masyarakat terutama yang menimpa perempuan dan anak - anak saat ini, sehingga diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui tentang ada nya Undang- undang Perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu maka pemerintah kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan maksud agar masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA Kota Samarinda adalah salah satu bentuk unit pelaksana teknis daerah, yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tanggal 7 Februari 2020, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
- c. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak – Hak Anak.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- i. Peraturan Menteri Negara PP & PA Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu.
- k. Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Pemerintah Kota Samarinda.
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- m. Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- n. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020
- o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- p. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda

2. **Visi Pemerintah Kota Samarinda**

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

3. **Misi Pemerintah Kota Samarinda**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya

4. **Program Prioritas Walikota Samarinda**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mendukung Program Prioritas Pembangunan Wali Kota Nomor 5 yakni Program Smart City Plus

B. Mekanisme Penganggaran

Sumber Pendanaan Kegiatan terdiri dari 1 Sub kegiatan :

1. *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

– APBD Kota Samarinda : Rp. 160.000.000

C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Di dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun Laporan tentang ...giatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. Jumlah Dana

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian RKA terlampir.

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan

Samarinda, Desember 2023



Catatan :

1. RKA hasil input SIPD TA. 2024
2. Definisi input : masukan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti, biaya, SDM, peralatan, dokumen, dsb.
3. Definisi output : keluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan seperti jumlah, paket, laporan, unit, dsb.
4. Definisi outcome : manfaat yang diharapkan atas terselenggaranya kegiatan seperti meningkatnya kinerja, terwujudnya pemerintahan yang baik, terpenuhinya sarana dan prasarana, dsb.
5. Pembiayaan disesuaikan dengan Sumber Dana.
6. Jumlah dana dituangkan secara rinci dalam RKA.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dharma Kompleks Bakti Kota No 1 Kabupaten Bakti
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541) 743897, 743898-99, 743899-00, 743900-01, 743902-03
Lamar: 011-743904, 011-743905, 011-743906, 011-743907, 011-743908, 011-743909, 011-743910, 011-743911
S A M A R I N D A 75111

REKANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024					
Urutan	2.05 PEMERINTAHAN (SALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR)				
Pencapaian	2.05.2 13.0 00 04 0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Unit Organisasi	2.05.02 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Program	2.05.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan	2.05.02.2.03.0001 Advokasi Kabupaten dan Peningkatan Penyediaan Service Provision Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan				
Sub Kegiatan	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantities	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				1.588.000,00
	Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan				1.588.000,00
	- Bandhara Pengeluaran atau Bandhara Pembiayaan	1	Org/Bln	340.000	340.000,00
	- Nota Passi Dari atas Rp. 200 s.d 500	1	Org/Bln	605.000	605.000,00
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK)	1	Org/Bln	300.000	300.000,00
	- Honorarium PPK SKPD	1	Org/Bln	300.000	300.000,00
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1	Org/Bln	520.000	520.000,00
	- Pengusaha Anggaran (PA) Rupa Perkusua Anggaran (RPA)	1	Org/Bln	300.000	300.000,00
	- Pembantu Bandhara Pengeluaran				
2	Belanja Bahan Paket Habis				4.288.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk Kantor UPTD dan Rumah Perlindungan				4.288.000,00
	- Bak Cat	3	Buah	29.000	87.000,00
	- Cat Mowlex Ederor (Watershed) 10 L	10	Kaleng	313.500	3.135.000,00
	- Cat Mowlex Interior 5 L	5	Liter	167.000	835.000,00
	- Filter	5	Kg	1.200	6.000,00
	- Kusen Roll	3	Buah	35.000	105.000,00
3	Belanja Alat Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				6.308.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor (Home Use)				6.308.000,00
	- Bola Lampu LED 27 Watt	25	Buah	125.000	3.125.000,00
	- Bola Lampu LED 30 Watt	5	Buah	200.000	1.000.000,00
	- Kabel Listrik NYA 2 x 1,5 mm 1x1,5=100.000 Roll	3	Roll	257.000	771.000,00
	- Lampu LED 12 Watt 12 w	20	Buah	81.000	1.620.000,00
	- Stop Kontak 5 Lubang	8	Buah	68.000	544.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli				7.811.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Instalasi Listrik				7.811.000,00
	Pekerjaan Harian Pasang Instalasi Listrik (1 org x 4 HK)	4	Tak	298.000	1.192.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Tukang				6.619.000,00
	Sumber Dana : PENDAPATAN ABL				
	Pekerjaan Harian Tenaga Perung (Karya Tukang) (1 Orang x 10 Jam x 10 Hari)	100	Org/Jam	22.898	2.289.800,00
	Pekerjaan Harian Tenaga Perung (Tukang) (2 Orang x 10 Jam x 10 Hari)	200	Org/Jam	21.428	4.285.600,00
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1.849.400,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				1.849.400,00
	- Candi Pembersi Piring	8	Bokor	23.400	187.200,00
	- Candi Pembersi Tangan	5	Bokor	25.000	125.000,00
	- kapur Sutra	10	kg	18.000	180.000,00
	- Pembersih Kaca	8	Bokor	17.500	140.000,00
	- Pembersi Beker	10	kg	36.800	368.000,00
	- Sabun Sabuk/Deterjen	5	kg	28.000	140.000,00
	- Sabun Cuci	7	Bokor	26.000	182.000,00
	- Sikat Tangan	3	Buah	35.000	105.000,00
	- Spon Cuci Piring	4	Buah	8.900	35.600,00
	- Ember	3	kg	28.000	84.000,00
	- Kain Lap Pakaian Bersih/Berbekas	10	kg	10.000	100.000,00
	- Kain Serat (Korbo)	4	Buah	40.000	160.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				27.400.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				27.400.000,00
	Pemeliharaan Gedung Tidak Berlingkar (137 M2)	137	M2	200.000	27.400.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan					55.000.000,00

Samarinda, April 2024
RPTK
NIP. 19 06 2007 01 2 023



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
 Jalan Dharma Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
 Kecamatan Samarinda Kota
 Telp/Fax (0541)743301, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
 Lembar: http://dp2pa.samarindakota.go.id/ E-mail: dp2pa@samarindakota.go.id
 S A M A R I N D A 76121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024

Urutan	2.08 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Pemerintahan					
Unit Organisasi	2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Kegiatan	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				24.225.000,00
	Belanja Honorarium Penanggung jawab dan Pengelola Keuangan				24.225.000,00
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	6	OrgBln	800.000	3.000.000,00
	- Nilai Pagar Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	6	OrgBln	1.057.500	6.345.000,00
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	6	OrgBln	570.000	3.420.000,00
	- Honorarium RPK, SKPD	6	OrgBln	1.450.000	8.700.000,00
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	6	OrgBln	400.000	2.400.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	6	OrgBln		
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				580.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	OrgBln	340.000	580.000,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis				8.820.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				8.820.500,00
	- Kertas HVS 70 gram Folio/F4	20	Rim	85.000	1.700.000,00
	- Kertas NCR Folio 1/2	5	Rim	50.000	250.000,00
	- Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000	975.000,00
	- Stiker Post & color pembatas	12	Pcs	20.000	240.000,00
	- Tempel pulpen biasa	10	Pcs	37.500	375.000,00
	- Ballpoint Pilot	2	Kotak	195.500	391.000,00
	- Double Tape	3	Pcs	50.000	150.000,00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	20	Rim	65.000	1.300.000,00
	- Lem Povalin Kaci	5	Pcs	7.000	35.000,00
	- NT cutter A-300	3	Pcs	43.500	130.500,00
	- Penggaris besi 50 cm	4	buah	25.000	100.000,00
	- Penghapus white board	3	Pcs	8.000	24.000,00
	- Stapler nomor 10 merk max	5	buah	47.500	237.500,00
	- Stapler nomor 3 merk max	1	buah	91.500	91.500,00
	- Tinta Stempel	3	Pcs	30.000	90.000,00
	- Tlp Ex Jumbo	5	Kotak	20.000	100.000,00
	- Tinta Printer	24	Pcs	100.000	2.400.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				21.167.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				21.167.000,00
	- Kertas Glossy Photo paper	12	Pak	36.000	432.000,00
	- Cetak Map Dinas	200	lembar/kali	10.000	2.000.000,00
	- Papan L2K	3	buah	20.000	60.000,00
	- Bocket/Buku Saku	100	pcs	22.000	2.200.000,00
	- Kalender Meja	50	buah/kali	122.500	6.125.000,00
	- Leaflet / Brosur Ukuran A4, kertas art paper	999	lembar/kali	10.000	9.990.000,00
	- Kertas Sticker	15	Pak	36.000	540.000,00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
2	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				13.388.800,00
	Belanja Kebutuhan Rumah Perlindungan Humanis (Ruli Manis)				13.388.800,00
	- air mineral Botol mini	25	Doe	55.000	1.375.000,00
	- Beras Raja Lela Orange 10 Kg	2	Kg	166.750	333.500,00
	- biskuit Kaleng 1800 gram	15	buah	110.000	1.650.000,00
	- Gula Pasir	8	kg	18.000	152.000,00
	- Ikan Kaleng 425 gram	12	kg	25.000	300.000,00
	- Kecap Asin	6	bt	40.000	240.000,00
	- Kecap Manis Bango	6	bt	51.000	306.000,00
	- kopi bubuk 380 gram	10	Spk	25.000	250.000,00
	- Mie Instant	15	Doe	135.000	2.025.000,00
	- minuman Kotak jus Buah 250 ml x 24	10	Doe	170.000	1.700.000,00
	- Minuman Kotak Susu	15	Doe	135.000	2.025.000,00
	- minuman teh Kotak 300 ml x 24	10	Doe	75.000	750.000,00
	- Prons Comed Beef Chili	15	kg	29.800	447.000,00
	- Sate Sambal (Botol kecil)	10	bt	10.500	105.000,00
	- Sunco Minyak Goreng 5L	10	js	150.000	1.500.000,00
	- susu kental manis 500 gram	10	buah	19.000	190.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				66.336.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				66.336.000,00
	Konsumsi Makan dan Minum (Mediasi/Koordinasi/Pengangkatan/Alan Rulin)	1.382	kotak	48.000	66.336.000,00
4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				480.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya				480.000,00
	Batere Alkaline A3/A2	20	pasang	24.000	480.000,00

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman				4.300.000,00
	Baju Lapangan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak				4.300.000,00
	Baju Kaca Aksen, Bordir dan Sablon	20	unit	200.000	4.000.000,00
8	Belanja Jasa Kantor				150.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				150.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi UPTD PPA (5 Orang)	50	5 org/ 12 bn	2.500.000	150.000.000,00
9	Belanja jasa tenaga Ahli				119.805.000,00
	Belanja jasa tenaga Ahli				119.805.000,00
	- Honorarium Mediator UPTD PPA	1	org/bn	18.093.000	18.093.000,00
	- Honorarium Tim Pendampingan Bantuan Hukum	1	org/bn	25.428.000	25.428.000,00
	- Honorarium Tim Pendampingan Psikolog	3	org/bn	25.428.000	76.284.000,00
10	Belanja Jasa Iklan/Pektama, Film, dan Pemasangan				9.000.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Pektama				9.000.000,00
	- Roll Up Banner Inovasi Model Pisang (Mobi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Samarinda	1	Buah	900.000	900.000,00
	- Roll Up Banner Tema Informasi Layanan UPTD PPA	3	Buah	900.000	2.700.000,00
	- Roll Up Banner Tema Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	3	Buah	900.000	2.700.000,00
	- Roll Up Banner Tema Stop Bullying	3	Buah	900.000	2.700.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				66.828.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				66.828.000,00
	Sinkronisasi Program Ke KPPPA dan Studi Tiru ke UPTD PPA Jakarta				
	- Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi D.K.I. Jakarta	2	orang/kali	911.000	1.822.000,00
	- Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta (3 Orang x 2 Kali)	6	orang/kali	256.000	1.536.000,00
	- Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bendara APT Prando) One Way (4 Orang x 2 Kali	8	orang/kali	300.000	2.400.000,00
	- Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta / 10 Orang x 1 Kali	10	orang/hari	3.987.000	39.870.000,00
	- Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon MIGolongan III/II/Non PNS (1 org x 3 hr)	10	orang/hari	730.000	7.300.000,00
	- Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta (10 Orang x 3 Hari)	30	orang/hari	530.000	15.900.000,00
12	BELANJA MODAL				13.500.000,00
	Belanja Modal Alat Studio				10.000.000,00
	Kamera DSLR	1	Unit	10.000.000	10.000.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi				3.500.000,00
	Belanja Handphone (SmartPhone)	1	Unit	3.500.000	3.500.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan					880.000.000,00

Samarinda, April 2024
PPTK
Yusrita, S.P
NIP. 19760620 200701 2 023

No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				3.459.800,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor (Home Use)				3.459.800,00
	- Kantong Sampah Besar	20	Pak	50.000	1.000.000,00
	- Kantong sampah sedang	20	pak	40.000	800.000,00
	- Timbangan	2	buah	199.900	399.800,00
	- Bendera Bering (4 mtr)	4	Meter	250.000	1.000.000,00
	- Bendera Plastik	9	Pak	30.000	270.000,00
6	Belanja Jasa Kantor				120.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				120.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi UPTD PPA (4 Orang)	48	4 org/ 12 bln	2.500.000	120.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan				3.640.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				3.640.000,00
	Spin Mop	4	Buah	360.000	1.440.000,00
	Stofa mao Diffuser	3	Bulan	150.000	450.000,00
	Stofa Mado Natural Raffi	10	pcs	54.000	540.000,00
	vial 450cc	15	Botol	18.000	270.000,00
	Tissue	40	kotak	23.500	940.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				5.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan				5.000.000,00
	Pemeliharaan AC (5 Unit x 2 Kali)	10	unit	500.000	5.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				3.450.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer				3.450.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer (5 Unit x kali)	5	unit / tahun	690.000	3.450.000,00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					180.000.000,00

Samarinda, April 2024

PPTK

Yulianto, S.E

NIP. 19710620 20070 2 023





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Email: dp2pa.samarinda.go.id / dp2pa.kotamarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 78121

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2024					
Urusan Pemerintahan	2.08 PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	2.08.2.13.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				
Program	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Kegiatan	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Rincian Rencana Anggaran Belanja					
No	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Quantitas	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Belanja Honorarium				7.530.000,00
	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan				7.530.000,00
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt ad 500 jt	3	Org/Bn	420.000	1.260.000,00
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3	Org/Bn	605.000	1.815.000,00
	- Honorarium PPK SKPD	3	Org/Bn	480.000	1.440.000,00
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3	Org/Bn	625.000	1.875.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	3	Org/Bn	380.000	1.140.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.530.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3	Org/Bn	510.000	1.530.000,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis				8.130.200,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia				500.000,00
	- Obat Pembasmi Rumput	5	bot	100.000	500.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				8.630.200,00
	- Kertas Cover Folio	5	Pack	60.000	300.000,00
	- Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10	Rim	85.000	850.000,00
	- Trigonal Clips	5	Kotak	48.000	240.000,00
	- Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	2	Kotak	90.000	180.000,00
	- Binder Clips besar	5	Kotak	65.000	325.000,00
	- Binder Clips No. 107	20	Kotak	7.000	140.000,00
	- Binder Clips No. 111	3	Lusin	51.000	153.000,00
	- Binder Clips No. 115	4	Lusin	73.200	292.800,00
	- Buku Agenda Keluar Masuk	4	Pcs	30.500	122.000,00
	- Buku Folio isi 100	6	Pcs	24.150	144.900,00
	- Isi Staffer nomor 10	2	Pack	84.000	168.000,00
	- Isi staffer tembak	5	Kotak	29.000	145.000,00
	- Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25	Rim	65.000	1.625.000,00
	- Lakban hitam 3"	4	Pcs	19.925	79.700,00
	- Map biasa/map jago	78	Lbr	500	39.000,00
	- Map dokumen plastik	15	Pcs	32.000	480.000,00
	- Odner bambus	5	buah	41.000	205.000,00
	- rautan pensil angel	2	buah	150.000	300.000,00
	- Spidol White board	6	Pcs	9.800	58.800,00
	- Staffer Tembak	1	Pcs	582.000	582.000,00
	- Tinta Printer	9	Pcs	100.000	900.000,00
	- Material 10.000	130	Pcs	10.000	1.300.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				6.250.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor - Bahan Cetak				6.250.000,00
	- Cetak Fotocopy	2000	Lbr	500	1.000.000,00
	- Cetak Laporan Akhir	3	Buku	250.000	750.000,00
	- Cetak Leaflet Informasi dan Edukasi UPTD PPA	1000	Lbr	4.500	4.500.000,00



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA)	: DR. Ibnu Araby, MM.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Hj. Ainun Jariah, S.P.M.Pd
Program	: Program Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Kegiatan	: Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Sub Kegiatan	: Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Tahun Anggaran	: 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	ISI ULANG-REFILL STAPLER TENBAK	Kotak	5	29.000	145.000
2.	TINTA EPSON 003 MAGENTA	Botol	2	100.000	200.000
3.	TINTA EPSON 003 YELLOW	Buah	2	100.000	200.000
4.	TINTA EPSON 003 CYAN	Buah	2	100.000	200.000
5.	spidol whiteboard snowman bg-12	Buah	6	9.800	58.800
6.	Ballpoint Pen Zebra KOKOROGel pen Ink	Buah	2	64.200	128.400
7.	trigonal clip jumbo harga kotakgross	Pcs	5	48.000	240.000
8.	STAPLER TENBAK-GUN TACKER kangaro	Pak	1	245.000	245.000
9.	STOFMAP FOLIO DJAGO	Buah	78	500	39.000
10.	TINTA EPSON 664 HITAM	Botol	3	100.000	300.000
11.	KERTAS HVS FOLIO/F4 70 GRAM	Rim	10	58.000	580.000
12.	RAUTAN DUDUK	Buah	2	44.000	88.000
13.	MATERAI TEMPEL 10.000	Buah	130	10.000	1.300.000
14.	Buku Hard Cover KIKY-isi 100	Buah	6	24.150	144.900
15.	ISI STAPLER-ISI STAPLES KANGARO No 10	Buah	40	2.700	108.000
16.	lakban hitam 3 inch	Buah	4	19.925	79.700
17.	KERTAS HVS SIDU 70 GSM KWARTO/A4	Rim	25	55.000	1.375.000
18.	Binder Clips No 111 Harga Lusinan/gross	Buah	3	51.000	153.000
19.	BINDER CLIPS NO. 107	Buah	20	5.000	100.000
20.	Post it Besar sticky note125x75mm	Buah	5	25.000	125.000
21.	MAP DOKUMEN PLASTIKCLEAR HOLDER K	Buah	15	32.000	480.000
22.	Buku Hard Cover KIKY-isi 100	Buah	6	24.150	144.900
23.	BINDER CLIPS NO. 280	Buah	5	64.000	320.000
24.	ORDNER BANTEX KWARTO/A4	Buah	5	41.000	205.000
25.	KELUAR MASUK	Buah	4	27.000	108.000
26.	KERTAS COVER FOLIO	Buah	5	59.000	295.000

				JUMLAH I	7.362.700
II	Belanja Bahan Kimia				-
	1. Obat Pembasmi Rumput Gramoxone 250 ML	Buah	5	100.000	500.000
				JUMLAH II	500.000
III	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga Home Use				
	1. Kantong Sampah Polytex M 60 cm x 80 cm	Buah	20	34.500	690.000
	2. Kantong Sampah Polytex L 80 x 100 cm	Buah	20	43.500	870.000
	3. Timbangan Badan Digital	Buah	2	173.500	347.000
	4. Bendera Merah Putih Plastik	Buah	9	29.500	265.500
	5. Bendera Merah Putih Bentang 5 Meter	Buah	4	249.000	996.000
				JUMLAH III	3.168.500
IV	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer				-
	1. Pemeliharaan Komputer dan Service Printer : Service ringan/ganti head printer;	Unit	2	625.000	1.250.000
	2. Pemeliharaan Komputer dan Printer Pemeliharaan Komputer dan Printer : Service PC :1. PC Keuangan : Service Ringan, Instal	Buah	3	645.000	1.935.000
				JUMLAH IV	3.185.000
X	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				-
	1. Pemeliharaan Air Conditioner /AC	Unit	10	470.000	4.700.000
				JUMLAH X	4.700.000
VI	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga Home Use				
	1. tissue	Buah	40	23.500	940.000
	2. Stella matic refill	Buah	10	54.000	540.000
	3. vixal	Buah	15	18.000	270.000
	4. Stella matic diffuser	Buah	3	150.000	450.000
	5. spin mop	Buah	4	360.000	1.440.000
				JUMLAH VI	3.640.000
VII	Belanja Alat/Bahan Cetak				
	1. Cetak Fotocopy	Lembar	2000	500	1.000.000
	2. Cetak Laporan Akhir	Buku	3	250.000	750.000
	3. Leaflet	Lembar	1000	4.500	4.500.000
				JUMLAH VII	6.250.000
	Jumlah Total (I+II+III+IV+X+VI+VII+VIII)				28.806.200
	PPN 10%				2.880.620
	Jumlah Biaya				31.686.820
	Dibulatkan				31.686.000
	Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah				

Samarinda, 22 April 2024

Ditetapkan oleh :

PPTK



Violeta, S.E

NIP. 1970606202007012023



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA)	: DR. Ibnu Araby, MM.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Hj. Ainun Jariah, S.P.M.Pd
Program	: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kegiatan	: Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:
Sumber Dana	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Tahun Anggaran	: 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				
1.	bak cat	Buah	3	29.000	87.000
	kuas roll	Pcs	3	35.000	105.000
	cat mobillex interior	Buah	5	187.000	935.000
	cat mobillex exterior (watershield)	Buah	10	313.500	3.135.000
				JUMLAH I	4.262.000
II	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				-
1	stop kontak 5 lobang	Buah	6	65.000	390.000
2	bola lampu LED 27 watt	Buah	25	125.000	3.125.000
3	bola lampu LED 30 watt	Buah	5	200.000	1.000.000
4	kabel listrik NYA 2x1,5 MM	Pcs	3	257.000	771.000
5	bola lampu LED 12 watt	Buah	20	81.000	1.620.000
				JUMLAH II	6.906.000

III	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat				
1	Ember plastik	Pcs	3	26.000	78.000
2	Porstex besar	Buah	10	36.600	366.000
3	Pembersih Kaca	Buah	6	17.500	105.000
4	Kain serat (kanebo)	Buah	4	60.000	240.000
5	Spons cuci piring	Buah	4	8.900	35.600
6	Sikat tangan	Pcs	3	35.000	105.000
7	Cairan pencuci tangan	Botol	5	25.000	125.000
8	Sabun detergen	Pcs	5	28.000	140.000
9	Kapur barus	Buah	10	18.000	180.000
10	Kain lap/serbet	Buah	10	10.000	100.000
11	Sabun cair	Pcs	7	26.800	187.600
12	Cairan pencuci piring	Buah	8	23.400	187.200
				JUMLAH III	1.849.400
				Jumlah Total (I+II+III)	13.017.400
				PPN 10%	1.301.740
				Jumlah Biaya	14.319.140
				Dibulatkan	14.319.000
	Terbilang : Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah				

Samarinda, 22 April 2024

Ditetapkan oleh :

PPTK



Violeta, S.E

NIP. 1970606202007012023



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, **Telepon Pengaduan** +62 823-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarinda.go.id> Email: dppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG

Pengguna Anggaran/PA (KPA) : DR. Ibnu Araby, MM.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Hj. Ainun Jariah, S.P.M.Pd
Program : Program Perlindungan Perempuan
Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Unit/ Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Belanja Alat Tulis Kantor				
1.	STAPLER HD No 3	Pcs	1	50.000	50.000
2.	PULPEN PILOT BALLINER ZEBRA BIRU	Ktk	2	195.500	391.000
3.	Desk Set V-tec 9058 - Tempat Alat Tulis 3 Seka	Pcs	10	37.500	375.000
4.	pisau cutter kecil a-300	Pcs	3	12.000	36.000
5.	LEM POVINAL KECIL	Pcs	9	7.000	63.000
6.	Stapler max no 10	Pcs	5	22.000	110.000
7.	TINTA EPSON 003 YELLOW	Pcs	4	100.000	400.000
8.	Penghapus papan tulis whiteboard	Pcs	3	9.000	27.000
9.	TINTA EPSON 003 CYAN	Pcs	4	100.000	400.000
10.	TINTA EPSON 003 MAGENTA	Pcs	4	100.000	400.000
11.	tip x jumbo	Buah	5	20.000	100.000
12.	TINTA EPSON 003 HITAM	Buah	12	100.000	1.200.000
13.	TINTA STEMPEL	Buah	3	30.000	90.000
14.	KERTAS STICK KST POST IT	Buah	12	12.000	144.000
15.	DOUBLE TAPE 2 INCH	Buah	3	24.000	72.000
16.	BUKU NCR 1/2 FOLIO	Buah	5	43.000	215.000
17.	PENGGARIS BESI 50 cm	Buah	4	25.000	100.000
18.	KERTAS HVS SIDU 70 GSM KWARTO/A4	Rim	20	55.000	1.100.000
19.	KERTAS NCR KARBON MIDDLE	Buah	15	65.000	975.000
20.	KERTAS HVS FOLIO/F4 70 GRAM	Buah	20	65.000	1.300.000
21.	Batere Alkaline A2	Buah	20	20.000	400.000

	22	LAKBAN/ISOLASI KERTAS 2 INCH	Buah	1	18.000	18.000
	23	FILE BOX-KERANJANG FILE	Buah	4	26.750	107.000
	24	DOUBLE TAPE 1 INCH	Buah	1	10.000	10.000
	25	BUKU HARD COVER FOLIO	Buah	2	25.000	50.000
	26	PULPEN MEJA	Buah	10	8.500	85.000
					JUMLAH I	8.218.000
II		Belanja Cetak				
	1.	PAPAN LUK-CLIPBOARD	Buah	3	20.000	60.000
	2.	KERTAS STICKER	Buku	300	1.000	300.000
	3.	Kertas Photo GLOSSY PRINTECH 210 GSM folio/F4	Buah	12	36.000	432.000
	4.	MAP FOLDER	Buah	200	10.000	2.000.000
	5.	Buku Saku DP2PA	Buku	100	22.500	2.250.000
	6.	KALENDER MEJA-DUDUK	Pcs	50	125.000	6.250.000
	7.	Leaflet	Buah	999	10.000	9.990.000
					JUMLAH II	21.282.000
III		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	1.	Nasi Kotak	Kotak	1382	48.000	66.336.000
					JUMLAH III	66.336.000
IV		Belanja Natura dan Pakan-Pakan				
	1.	Air Mineral Botol Mini	Dos	25	52.000	1.300.000
	2.	Susu Kental Manis 560 Gram	Kleng	10	18.000	180.000
	3.	Minuman Susu Kotak	Dos	15	132.500	1.987.500
	4.	Minuman Teh Kotak 300 ML	Dos	10	74.100	741.000
	5.	Biskuit Kaleng Khong Guan 1600 Gram	Kaleng	15	109.000	1.635.000
	6.	Gula Pasir	Bks	9	17.500	157.500
	7.	Minyak Goreng Sunco 5Liter	Jerigen	10	149.000	1.490.000
	8.	Mie Instant	Dos	15	130.000	1.950.000
	9.	Kopi Bubuk 380 Gram	Bks	10	24.000	240.000
	10.	Ikan Dalam Kaleng 425 Gram	Klg	12	24.500	294.000
	11.	Cornet Beef Chili Pronas 198 Gr	Klg	15	29.000	435.000
	12.	Minuman Kotak Rasa Buah	Dos	10	169.000	1.690.000
	13.	Saos Sambal dalam Botol Kecil	Btl	10	10.000	100.000
	14.	Beras Rojo Lele 10 KG Orange	Krg	2	160.000	320.000
	15.	Kecap Asin	Btl	6	35.000	210.000
	16.	Kecap Manis Cap Bango	Btl	6	45.000	270.000
					JUMLAH II	13.000.000
X		Belanja Handphone				
	1.	REDMI NOTE 13 8GB/256GB	Unit	1	3.500.000	3.500.000
					JUMLAH III	3.500.000
VI		Belanja Handphone				
	1.	Camera DSLR Canon EOS 3000D Kit EF-S 18-55 +	Unit	1	9.000.000	9.000.000
					JUMLAH III	9.000.000
VII		Belanja Iklan Reklame				
	1.	Rollbanner	Roll	10	900.000	9.000.000
					JUMLAH III	9.000.000
VIII		Belanja Pdh				
	1.	Baju Polo Cotton	Unit	20	200.000	4.000.000

		JUMLAH III	4.000.000
	Jumlah Total (I+II+III+IV+X+VI+VII+VIII)		134.336.000
	PPN 10%		13.433.600
	Jumlah Biaya		147.769.600
	Dibulatkan		147.769.000
	Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

Samarinda, 22 April 2024

Ditetapkan oleh :

PPTK



Violeta, S.E

NIP. 1970606202007012023

